



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR





**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan keuangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur atas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam proses penyusunannya, laporan ini senantiasa berpedoman dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan laporan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akhir kata, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Kami menyadari



bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaannya, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode yang akan datang. Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Bupati Seram Bagian Timur

FACHRI HUSNI ALKATIRI



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

Jl. Ampera Nomor 1 Bula Kode Pos 97555 Telp. (091521456 Fex (0915)21455

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Arus kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bula, Mei 2026

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xvi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xix
NERACA	xxi
LAPORAN OPERASIONAL	xxiv
LAPORAN ARUS KAS	xxvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxx
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1.3 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	27
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL	34
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL.....	34
3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	43
BAB IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	45
4.1 PENDAHULUAN	45
4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI	46
4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	50
4.4 PENYAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	122
5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	122
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL).....	166
5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA.....	167
5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	213
5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS	219
5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	223
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	225

**DAFTAR TABEL**

TABEL 2. 1 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (PERSEN) TAHUN 2021–2025	8
TABEL 2. 2 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BAGIAN TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2021- 2025	10
TABEL 2. 3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPNGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2021-2025.....	12
TABEL 2. 4 PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2021-2025 ...	14
TABEL 2. 5 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025.....	15
TABEL 2. 6 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT ASET.....	17
TABEL 2. 7 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2021-2025	19
TABEL 2. 8 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025	20
TABEL 2. 9 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINANDI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025.....	21
TABEL 2. 10 JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (RIBU JIWA) 2021-2025	22
TABEL 2. 11 JUMLAH PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025.....	24
TABEL 2. 12 JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KELAMIN KEGIATAN SELAMA SEMINGGU YANG LALU DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025.....	25
TABEL 2. 13 JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT STATUS PEKERJA UTAMA DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025	26
TABEL 2. 14 KEBIJAKAN REGULASI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021-2025	27
TABEL 3. 1 IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025	33
TABEL 3. 2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.....	34
TABEL 3. 3 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN 2015-2025	35
TABEL 3. 4 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015-2025.....	37
TABEL 3. 5 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025	39
TABEL 3. 6 PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN APBD TAHUN 2025	40
TABEL 3. 7 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025.....	41
TABEL 5. 1 STRUKTUR ANGGARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	69
TABEL 5. 2 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024....	70
TABEL 5. 3 RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	70
TABEL 5. 4 RINCIAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2025 DAN 2024.....	71
TABEL 5. 5 RINCIAN OBJEK PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025 DAN 2024.....	73



TABEL 5. 6 REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2025 DAN 2024.....	74
TABEL 5. 7 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024.....	76
TABEL 5. 8 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	76
TABEL 5. 9 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAMN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	77
TABEL 5. 10 RINCIAN REALISASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK TAHUN 2025 DAN 2024.....	77
TABEL 5. 11 RINCIAN REALISASI DANA TRANSFER -DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2025 DAN 2024	78
TABEL 5. 12 RINCIAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	79
TABEL 5. 13 RINCIAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DAN 2024	79
TABEL 5. 14 RINCIAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH, YAKNI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK TAHUN 2025 DAN 2024.....	82
TABEL 5. 15 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA TAHUN 2025 DAN 2024	83
TABEL 5. 16 RINCIAN REALISASI KLEM DANA NON KAPITASI PADA RSUD BULA TAHUN 2025	83
TABEL 5. 17 RINCIAN JENIS BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	85
TABEL 5. 18 RINCIAN BELANJA OPERASI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	86
TABEL 5. 19 RINCIAN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	86
TABEL 5. 20 RINCIAN BELANJA OPERASI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	89
TABEL 5. 21 JENIS BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	102
TABEL 5. 22 RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	104
TABEL 5. 23 RINCIAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	105
TABEL 5. 24 RINCIAN BELANJA TANAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	105
TABEL 5. 25 RINCIAN BELANJA PERALATAN DAN MESIN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	106
TABEL 5. 26 RINCIAN BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	109
TABEL 5. 27 RINCIAN BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	110
TABEL 5. 28 RINCIAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	111
TABEL 5. 29 RINCIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	112
TABEL 5. 30 RINCIAN SURPLUS/(DEFISIT) PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	113
TABEL 5. 31 SILPA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024....	114
TABEL 5. 32 SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024	115
TABEL 5. 33 URAIAN NERACA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	116
TABEL 5. 34 SALDO ASET PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	117



TABEL 5. 35 RINCIAN ASET LANCAR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	117
TABEL 5. 36 RINCIAN KAS DAN SETARA KAS LANCAR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	117
TABEL 5. 37 RINCIAN SISA UP, TU DAN KAS BANK BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2025 DAN 2024	119
TABEL 5. 38 RINCIAN KAS LAINNYA UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN PADA OPD TAHUN 2025	125
TABEL 5. 39 KAS LAINNYA (Kas Bank) BOK SALUR PADA PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	125
TABEL 5. 40 RINCIAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	126
TABEL 5. 41 RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2025 DAN 2024.....	127
TABEL 5. 42 PIUTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PBBP2 TAHUN 2017 DAN PIUTANG PEMBAYARAN GAJI ATAS SKPP TAHUN 2024-2025.....	127
TABEL 5. 43 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2025 DAN 2024.....	128
TABEL 5. 44 RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025 DAN 2024.....	128
TABEL 5. 45 RINCIAN NILAI PIUTANG SETELAH PENYISIHAN.....	129
TABEL 5. 46 RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK TAHUN 2025.....	129
TABEL 5. 47 PENYISIHAN PIUTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PBBP2 TAHUN 2017 DAN PIUTANG PEMBAYARAN GAJI ATAS SKPP TAHUN 2024-2025	131
TABEL 5. 48 RINCIAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2025.....	132
TABEL 5. 49 RINCIAN PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	133
TABEL 5. 50 RINCIAN INVESTASI JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	134
TABEL 5. 51 RINCIAN INVESTASI NON PERMANEN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	134
TABEL 5. 52 RINCIAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025.....	135
TABEL 5. 53 RINCIAN PENYISIHAN DANA BERGULIR SELAMA TAHUN 2025.....	135
TABEL 5. 54 RINCIAN PENYISIHAN INVESTASI JANGKA PERMANEN TAHUN 2025 DAN 2024	136
TABEL 5. 55 RINCIAN INVESTASI JANGKA PANJANG PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	137
TABEL 5. 56 RINCIAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 2025 DAN 2024.....	137
TABEL 5. 57 RINCIAN BELANJA ASET TETAP TANAH PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2025	138
TABEL 5. 58 RINCIAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	139
TABEL 5. 59 RINCIAN SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2025.....	140
TABEL 5. 60 SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN SARANA DIGITALISASI TAHUN 2025 PADA WILAYAH PROVINSI MALUKU UNTUK TK/PAUD	141
TABEL 5. 61 SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN SARANA DIGITALISASI TAHUN 2025 PADA WILAYAH PROVINSI MALUKU UNTUK SEKOLAH DASAR (SD).....	142
TABEL 5. 62 SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN SARANA DIGITALISASI TAHUN 2025 PADA WILAYAH PROVINSI MALUKU UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	147
TABEL 5. 63 RINCIAN SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	150
TABEL 5. 64 RINCIAN JENIS ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	151
TABEL 5. 65 SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI TAHUN 2025 PADA WILAYAH PROVINSI MALUKU SEKOLAH DASAR (SD).....	151
TABEL 5. 66 SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI TAHUN 2025 PADA WILAYAH PROVINSI MALUKU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).....	151
TABEL 5. 67 RINCIAN ASET JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM	



BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	152
TABEL 5. 68 RINCIAN SALDO ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PERJENIS PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	153
TABEL 5. 69 RINCIAN SALDO ASET TETAP LAINNYA PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024.....	153
TABEL 5. 70 RINCIAN ASET TETAP LAINNYA PERJENIS PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	154
TABEL 5. 71 RINCIAN BELANJA ASET TETAP KDP PER OPD PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	154
TABEL 5. 72 RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2025 DAN 2024.....	155
TABEL 5. 73 RINCIAN TAGIHAN JANGKA PANJANG SISA KAS DANA BOS ATAS SKTJM TAHUN 2025	156
TABEL 5. 74 RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD REALISASI DAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	158
TABEL 5. 75 REKLASIFIKASI PENAMBAHAN SISA KAS TEKOR BENDAHARA PENGELUARAN YANG MASUK PADA ASET LAIN-LAIN	158
TABEL 5. 76 REKLASIFIKASI PENAMBAHAN SISA KAS TEKOR BENDAHARA PENGELUARAN YANG MASUK PADA ASET LAIN-LAIN YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI	159
TABEL 5. 77 ASET LAIN-LAIN BERUPA ASET TETAP YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI.....	160
TABEL 5. 78 SELISIH ANTARA NERACA DAN KIB PADA OPD.....	160
TABEL 5. 79 REKLASIFIKASI ASET TETAP DAN BARANG DAN JASA KE ASET LAINNYA KARENA KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN	161
TABEL 5. 80 REKLASIFIKASI ASET TETAP YANG AKAN DIHIBAHKAN, ATAU ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN OLEH OPERASIONAL PEMERINTAH (SEDANG DALAM PROSES HIBAH)	161
TABEL 5. 81 REKLASIFIKASI ASET TETAP RUSAK BERAT (HASIL PEMERIKSAAN FISIK - PENGADAAN TA 2025)	162
TABEL 5. 82 RINCIAN PROPERTI INVESTASI TAHUN 2025.....	163
TABEL 5. 83 RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PROPERTI INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025.....	164
TABEL 5. 84 RINCIAN PENDAPATAN LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024	166
TABEL 5. 85 RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	166
TABEL 5. 86 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	168
TABEL 5. 87 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO PER 2025 DAN 2024	168
TABEL 5. 88 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO PER 2025 DAN 2024.....	169
TABEL 5. 89 RINCIAN BEBAN-LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	170
TABEL 5. 90 RINCIAN BEBAN OPERASI-LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	170
TABEL 5. 91 RINCIAN BEBAN LO PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025 DAN 2024.....	172
TABEL 5. 92 RINCIAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2025.....	177
TABEL 6. 1 LUAS DARATAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	180
TABEL 6. 2 JARAK DARI IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA KABUPATEN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (KM)	180
TABEL 6. 3 BANYAKNYA PULAU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	181
TABEL 6. 4 NAMA – NAMA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2003 – 2025	181
TABEL 6. 5 RINCIAN JUMLAH APARATUR SIPIL NEGERA PERGOLONGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025.....	183



TABEL 6. 6 NAMA – NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2005 – 2025	184
TABEL 6. 7 JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019-2024	184
TABEL 6. 8 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	187
TABEL 6. 9 KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025.....	195
TABEL 6. 10 KETERKAITAN ANTARA PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI MALUKU DAN PRIORITAS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025.....	196
TABEL 6. 11 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025	197
TABEL 6. 12 KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	215
TABEL 6. 13 PROGRAM PRIORITAS RKPD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 2025.....	216



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2. 1 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 2021- 2025.....	8
GRAFIK 2. 2 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2025	11
GRAFIK 2. 3 PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2021-2025 ...	12
GRAFIK 2. 4 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2025	13
GRAFIK 2. 5 PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2021-2025..	15
GRAFIK 2. 6 CAPAIAN IPM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025	18
GRAFIK 2. 7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2025	19
GRAFIK 2. 8 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025	21
GRAFIK 2. 9 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2025	22
GRAFIK 2. 10 PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU 2025.....	23
GRAFIK 3. 1 IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2025	33
GRAFIK 3. 2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2025	35
GRAFIK 3. 3 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PAD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DARI TA. 2015 -2025.....	36
GRAFIK 3. 4 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2015 – 2025	37
GRAFIK 3. 5 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025	39



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 6. 1. PETA BATAS WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	225
--	-----



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 UNAUDITED	%	REALISASI 2024 AUDITED
4	PENDAPATAN DAERAH - LRA	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	93,06	990.361.660.942,18
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	21.819.153.697,00	22.702.720.258,10	103,99	15.894.885.394,63
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.775.163.788,00	7.446.428.257,39	84,86	6.349.520.889,08
4 1 02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.500.000.000,00	1.341.331.698,00	89,42	1.358.914.500,00
4 1 03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.517.696.726,00	6.517.696.726,00	100,00	4.786.600.370,00
4 1 04	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.026.293.183,00	7.397.263.576,71	146,90	3.399.849.635,55
4 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	898.658.739.453,00	833.105.728.728,00	92,71	920.977.587.040,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	885.246.943.000,00	818.036.284.698,00	92,41	901.402.696.468,00
4 2 01 01	Dana Perimbangan	728.153.469.000,00	705.671.188.100,00	96,91	726.296.709.468,00
4 2 01 01 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	25.258.447.000,00	24.396.385.556,00	96,59	29.999.363.000,00
4 2 01 01 02	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	552.293.041.000,00	535.518.624.286,00	96,96	538.829.091.592,00
4 2 01 01 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	22.698.074.000,00	22.116.022.170,00	97,44	44.809.728.325,00
4 2 01 01 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	127.903.907.000,00	123.640.156.088,00	96,67	112.658.526.551,00
4 2 01 05	Dana Penyesuaian/Dana Desa - LRA	157.093.474.000,00	112.365.096.598,00	71,53	164.054.309.000,00
4 2 01 06	Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID)	0,00	0,00	0,00	11.051.678.000,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	13.411.796.453,00	15.069.444.030,00	112,36	19.574.890.572,00
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	13.411.796.453,00	15.069.444.030,00	112,36	19.574.890.572,00
4 2 02 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00		0,00	0,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	97,51	53.489.188.507,55
4 3 01	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	31.170.344.000,00
4 3 03	Pendapatan Lainnya - LRA	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	0,00	22.318.844.507,55
5	BELANJA	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	92,01	790.941.234.041,96
5 1	BELANJA OPERASI	693.186.541.495,42	659.039.854.753,19	91,66	694.087.144.718,29
5 1 01	Belanja Pegawai	400.031.625.110,42	366.337.393.938,00	91,60	361.178.182.517,35
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	255.191.787.685,00	254.106.201.805,59	90,27	264.476.140.376,13
5 1 04	Belanja Subsidi	1.662.150.000,00	1.429.176.604,00	85,98	1.808.641.395,00
5 1 05	Belanja Hibah	23.401.182.000,00	24.140.175.635,00	103,16	55.318.332.643,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	12.899.796.700,00	13.026.906.770,60	100,99	11.305.847.786,81
5 2	BELANJA MODAL	95.165.924.446,25	90.557.669.743,24	95,16	96.854.089.323,67
5 2 01	Belanja Modal Tanah	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.011.631.793,25	19.536.887.395,67	97,63	12.830.305.448,39
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.303.949.248,00	17.760.981.555,00	87,48	14.813.318.179,85
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.021.531.808,00	51.379.352.361,57	95,11	68.723.365.698,43
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	428.811.597,00	1.530.448.431,00	0,00	487.099.997,00
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	300.000.000,00	30,00	0,00
5 3 01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	300.000.000,00	30,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 UNAUDITED	%	REALISASI 2024 AUDITED
5 4	TRANSFER DAERAH	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00
5 4 02	BANTUAN KEUANGAN	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00
5 4 02 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.098.259.588,67)	(46.417.369.038,33)	32,97	(24.311.067.541,78)
6	PEMBIAYAAN	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	100,00	93.409.327.130,45
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	100,00	95.854.827.130,45
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	100,00	95.854.827.130,45
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.445.500.000,00
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	2.445.500.000,00
6 2 03	Pembayaran Pokok Utang	0,00		0,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	0,00	22.680.890.550,34	0,00	69.098.259.588,67

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025



NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2025 dan 2024

REF	URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED
1	ASET	1.516.142.185.307,02	1.631.717.839.288,64
1 1	ASET LANCAR	50.934.195.845,88	100.680.792.128,19
1 1 01	Kas dan Setara Kas	22.978.341.930,34	69.107.444.455,67
1 1 01 01	Kas di Kas Daerah	18.910.349.056,28	64.606.269.284,74
1 1 01 02	Kas di Bendahara Penerimaan	13.918.900,00	11.875.000,00
1 1 01 03	Kas di Bendahara Pengeluaran	75.824.593,06	163.466.476,22
1 1 01 05	Kas Lainnya BOS	2.639.760.353,00	1.862.766.649,00
1 1 01 06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
1 1 01 07	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	95.388.100,00	1.801.233,71
1 1 01 07	Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran	297.451.380,00	9.184.867,00
1 1 01 11	Kas Lainnya di Bendahara (Selaian PFK) BOK Salur	945.649.548,00	2.452.080.945,00
1 1 02	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1 1 02 01	Investasi dalam Saham	0,00	0,00
1 1 02 02	Investasi dalam Deposito	0,00	0,00
1 1 02 03	Investasi dalam SUN	0,00	0,00
1 1 02 04	Investasi dalam SBI	0,00	0,00
1 1 02 05	Investasi dalam SPN	0,00	0,00
1 1 02 06	Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
1 1 03	Piutang	11.737.353.507,64	11.160.185.075,89
1 1 03 03	Piutang Pendapatan Pajak Daerah PAD	6.349.801.079,64	5.602.895.831,89
1 1 03 04	Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	0,00
1 1 03 06	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	988.926.186,00	1.014.931.506,00
1 1 03 07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.398.626.242,00	4.542.357.738,00
1 1 03 09	Piutang Lainnya	0,00	0,00
1 1 10	Penyisihan Piutang	(3.394.089.627,85)	(2.987.983.522,34)
1 1 10 01	Penyisihan Piutang Pajak	(2.923.142.502,85)	(2.507.424.766,34)
1 1 10 01	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
1 1 10 01	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(470.947.125,00)	(480.558.756,00)
1 1 11	Beban Dibayar Dimuka	104.166.666,67	208.333.333,33
1 1 11 01	Beban Dibayar Dimuka	104.166.666,67	208.333.333,33
1 1 12	Persediaan	19.508.423.369,08	23.192.812.785,63
1 1 12 01	Persediaan Barang Pakai Habis	19.508.423.369,08	23.192.812.785,63
1 1 12 02	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
1 1 12 03	Persediaan Barang Bekas Pakai	0,00	0,00
1 2	INVESTASI JANGKA PANJANG	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00
1 2 01	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1 2 01 03	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
1 2 01 04	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
1 2 01	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
1 2 01 05	Investasi Non-Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28
1 2 01	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)
1 2 02	Investasi Jangka Panjang Permanen	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00
1 2 02 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00
1 2 02 02	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00

REF	URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED
1 3	ASET TETAP	1.258.575.855.644,87	1.324.018.946.278,58
1 3 01	Tanah	25.316.963.402,25	24.966.963.402,25
1 3 02	Peralatan dan Mesin	454.082.886.773,62	435.436.867.861,45
1 3 03	Gedung dan Bangunan	911.932.705.177,23	894.269.383.462,23
1 3 04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.720.882.865.938,10	1.666.302.647.656,53
1 3 05	Aset Tetap Lainnya	17.883.384.354,08	16.352.935.923,08
1 3 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.382.631.872,27	29.465.447.542,27
1 3 07	Akumulasi Penyusutan	(1.902.905.581.872,68)	(1.742.775.299.569,23)
1 4	DANA CADANGAN	0,00	0,00
1 4 01	Dana Cadangan	0,00	0,00
1 5	ASET LAINNYA	170.147.251.591,27	170.250.980.436,87
1 5 01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1 5 02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1 5 03	Aset Tidak Berwujud	2.406.375.814,00	2.406.375.814,00
1 5 04	Aset Lain-lain	170.084.801.571,27	170.084.801.571,27
1 5 05	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.343.925.794,00)	(2.240.196.948,40)
1 6	PROPERTI INVESTASI	1.935.332.945,00	2.217.571.165,00
1 6 1	Properti Investasi	5.146.998.400,00	5.146.998.400,00
1 6 1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.211.665.455,00)	(2.929.427.235,00)
2	KEWAJIBAN	2.933.561.180,00	10.152.552.230,29
2 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.933.561.180,00	10.152.552.230,29
2 1 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	297.451.380,00	9.184.867,00
2 1 02	Utang Bunga	0,00	0,00
2 1 04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2 1 05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2 1 06 01	Utang Beban Pegawai	522.653.500,00	5.496.893.863,00
2 1 07	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.113.456.300,00	4.646.473.500,29
2 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
2 2 01	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2 2 02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
3	EKUITAS	1.513.208.624.127,02	1.621.565.287.058,35
3 1 01 01	EKUITAS	1.513.208.624.127,02	1.621.565.287.058,35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.516.142.185.307,02	1.631.717.839.288,64

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
7	PENDAPATAN DAERAH - LO	762.313.340.114,85	990.290.286.391,10	(227.976.946.276,25)	(23,02)
7 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	23.423.620.185,85	16.463.221.587,55	6.960.398.598,30	42,28
7 1 01	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.193.333.505,14	6.993.616.582,00	1.199.716.923,14	17,15
7 1 02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.341.331.698,00	1.358.914.500,00	(17.582.802,00)	(1,29)
7 1 03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.517.696.726,00	4.786.600.370,00	1.731.096.356,00	36,17
7 1 04	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.371.258.256,71	3.324.090.135,55	4.047.168.121,16	121,75
7 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	720.596.900.634,00	920.337.876.296,00	(199.740.975.662,00)	(21,70)
7 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	705.671.188.100,00	901.526.366.468,00	(195.855.178.368,00)	(21,72)
7 2 01 01	Dana Perimbangan LO	705.671.188.100,00	726.420.379.468,00	(20.749.191.368,00)	(2,86)
7 2 01 05	Dana Desa LO	-	164.054.309.000,00	(164.054.309.000,00)	(100,00)
7 2 01 06	Dana Insentif Daerah LO	-	11.051.678.000,00	(11.051.678.000,00)	(100,00)
7 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	14.925.712.534,00	18.811.509.828,00	(3.885.797.294,00)	(20,66)
7 2 02 01	Pendapatan Bagi hasil	14.925.712.534,00	18.811.509.828,00	(3.885.797.294,00)	(20,66)
7 2	Bantuan Keuangan - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	18.292.819.295,00	53.489.188.507,55	(35.196.369.212,55)	(65,80)
7 3 01	Pendapatan Hibah - LO	-	31.170.344.000,00	(31.170.344.000,00)	(100,00)
7 3 02	Dana Darurat - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 3 03	Pendapatan Lainnya - LO	18.292.819.295,00	22.318.844.507,55	(4.026.025.212,55)	0,00
7 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 4 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 4 02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 4 03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	0,00	0,00	0,00
7 5 01	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH	878.224.873.863,12	895.739.463.043,34	(17.814.589.180,22)	(1,99)
8 1	BEBAN OPERASI	819.668.857.638,12	836.062.277.601,34	(16.393.419.963,22)	(1,96)
8 1 01	Beban Pegawai - LO	371.311.634.301,00	350.206.240.565,35	21.105.393.735,65	6,03
8 1 02	Beban Barang dan Jasa	251.574.065.712,25	254.952.868.895,53	(3.378.803.183,28)	(1,33)
8 1 02 01	Beban Persediaan	3.684.389.416,55	3.542.220.412,77	142.169.003,78	4,01
8 1 04	Beban Subsidi	1.429.176.604,00	1.808.641.395,00	(379.464.791,00)	(20,98)
8 1 05	Beban Hibah	24.140.175.635,00	55.318.332.643,00	(31.178.157.008,00)	(56,36)
8 1 06	Beban Bantuan Sosial	13.026.906.770,60	11.305.847.786,81	1.721.058.983,79	15,22
8 1 07	Beban Penyisihan Piutang	406.106.105,51	240.799.872,68	165.306.232,84	68,65
8 1 07 04	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
8 1 08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	154.096.403.093,20	158.687.326.030,20	(4.590.922.936,99)	(2,89)
8 2	BEBAN TRANSFER	58.256.016.225,00	59.677.185.442,00	(1.421.169.217,00)	(2,38)
8 2 01	Beban Bagi Hasil				
8 2 01 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	0,00	0,00	0,00
8 2 01 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,00	0,00	0,00
8 2 02	Beban Bantuan Keuangan				
8 2 02 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00	0,00	0,00
8 2 02 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	58.256.016.225,00	59.677.185.442,00	(1.421.169.217,00)	(2,38)

KODE	URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8 2 02 03	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	0,00	0,00	0,00
8 2 02 04	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00	0,00
8 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	0,00	0,00	0,00
8 3 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	0,00	0,00	0,00
8 3 02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	0,00	0,00	0,00
8 3 03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	0,00	0,00	0,00
8 4	BEBAN LUAR BIASA	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8 4 01	Beban Luar Biasa	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	(115.911.533.748,27)	94.550.823.347,77	(210.162.357.096,03)	(222,27)

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



LAPORAN ARUS KAS

TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	7.446.428.257,39	6.349.520.889,08
Penerimaan Retribusi Daerah	1.341.331.698,00	1.358.914.500,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.517.696.726,00	4.786.600.370,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.397.263.576,71	3.399.849.635,55
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	24.396.385.556,00	29.999.363.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	535.518.624.286,00	538.829.091.592,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	145.756.178.258,00	157.468.254.876,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	112.365.096.598,00	164.054.309.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.051.678.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.069.444.030,00	19.574.890.572,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	31.170.344.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	18.292.819.295,00	22.318.844.507,55
Jumlah Arus Kas Masuk	874.101.268.281,10	990.361.660.942,18
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	366.337.393.938,00	361.178.182.517,35
Pembayaran Barang	254.106.201.805,59	264.476.140.376,13
Pembayaran Subsidi	1.429.176.604,00	1.808.641.395,00
Pembayaran Hibah	24.140.175.635,00	55.318.332.643,00
Pembayaran Bantuan Sosial	13.026.906.770,60	11.305.847.786,81
Pembayaran Tak Terduga	300.000.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	170.621.112.823,00	223.731.494.442,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	829.960.967.576,19	917.818.639.160,29
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	44.140.300.704,91	72.543.021.781,89
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	350.000.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.536.887.395,67	12.830.305.448,39
Belanja Bangunan dan Gedung	17.760.981.555,00	14.813.318.179,85
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.379.352.361,57	68.723.365.698,43
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.530.448.431,00	487.099.997,00
Jumlah Arus Kas Keluar	90.557.669.743,24	96.854.089.323,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(90.557.669.743,24)	(96.854.089.323,67)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Keluar		

URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.445.500.000,00
Pemberian Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	2.445.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	(2.445.500.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan PFK	48.031.584.495,25	28.616.873.693,02
Penerimaan Setoran pajak sisa PFK Periode sebelumnya	9.184.867,00	0,00
Penerimaan Setoran sisa UP GU TU Periode Sebelumnya	0,00	0,00
Sisa saldo UP TA sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	48.040.769.362,25	28.616.873.693,02
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran PFK	47.773.437.077,54	28.748.213.136,99
Pengeluaran UP GU TU TA Berjalan UUDP	(20.934.228,29)	0,00
Pengeluaran UP GU TU TA Berjalan PFK	0,00	0,00
Sisa saldo UP TA berkenaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	47.752.502.849,25	28.748.213.136,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	288.266.513,00	(131.339.443,97)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(46.129.102.525,33)	(26.887.906.985,75)
Saldo Awal Kas	69.107.444.455,67	96.942.671.313,42
Koreksi SILPA Tahun Lalu	0,00	(947.319.872,00)
Saldo Akhir Kas	22.978.341.930,34	69.107.444.455,67

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	SALDO 2025 UNAUDITED	SALDO 2024 AUDITED
EKUITAS AWAL	1.621.565.287.058,35	1.953.724.221.136,29
SURPLUS/DEFISIT-LO	(115.911.533.748,27)	94.550.823.347,77
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.554.870.816,94	(426.709.757.425,71)
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	2.626.533.521,93	28.938.340.465,91
Koreksi Ekuitas - Piutang	601.747.527,25	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(620.237.133,50)	(261.060.503.045,72)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	(850.783.260,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	4.974.240.363,00	(21.943.883.904,00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(27.413.461,74)	(171.792.927.681,90)
EKUITAS AKHIR	1.513.208.624.127,02	1.621.565.287.058,35

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi .:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas



Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024. disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun



jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seram Bagian Timur disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

1.3 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Entitas Akuntansi adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi :



- 1.01.2.22.2.19.03.000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
- 1.02.0.00.0.00.01.000 Dinas Kesehatan;
- 1.02.0.00.0.00.01.000 Rumah Sakit Umum Daerah Bula;
- 1.02.0.00.0.00.01.000 Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun;
- 1.03.0.00.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.04.0.00.0.00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 1.05.0.00.0.00.01.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 1.05.0.00.0.00.02.000 Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.05.0.00.0.00.04.000 Dinas Pemadam Kebakaran
- 1.06.0.00.0.00.01.000 Dinas Sosial;
- 2.07.3.32.0.00.02.000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 2.08.2.13.0.00.02.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2.09.0.00.0.00.01.000 Dinas Ketahanan Pangan;
- 2.11.0.00.0.00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup;
- 2.12.0.00.0.00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2.14.0.00.0.00.01.000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2.15.0.00.0.00.01.000 Dinas Perhubungan;
- 2.16.2.20.2.21.03.000 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.17.3.30.3.31.03.000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2.18.0.00.0.00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.23.2.24.0.00.02.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- 3.25.0.00.0.00.01.000 Dinas Perikanan;
- 3.26.0.00.0.00.01.000 Dinas Pariwisata;
- 3.27.0.00.0.00.01.000 Dinas Pertanian;
- 4.01.0.00.0.00.01.000 Sekretariat Daerah;
- 4.02.0.00.0.00.01.000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5.01.5.05.0.00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- 5.02.0.00.0.00.03.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5.02.0.00.0.00.04.000 Badan Pendapatan Daerah;
- 5.03.5.04.0.00.02.000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6.01.0.00.0.00.01.000 Inspektorat Daerah;
- 7.01.0.00.0.00.01.000 Kecamatan Bula;



7.01.0.00.0.00.02.000 Kecamatan Bula Barat;
7.01.0.00.0.00.03.000 Kecamatan Teluk Waru;
7.01.0.00.0.00.04.000 Kecamatan Tutuk Tolu;
7.01.0.00.0.00.05.000 Kecamatan Kian Darat;
7.01.0.00.0.00.06.000 Kecamatan Siritaun Wida Timur;
7.01.0.00.0.00.07.000 Kecamatan Kilmuri;
7.01.0.00.0.00.08.000 Kecamatan Werinama;
7.01.0.00.0.00.09.000 Kecamatan Siwalalat;
7.01.0.00.0.00.10.000 Kecamatan Seram Timur;
7.01.0.00.0.00.11.000 Kecamatan Pulau Gorom;
7.01.0.00.0.00.12.000 Kecamatan Gorom Timur;
7.01.0.00.0.00.13.000 Kecamatan Pulau Panjang;
7.01.0.00.0.00.14.000 Kecamatan Kesui Watubela;
7.01.0.00.0.00.15.000 Kecamatan Teor;
8.01.0.00.0.00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur disusun sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab IV Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Pendahuluan
- 4.2 Asumsi Dasar Akuntansi
- 4.3 Kebijakan Akuntansi



4.4 Penyajian Kebijakan – Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Penjelasan Pos-Pos N E R A C A

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi dinamika perekonomian regional, nasional, hingga perekonomian global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 sangat ditentukan oleh tingkat daya saing ekonomi masyarakat, yang selanjutnya dapat diukur melalui berbagai indikator makroekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
7. Angka Kemiskinan, dan
8. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi perekonomian daerah yang tercermin dari meningkatnya pendapatan daerah.

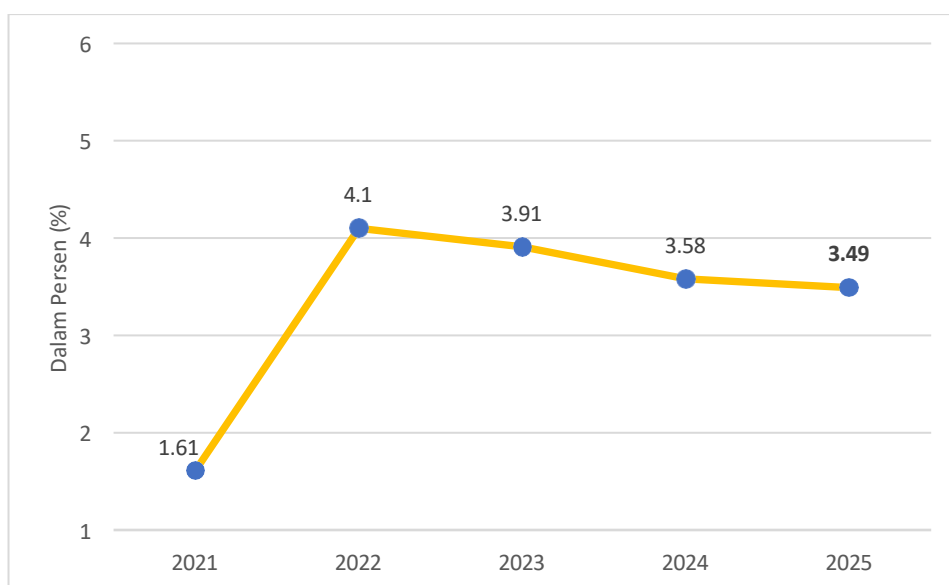
Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan jika pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 berada pada 3,49 persen, mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dari tahun 2024 yang berada pada angka 3,58 persen.

Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2025 adalah pada Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dengan

presentase sebesar 12.65 persen, mengalami peningkatan sebesar 4.78 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.87 persen pada tahun 2025.

Sedangkan Kategori sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2025 dimana pertumbuhannya sebesar negatif 5.27 persen. Sebagaimana dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur 2021- 2025



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2026

2.1.1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontraksi ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur secara regional berada dibawah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku secara keseluruhan yakni mengalami pertumbuh sebesar 4.56%.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Persen) Tahun 2021–2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	3,83	5,66	4,41	4,62	4,59
Maluku Tenggara	3,42	5,65	4,84	5,44	4,57
Maluku Tengah	3,22	5,19	4,35	5,28	4,76
Buru	3,02	5,56	4,02	4,38	4,01
Kepulauan Aru	3,47	5,64	4,97	5,45	5,07



Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Seram Bagian Barat	3,4	5,63	4,66	5,62	4,35
Seram Bagian Timur	1,61	4,1	3,91	3,58	3,49
Maluku Barat Daya	2,63	5,01	24,7	6,7	3,49
Buru Selatan	3,5	5,53	4,58	4,97	4,21
Ambon	3,9	5,23	4,47	5,96	4,87
Tual	3,46	5,68	5,85	4,93	4,29
Maluku	3,05	5,11	5,21	5,34	4,56
Maluku		-0,91	3,05	5,11	5,21

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada periode waktu tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Kedua pendekatan tersebut menyajikan komposisi nilai tambah, baik yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) maupun menurut komponen penggunaannya. PDB dan PDRB berdasarkan pendekatan lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi melalui berbagai aktivitas produksi. Sementara itu, pendekatan pengeluaran menggambarkan penggunaan nilai tambah tersebut dalam perekonomian.

Selama lima tahun terakhir (2021-2025) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Seram Bagian Timur pada tahun 2025 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 34,77 persen (naik 2,25 persen dibandingkan tahun 2024) Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan memiliki kontribusi sebesar 12,42 persen (turun sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 16,08 persen). Persentase terbesar ketiga dihasilkan oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,07 persen (naik 0,11 persen dari tahun 2024 yang mencapai 17,96 persen). Bila dilihat lagi secara kontribusi, penyumbang terbesar ke empat dalam perekonomian Seram Bagian Timur tahun 2025 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan



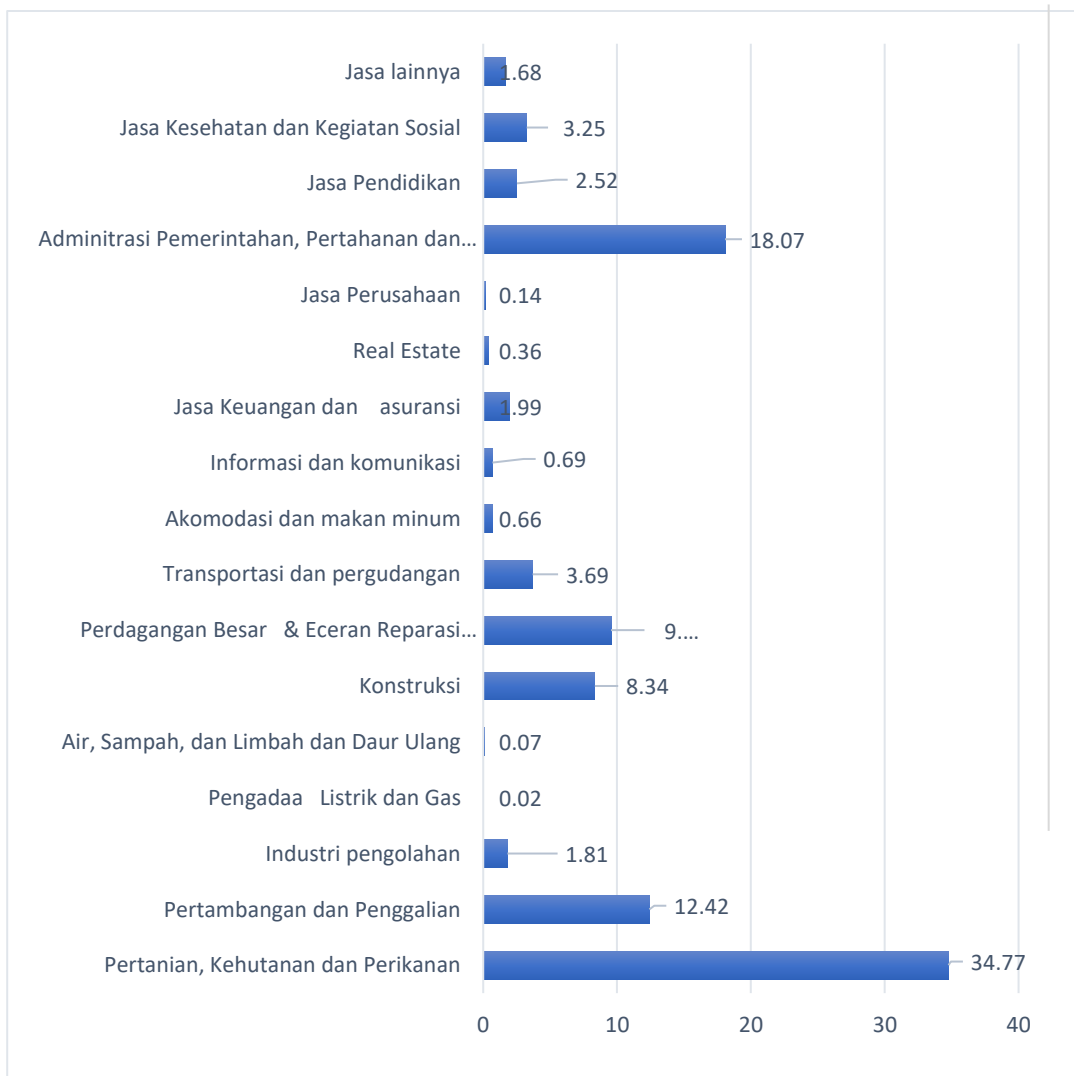
Sepeda Motor sebesar 9,55 persen. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 8,34 persen. Jika dikelompokkan dalam 2 lapangan usaha (barang dan jasa), maka struktur perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha barang yaitu sebesar 58,93 persen, sedangkan untuk lapangan usaha jasa hanya sebesar 41,07 persen, Sebagaimana perkembangannya dapat terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021- 2025

No.	Kategori	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,77	27,17	31,26	32,25	34,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	12,42	28,83	19,49	16,8	12,42
3.	Industri pengolahan	1,81	1,56	1,7	1,7	1,81
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
5.	Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
6.	Konstruksi	8,34	6,9	7,71	7,93	8,34
7.	Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	9,55	7,29	8,48	8,92	9,55
8.	Transportasi dan pergudangan	3,69	2,75	3,44	3,48	3,69
9.	Akomodasi dan makan minum	0,66	0,46	0,54	0,57	0,66
10.	Informasi dan komunikasi	0,69	0,59	0,67	0,67	0,69
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	1,99	1,81	1,91	1,94	1,99
12.	Real Estate	0,36	0,31	0,34	0,34	0,36
13.	Jasa Perusahaan	0,14	0,12	0,14	0,14	0,14
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial	18,07	16,02	17,37	17,96	18,07
15.	Jasa Pendidikan	2,52	2,24	2,42	2,49	2,52
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,25	2,5	2,9	3,09	3,25
17.	Jasa lainnya	1,68	1,37	1,55	1,62	1,68
	Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Grafik 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur

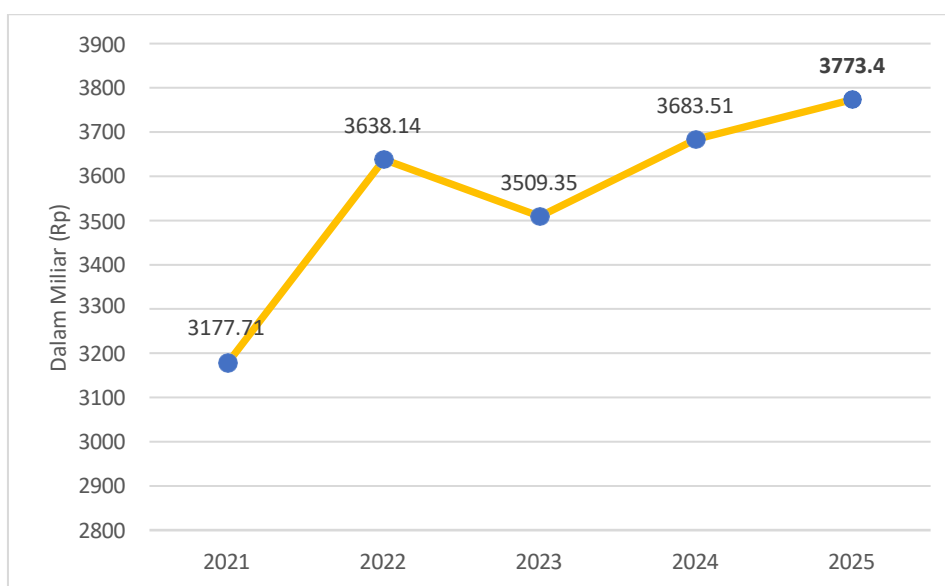
PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real



Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tercatat sebesar 3.773,4 miliar rupiah dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 3.683,51 miliar rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2021-2025

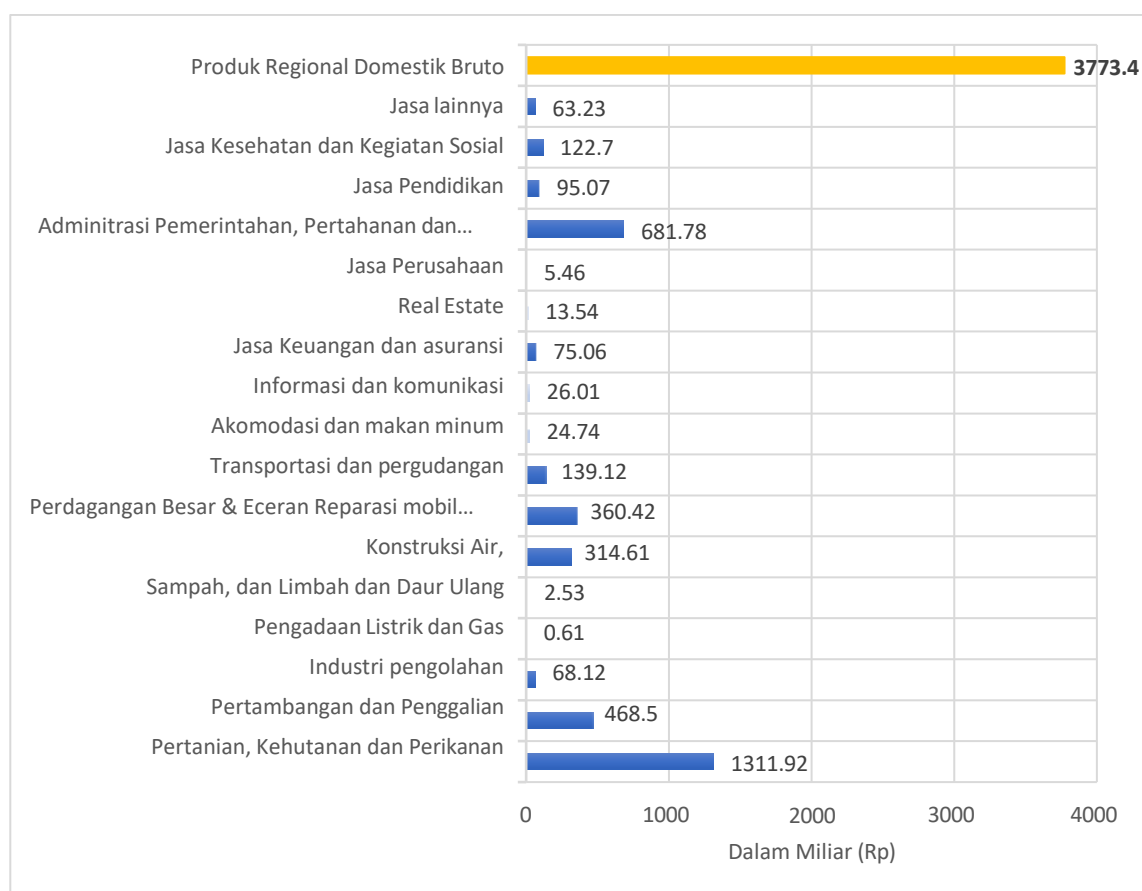
NO	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	883,97	988,5	1097,09	1187,95	2025
2	Pertambangan dan Penggalian	843,46	1,048,75	684,12	618,82	1.311,92
3	Industri pengolahan	48,3	56,61	56,7	62,74	468,5
4	Pengadaa Listrik dan Gas	0,49	0,52	545.22	0,58	68,12
5	Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	1,99	2,13	2,31	2,42	0,61
6	Konstruksi	232,2	251,15	270,51	292,27	2,53
7	Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	232,31	265,39	297,5	328,49	314,61
8	Transportasi dan pergudangan	82,4	99,93	120,57	128,01	139,12
9	Akomodasi dan makan minum	15,11	16,9	18,78	21	24,74



NO	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informasi dan komunikasi	19,59	21,59	23,5	24,83	26,01
11	Jasa Keuangan dan asuransi	59,66	65,87	66,9	71,43	75,06
12	Real Estate	10,63	11,22	11,89	12,59	13,54
13	Jasa Perusahaan	4,13	4,54	4,85	5,27	5,46
14	Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social	539,25	583,01	609,61	661,71	681,78
15	Jasa Pendidikan	75,25	81,44	85,07	91,9	95,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,29	90,89	101,86	113,72	122,7
17	Jasa lainnya	44,81	49,69	54,5	59,79	63,23
Produk Regional Domestik Bruto		3.177,71	3638,14	3.509,35	3.683,51	3.773,40

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Grafik 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2025





2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha Nilai PDRB Kab. Seram Bagian Timur tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 2.280,48 miliar rupiah dari tahun 2024 hanya mencapai 2.203,64 miliar rupiah. Kenaikan ini karena perekonomian kabupaten Seram Bagian Timur telah mengalami pemulihan seiring berjalannya waktu. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

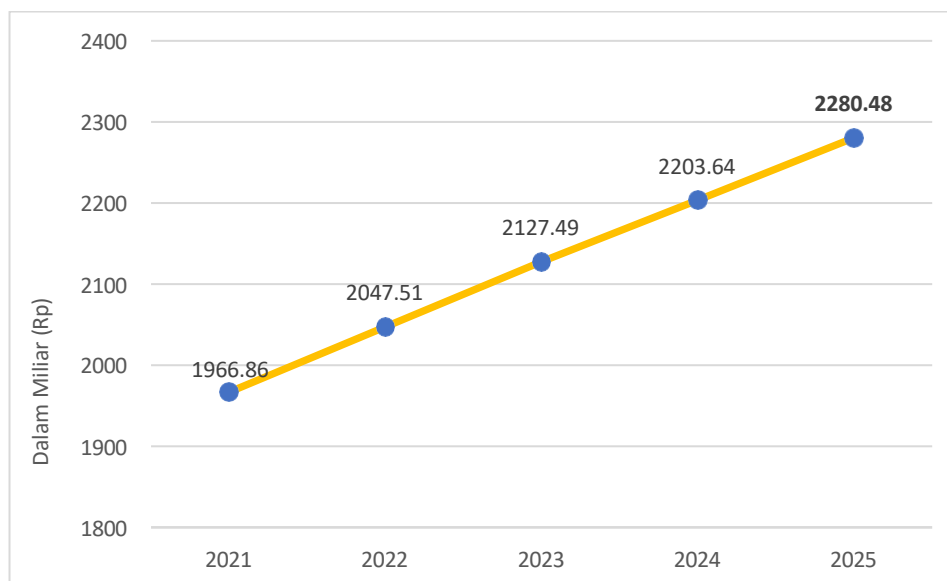
Tabel 2. 4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2021-2025

No.	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	561,14	601,14	643,53	677,19	734,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	507,84	491,11	489,77	466,72	442,11
3.	Industri pengolahan	28,08	31,81	32,8	33,79	36,11
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4
5.	Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,74	1,85	1,9	1,93
6.	Konstruksi	132,79	139,36	144,43	151,53	158,75
7.	Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	150,01	162,52	173,75	188,8	203,11
8.	Transportasi dan pergudangan	54,29	57,26	63,01	66,71	72,77
9.	Akomodasi dan makan minum	9,23	10,01	10,76	11,6	13,07
10.	Informasi dan komunikasi	16,2	17,42	18,49	19,29	20,27
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	36,91	37,09	37,02	39,19	40,48
12.	Real Estate	7,56	7,86	8,18	8,55	9,01
13.	Jasa Perusahaan	3,25	3,46	3,61	3,76	3,84
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial	322,21	341,4	346,13	369,72	376,36
15.	Jasa Pendidikan	54,13	57,54	60,06	63,51	64,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,62	56,92	61,56	66,77	68,44
17.	Jasa lainnya	28,56	30,49	32,13	34,21	35,47
	Produk Regional Domestik Bruto	1.966,86	2.047,51	2.127,49	2.203,64	2.280,48

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026



Grafik 2. 5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.3 Pendapatan Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun lima tahun terakhir (2021-2025), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selalu mengalami perubahan, dimana pada tahun 2025 mencapai 25,2 juta rupiah atau meningkat sebesar 120 ribu rupiah dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga terus mengalami peningkatan pada periode 2021-2025 dengan puncaknya adalah pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,40 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2025 hanya mencapai nilai 1,87 persen. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025

Kategori	2021	2022	2023	2024*	2025**
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	3.177,71	3.638,14	3.509,31	3.683,51	3.773,40
PPDRB ADHK 2010 (Milliar Rupiah)	1.966,86	2.047,51	2.127,49	2.203,64	2.280,48
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)					
ADHB (Ribu Rupiah)	22.669	25.530	24.233	25.034	25.244
ADHK 2010 (Ribu Rupiah)	14.031	14.368	14.691	14.977	15.257



Kategori	2021	2022	2023	2024*	2025**
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)	-0,6	2,4	2,25	1,95	1,87
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	140.271	143.438	144.818	147.139	149.475
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	2,22	1,66	1,01	1,02	1,02

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga pada satu atau beberapa jenis barang saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Selain itu, kenaikan harga yang bersifat sementara, misalnya menjelang hari raya, juga tidak dapat disebut sebagai inflasi. Peningkatan harga barang dan jasa tersebut pada satu sisi mencerminkan terjadinya penurunan nilai uang pada sisi lainnya.

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Maluku sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,89. Inflasi (y-on-y) tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 3,78 persen dengan IHK sebesar 109,55 dan terendah terjadi di Kota Tual sebesar 1,36 persen dengan IHK sebesar 108,21.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,16 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,29 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,37 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,60 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Maluku bulan April 2025 sebesar 0,09 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,84 persen. (Sumber Data : Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku “Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Maluku April 2025”).

2.1.5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat sejalan dengan keberagaman aset



yang dimiliki. Semakin sejahtera masyarakat maka semakin banyak juga jenis aset yang dikuasai. Kepemilikan aset dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aset fasilitas rumah

tangga serta aset transportasi. Aset fasilitas rumah tangga terdiri dari lemari es/kulkas, AC, pemanas air, televisi layar datar (minimal 30 inci), tabung gas, dan telepon rumah. Aset transportasi terdiri dari sepeda motor, perahu, perahu motor, dan mobil.

Tabel 2. 6 Persentase Rumah Tangga Menurut Aset

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga
Aset Fasilitas Rumah Tangga	31.39 %
Aset Transportasi	63.01 %

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Pada tahun 2025, rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai aset fasilitas rumah tangga sebesar 31,39 persen. Di sisi lain, persentase rumah tangga yang memiliki aset transportasi sebesar 63,01 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat 36,99 persen rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih belum menguasai aset transportasi, minimal sepeda motor.

2.1.5.1 Distribusi Pendapatan

Gini rasio/Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Seram Bagian Timur, Koefisien Gini Kabupaten Seram Bagian Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Koefisien Gini pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,266, pada tahun 2023 mencapai 0,242 dan pada tahun 2024 sebesar 0,244. Upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Koefisien Gini di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; dan lapangan usaha konstruksi.

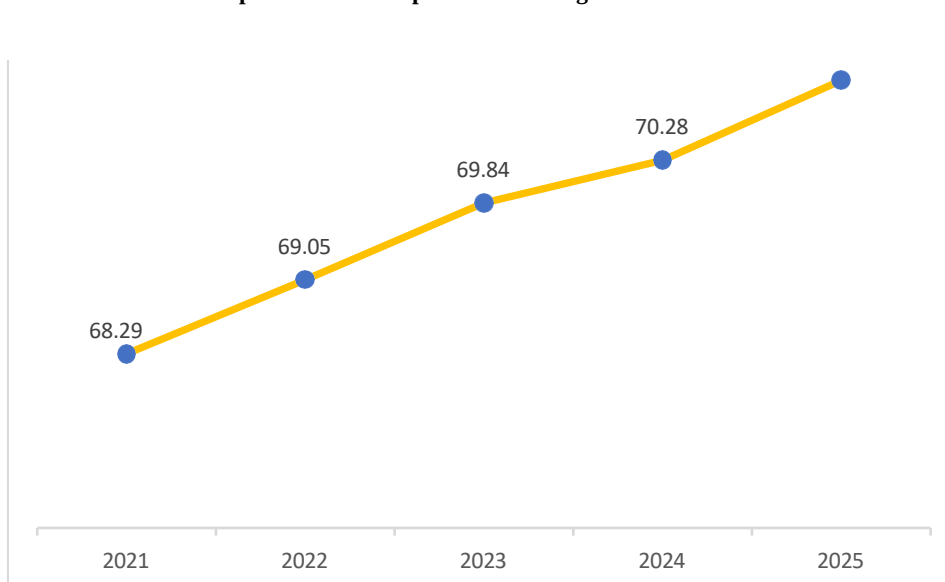
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.6.1 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata - rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Angka-angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 – 2025, sebagaimana terdapat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 6 Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa, Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 berada pada indeks 71,1.

2.1.6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten Kota

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Tahun 2021–2025, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

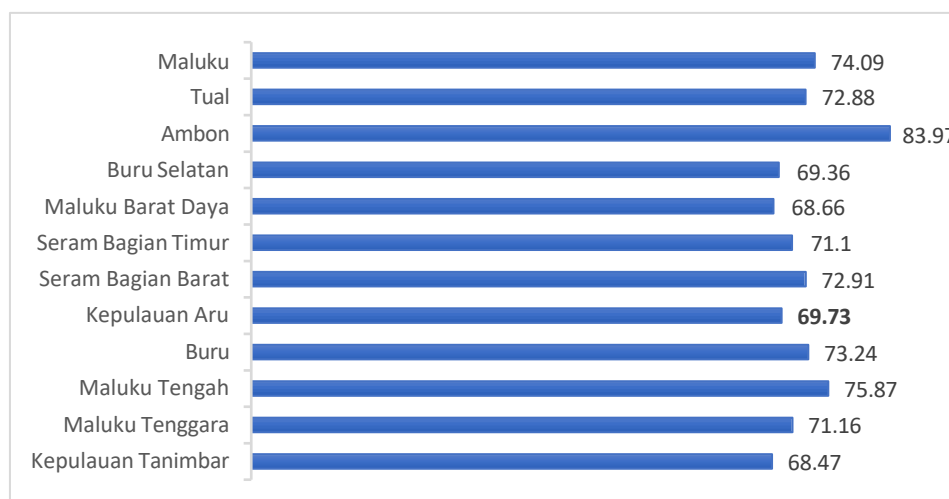


Tabel 2. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	65,85	66,33	67,04	67,69	68,47
Maluku Tenggara	68,69	69,23	69,91	70,58	71,16
Maluku Tengah	73,27	73,73	74,34	75,10	75,87
Buru	70,93	71,52	72,11	72,55	73,24
Kepulauan Aru	66,99	67,36	68,19	69,00	69,73
Seram Bagian Barat	69,90	70,76	71,68	72,54	72,91
Seram Bagian Timur	68,29	69,05	69,84	70,28	71,10
Maluku Barat Daya	65,14	65,84	66,71	67,68	68,66
Buru Selatan	66,25	66,81	67,68	68,54	69,36
Ambon	82,07	82,44	82,84	83,37	83,97
Tual	70,44	70,85	71,67	72,48	72,88
Maluku	71,55	72,04	72,75	73,40	74,09

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Grafik 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Dari tabel dan grafik di atas menggambarkan bahwa, walaupun perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 5 (lima) tahun terakhir kabupaten kota se provinsi maluku terus mengalami kenaikan dan secara menyeluruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada tahun 2025 mencapai, 74,09. Namun secara



kumulatif peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun 2025 berada pada peringkat ke 7 dari 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku yaitu IPM mencapai 71,1.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur ke arah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi.

2.1.7 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan kemampuan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami peningkatan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 mencapai 20,90%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 22,03% atau mengalami penurunan sebesar 0,13%. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2021-2025, sebagaimana perkembangan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

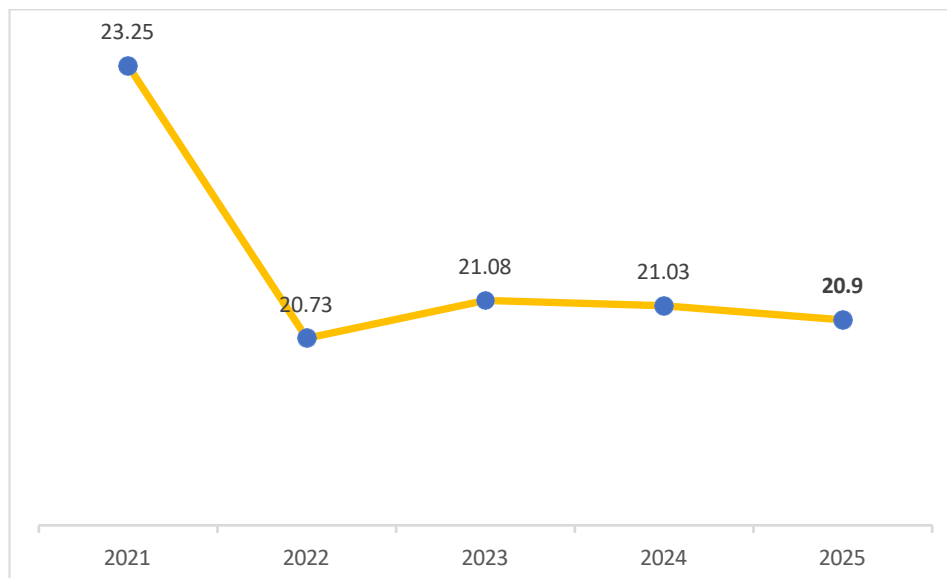
Tabel 2. 8 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	403.573	26.410	23,25%
2022	421.902	23.710	20,73%
2023	458.176	24.260	21,08%
2024	478.721	24.340	21,03%
2025	524.878	24.330	20.90%

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026



Grafik 2. 8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.7.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

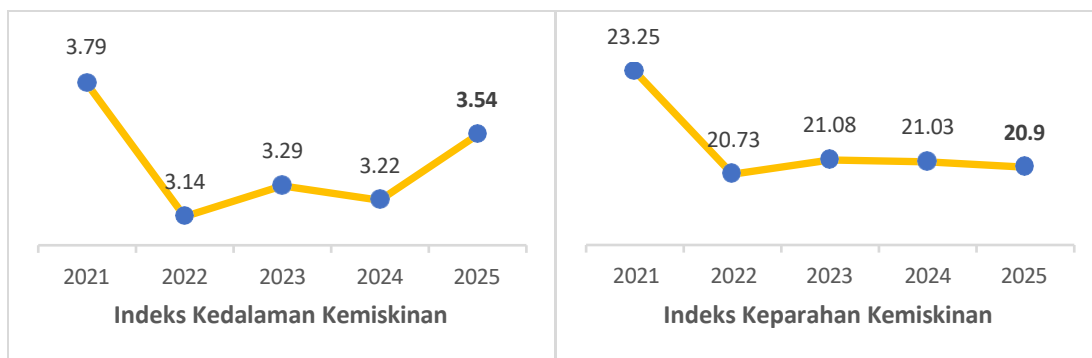
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 - 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	3.79	0.98
2022	3.14	0.70
2023	3.29	0.78
2024	3.22	0.78
2025	3.54	0.91

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Grafik 2. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025



2.1.7.2 Perbandingan Persentase Kemiskinan Antar Kabupaten Kota

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 berada pada urutan keempat yakni sebesar 24,33 ribu, dengan jumlah penduduk sebanyak 149,48 ribu jiwa. Sedangkan persentasi penduduk miskin Antar Kabupaten/Kota Provinsi Maluku tahun 2025, Kabupaten Seram Bagian Timur mencapai 8,45%.

Jika dilihat lebih lanjut, penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 8 dan grafik berikut ini.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Ribuan Jiwa) 2021-2025

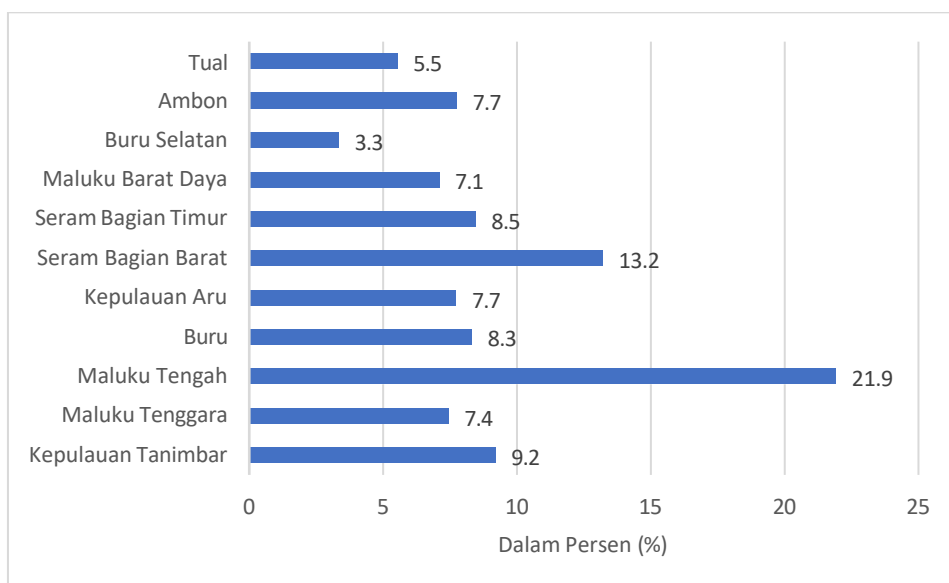
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	30,7	26,94	27,64	26,76	26,46
Maluku Tenggara	22,89	21,38	22,02	21,47	21,42
Maluku Tengah	74,59	65,73	67,22	66,65	63,05
Buru	25,23	23,6	25,19	25,02	23,95
Kepulauan Aru	25,11	22,36	23,13	22,45	22,25
Seram Bagian Barat	43,72	38,57	38,87	38,78	38,01
Seram Bagian Timur	26,41	23,71	24,26	24,34	24,33
Maluku Barat Daya	21,74	20,36	21,23	20,63	20,43
Buru Selatan	9,99	9,35	9,77	9,61	9,63
Ambon	23,67	22,58	25,87	25,81	22,3
Tual	17,76	16,01	16,41	16,17	15,94



Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Maluku	321,81	290,57	301,61	297,69	287,77

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Grafik 2. 10 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2025



Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2026

2.1.8 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.1.8.1 Kependudukan

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan Laju menetap.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka menunjukkan pertambahan yang persentase penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya per kilometer penduduk persegi.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan

Oleh Karena itu berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat sebanyak 144.172 jiwa pada semester II tahun 2025. Dengan proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 72.530 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 71.342 jiwa, yang tersebar di 15 kecamatan (Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026)



2.1.8.2 Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Berdasarkan Data Statistik Kabuapten Seram Bagian Timur jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur di Tahun 2025 sebanyak 134 pendaftar yang terdiri dari 122 pendaftar laki-laki dan 22 pendaftar perempuan.

Menurut pendidikan tertinggi pendaftar yaitu 5 orang pendaftar lulusan SD, 9 orang pendaftar lulusan SMP sederajat, 63 orang pendaftar lulusan SMA/MA, 33 orang pendaftar lulusan SMK, 3 orang pendaftar lulusan Diploma I/II/III, dan 19 orang lulusan Diploma IV/S1/S2/S3.

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur paling banyak ada di bulan Agustus yaitu 35 orang pendaftar dan paling sedikit ada di bulan November dan Desember yaitu 3 orang pendaftar.

Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 tercatat melakukan penerimaan tenaga kerja sebanyak 38 tenaga kerja terdiri dari 35 pendaftar kerja laki-laki dan 3 pendaftar kerja perempuan, penempatan tenaga kerja sebanyak 38 tenaga kerja terdiri dari 35 tenaga kerja laki-laki dan 3 tenaga kerja perempuan, dan penghapusan tenaga kerja sebanyak 12 orang terdiri dari 9 tenaga kerja laki-laki dan 3 tenaga kerja Perempuan (*Sumber :Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026*).

Tabel 2. 11 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0
Sekolah Dasar (SD)	5	0	5
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	0	9
Sekolah Menengah Atas (SMA)	56	8	63
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	29	5	33



Diploma I/II/III/Akademi	1	2	3
Diploma IV/S1/S2/S3	12	7	19
Jumlah	112	22	134

Sumber Data: Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kegiatan selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/Gender		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	40.247	27.161	67.408
1. Bekerja	38.771	26.491	65.262
2. Pengangguran Terbuka	1.476	670	2.146
II. Bukan Angkatan Kerja	15.064	26.450	41.514
1. Sekolah	4.073	5.114	9.217
2. Mengurus Rumah Tangga	7.702	19.560	27.262
3. Lainnya	3.289	1.746	5.035
Jumlah/Total	55.311	53.611	108.922

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.8.2.1 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sedangkan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari



- a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerja Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	12.808	7.812	20.620
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak dibayar	7.683	5.720	13.403
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh Tetap	390	69	459
Buruh/Karyawan/Pegawai	9.446	8.446	17.892
Pekerja Bebas	1.720	256	1.976
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	6.724	4.188	10.912
Jumlah	38.771	26.491	65.262

Sumber. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

2.1.9. Gambaran Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun berdasarkan hasil penginputan data pengukuran bayi dan balita pada aplikasi Sigizi (EPPGBM) tahun 2024 sebanyak 302 orang dengan presentase 3.7 persen dan di tahun 2025 hasil penginputan data pada aplikasi Sigizi terdapat sebanyak 150 warga di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengalami stunting atau dengan presentase sebesar 1.9 persen. (Sumber : Aplikasi Sigizi Kementerian Kesehatan)

2.1.9.1 Dukungan Kebijakan Regulasi Daerah dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung pemerintah Pusat melakukan langkah Percepatan penurunan Angka *Stunting* di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk menetapkan berbagai kebijakan regulasi lokal dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam kurun waktu 2021 - 2025 ini terdapat 413 kebijakan regulasi yang ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 14 Kebijakan Regulasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2025

No.	Deskripsi	Skala	Jumlah	Keterangan
1.	SK Bupati tentang TPPS Kab. SBT	Kabupaten	1	Berlaku
2.	SK Bupati tentang Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kab. SBT	Kabupaten	1	Berlaku
3.	SK Bupati tentang TPPS Kecamatan	Kecamatan	15	Berlaku
4.	SK Bupati tentang Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa.	Desa	198	Berlaku
5.	SK Kepala Desa tentang TPPS Desa	Desa	198	Berlaku
	Jumlah		413	

Sumber: Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Seram Bagian Timur 2025

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, serta dalam konteks sebagai bagian dari perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2005-2025,

Pada Tahun 2025, Daerah akan diperhadapkan dengan sebuah peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seram Bagian Timur tentunya harus dilakukan penyelarasan dengan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat / Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku agar sinergis dalam pencapaian pembangunan. Selain menyelaraskan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2021-2026 dan Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”***.

Pada tahapan tahun ke-empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



(RPJMD) tahun 2021-2026 ini, dan Tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 fokus pembangunan Kabupaten Seram Bagian diarahkan kepada “Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur” yang mengandung

makna peningkatan kualitas disetiap lintas sektor yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif dalam upaya membentuk terciptanya sinergitas program pembangunan dalam menghadapi persaingan serta memastikan perubahan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021- 2026 yang tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber – sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun melalui, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Untuk itu, mekanisme dan upaya strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:



- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan *system* informasi perpajakan/retribusi;
- d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdayasaing ;

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada obyek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak;
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata);
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah



tahun 2025, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka kebijakan perencanaan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang member manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi

- daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, dan asas manfaat.
 3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 4. Belanja Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
 5. Belanja Hibah Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan;
 6. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.



2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa; 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

2.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dapat diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya realisasi pencapaian target kinerja keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut:

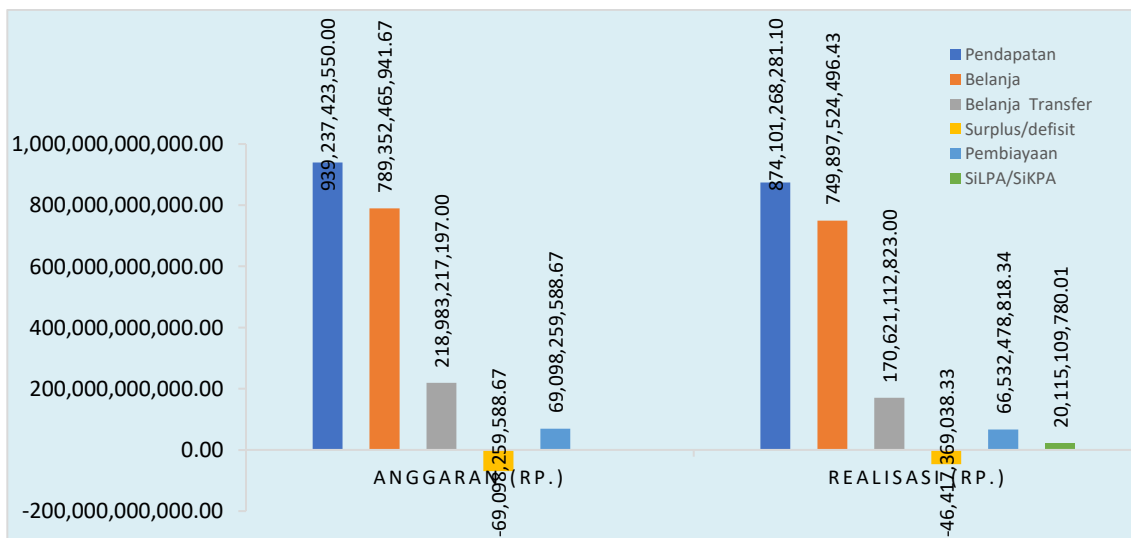
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Ikhtisar pencapaian Realisasi kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, dibandingkan dengan postur Anggaran Tahun 2025 dapat disajikan pada Tabel dan Grafik di bawah ini.

Tabel 3. 1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih /Kurang	%
Pendapatan	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	65.136.155.268,90	93,06
Belanja	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	39.454.941.445,24	95,00
Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	48.362.104.374,00	77,92
Surplus/defisit	-69.098.259.588,67	-46.417.369.038,33	-22.680.890.550,34	67,18
Pembiayaan	69.098.259.588,67	66.532.478.818,34	2.565.780.770,33	96,29
SiLPA/SiKPA		20.115.109.780,01	20.115.109.780,01	0,00

Grafik 3. 1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2025





Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp939.237.423.550,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp874.101.268.281,10 atau terealisasi sebesar 93,06%, Selanjutnya Anggaran Belanja Daerah meliputi :

1. Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp789.352.465.941,67 dapat terealisasi sebesar Rp749.992.912.596,43 atau terealisasi sebesar 92,01%.
2. Anggaran Belanja Transfer ditetapkan sebesar Rp218.983.217.197,00 dapat terealisasi sebesar Rp170.621.112.823,00 atau terealisasi sebesar 77,92%.

Selanjutnya Surplus/Defisit dianggarkan sebesar Rp(69.098.259.588,67) dapat terealisasi sebesar Rp(46.417.369.038,33) atau terealisasi sebesar 67,18%,

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp69.098.259.588,67 dapat terealisasi sebesar Rp66.532.478.818,34 atau terealisasi 96,29%, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp20.115.109.780,01

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp874.101.268.281,10 sebagaimana di atas terdiri dari :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22.689.082.258,10,
2. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp833.105.728.728,00, dan ;
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp18.292.819.295,00,

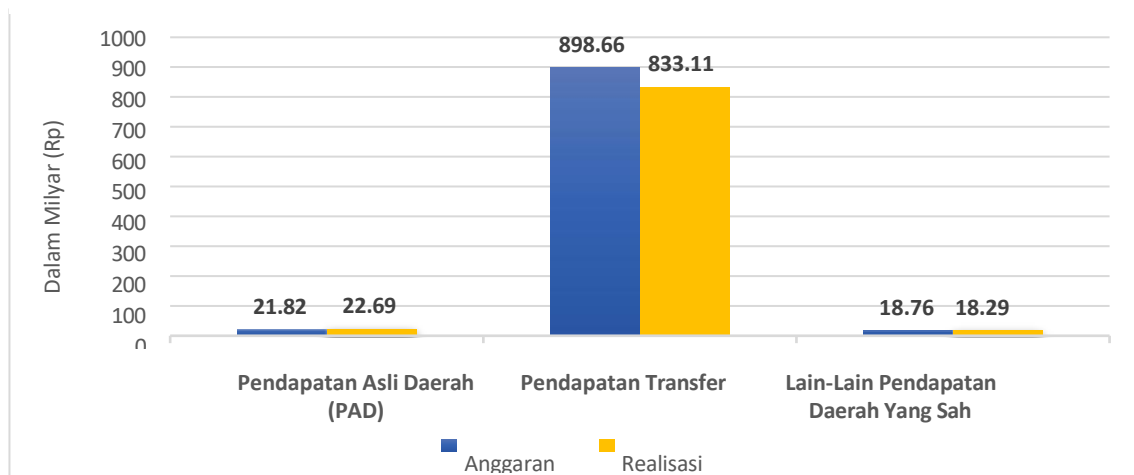
Rincian terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.819.153.697,00	22.702.720.258,10	-883.566.561,10	104,05
Pendapatan Transfer	898.658.739.453,00	833.105.728.728,00	65.553.010.725,00	92,71
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	466.711.105,00	97,51
JUMLAH	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	65.136.155.268,90	93,06



Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2025



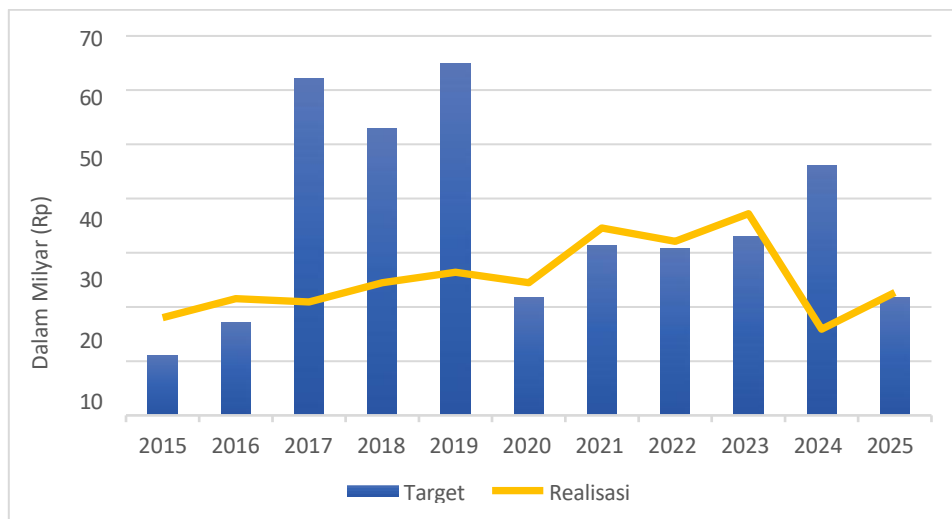
Selanjutnya untuk melihat perkembangan target dan ralisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 11 (sebelas) Tahun terakhir pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, mulai dari TA. 2015 sampai dengan TA. 2025 secara jelas dapat terlihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 3. 3 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Timur dari Tahun Anggaran 2015-2025

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	11.046.418.804,00	18.017.881.707,79
2016	17.114.669.288,00	21.548.344.163,11
2017	62.133.475.935,00	20.910.600.536,07
2018	52.985.960.334,00	24.483.710.263,27
2019	64.935.812.191,00	26.425.725.665,47
2020	21.675.961.040,00	24.461.076.183,69
2021	31.285.895.020,00	34.566.506.573,87
2022	30.786.512.035,00	32.089.143.351,39
2023	33.006.030.948,00	37.209.421.570,22
2024	46.166.701.688,00	15.894.885.394,63
2025	21.819.153.697,00	22.702.720.258,10



Grafik 3. 3 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur dari TA. 2015 -2025



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa, dari tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami fluktuasi, pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 realisasi PAD mengalami penurunan dari anggaran yang ditetapkan karena banyak objek pajak PAD yang macet dan tidak tertagih. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan namun realisasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid- 19 yang melanda dunia, sehingga berpengaruh di semua sektor riil, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2024, realisasi PAD selama 3 tahun berturut turut mengalami fluktuasi, hal ini dikarekan daerah sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber sumber pendapatan daerah pasca pandemi covid 19, kemudian di tahun 2024 realisasi mengalami penurunan drastis dari target yang ditetapkan, Hal ini disebabkan karena banyak objek pajak yang jadi sumber - sumber pendapatan daerah sudah tidak aktif lagi terutama jenis usaha musiman sehingga sangat berpengaruh positif terhadap target dan realisasi PAD tersebut. Selanjutnya Pada tahun 2025 realisasi melampaui target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 103,99% dari anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya peningkatan sumber - sumber PAD, sebagai Objek Pajak Daerah.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2025 sebesar Rp833.105.728.728,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut meliputi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp705.671.188.100,00 atau realisasi mencapai 96,91%, Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar



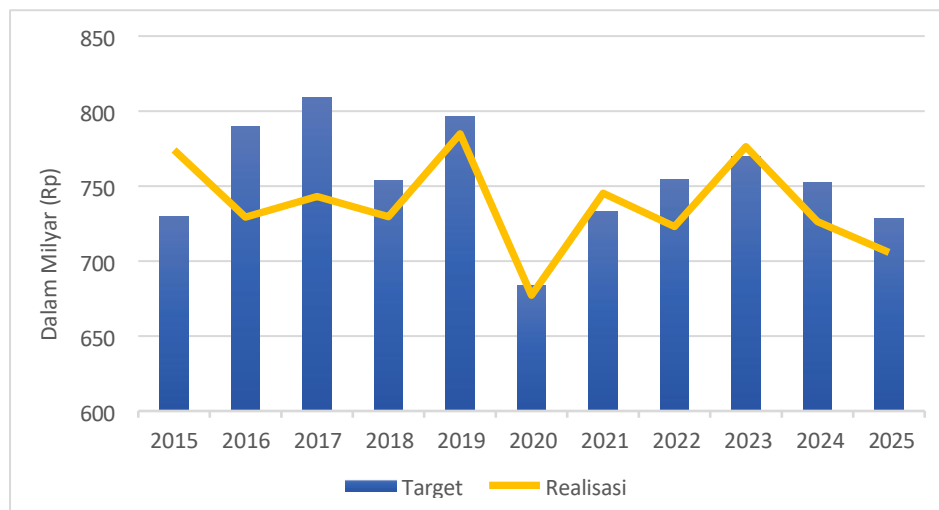
Rp112.365.096.598,00 atau mencapai 71,53%, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp15.069.444.030,00 atau realisasi mencapai 112,35%.

Selanjutnya untuk melihat Perkembangan target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, beberapa tahun terakhir, yakni TA 2015 sampai dengan TA 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini.

Tabel 3. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015-2025

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	729.595.952.000,00	774.034.434.184,93
2016	790.004.514.000,00	729.318.266.826,00
2017	808.722.814.000,00	743.096.482.632,00
2018	753.858.289.000,00	729.612.457.143,00
2019	796.375.405.800,00	784.826.648.960,00
2020	683.410.812.006,00	677.197.142.572,00
2021	732.979.900.000,00	745.232.049.607,00
2022	754.451.348.000,00	722.985.658.730,00
2023	769.545.939.000,00	776.190.247.727,00
2024	752.584.532.930,00	726.296.709.468,00
2025	728.153.469.000,00	705.671.188.100,00

Grafik 3. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2015 – 2025



Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. sedangkan Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp677.197.142.572,00 atau 99,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp683.410.812.006,00. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid – 19 yang melanda dunia ini sehingga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Negara, dan pada tahun 2021 dan 2024 dari sisi target dan realisasi mengalami fluktuasi kondisi ini menggambarkan bahwa secara nasional kita masih dihadapkan dengan masa pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 di semua sektor sehingga berpengaruh terhadap transfer ke Daerah. Dan selanjutnya pada tahun 2024 target dan realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan yakni ditargetkan sebesar Rp752.584.532.930,00 dan terealisasi sebesar Rp726.296.709.468,00 atau dapat terealisasi sebesar 96,51%, hal ini disebabkan karena negara berupaya untuk menstabilkan keuangan negara akibat dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia, Sehingga negara melakukan penyesuaian terhadap terhadap transfer kedaerah. Pada tahun 2025 target dan realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan yaitu ditargetkan sebesar Rp728.153.469.000,00 dan terealisasi sebesar Rp705.671.188.100,00 atau sebesar 96,91% hal ini disebabkan karena terjadi kebijakan pemerintah Pusat terhadap efisiensi anggaran sehingga terjadi pemotongan terhadap semua Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah (TKD).

Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2025 adalah sebesar Rp18.292.819.295,00 atau terealisasi mencapai 97,51%.

Untuk pos Lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat:

1. Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
2. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan
3. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya terkait Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2025, ditetapkan sebesar Rp1.008.335.683.138,67 dan terealisasi sebesar Rp920.614.025.419,43 atau terealisasi sebesar 91,30% dengan rincian terdiri dari :



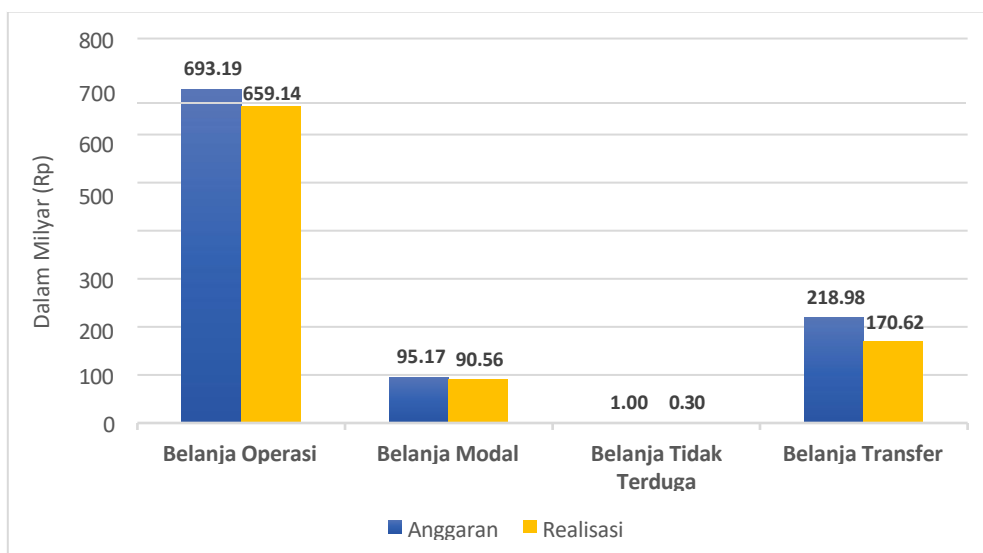
1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp659.039.854.753,19 atau terealisasi sebesar 95,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp693.186.541.495,42;
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp90.557.669.743,24 atau terealisasi sebesar 95,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp95.165.924.446,25;
3. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau terealisasi sebesar 30,00% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp170.621.112.823,00 atau terealisasi sebesar 77,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.983.217.197,00.

Jenis masing - masing belanja sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	693.186.541.495,42	659.039.854.753,19	95,07
Belanja Modal	95.165.924.446,25	90.557.669.743,24	95,16
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	300.000.000,00	30,00
Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92
JUMLAH	1.008.335.683.138,67	920.518.637.319,43	91,29

Grafik 3. 5 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025



Selanjutnya Surplus/Defisit APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp(69.098.259.588,67) dapat terealisasi sebesar Rp(46.417.369.038,33) atau terealisasi sebesar 67,18% atau terjadi Defisit sebesar Rp(46.417.369.038,33).



Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, dianggarkan sebesar Rp69.098.259.588,67 dapat terealisasi sebesar Rp66.532.478.818,34 atau dapat terealisasi sebesar 100%.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan dan tidak terealisasi atau terealisasi sebesar terealisasi sebesar 0,00%

Dengan Demikian berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Surplus/Defisit, dan Realisasi Pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp20.115.109.780,01

3.2 MANDATORY SPENDING

Mandatory Spending adalah belanja atau Pengeluaran Negara/Daerah yang diatur oleh Undang-Undang dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam mendorong kinerja sektor tertentu dengan batasan minimal dan maksimal anggaran belanja yang harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. Oleh karena itu realisasi belanja daerah yang mencakup *Mandatory Spending* pada pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, meliputi :

3.2.1 Belanja Urusan Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional bagian ke empat Pengelolaan dana Pendidikan pasal 49 menegaskan bahwa Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu untuk pemenuhan standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM), sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan APBD Tahun 2025

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	227.379.590.028	244.352.394.636
	1) BELANJA OPERASI	216.766.008.028	232.644.017.080
	a) Belanja Pegawai	212.656.008.028	192.376.519.485



No	Komponen Perhitungan	Jumlah	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
	b) Belanja Barang dan Jasa	14.731.306.00	32.502.915.595
	c) Belanja Hibah	1.950.000.000	5.814.582.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	2.160.000.000	1.950.000.000
	2) BELANJA MODAL	10.613.582.000	11.708.377.556
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	4.102.687.126	3.420.285.152
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	231.482.277.154	247.772.679.788
3	Total Belanja Daerah	979.567.463.400	1.006.654.456.774
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	24%	25%

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Infsatraktur dan program prioritas bidang kesehatan lainnya, maka belanja wajib yang diprioritaskan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam memenuhi mandastory Spending dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1,	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	149.000.000	1.222.000.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000	20.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.240.600.000	628.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	75.000.000	65.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.494.000.000	5.675.081.300
Total			11.978.600.000	7.610.081.300
2,	Literasi dan Numerasi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	200.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.000.000	50.000.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			150.000.000	350.000.000
3,	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	50.000.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	250.000.000
Total			-	300.000.000
4,	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	100.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.299.888.000	1.299.888.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000
Total			1.499.888.000	1.499.888.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			13.628.488.000	9.759.969.300
B SPM Bidang Kesehatan				
1,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	25.000.000
Total			25.000.000	25.000.000
2,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.000.000	135.000.000
Total			150.000.000	135.000.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			175.000.000	160.000.000
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1,	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.727.950.340	10.966.242.390
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	575.100.000
Total			12.727.950.340	11.541.342.390
2,	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	128.600.000	157.128.000
Total			128.600.000	157.128.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			12.856.550.340	11.698.470.390
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1,	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000	100.850.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
	bencana kabupaten/kota			
Total			50.000.000	100.850.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			50.000.000	100.850.000
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1,	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	40.000.000	40.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	25.000.000	25.000.000
Total			65.000.000	65.000.000
2,	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	-	-
Total			300.000.000	300.000.000
3,	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	104.300.000
Total			200.000.000	104.300.000
4,	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-
Total			-	-
5,	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	200.000.000	200.000.000
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	322.500.000	282.500.000
Total			522.500.000	482.500.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.087.500.000	951.800.000
F SPM Bidang Sosial				
1,	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100.400.000	100.400.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
	bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota			
Total			100.400.000	100.400.000
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			100.400.000	100.400.000

3.2.2 Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 72 undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang harus diterima kabupaten/kota dalam bentuk Dana bantuan keuangan dari APBD paling sedikit 10% setelah dikurangi dana DAK, oleh karena itu berdasarkan amanat undang undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menganggarkan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 sebesar Rp61.889.743.197,00 dan terealisasi sebesar Rp58.256.016.225,00 atau terealisasi mencapai 94,12%.

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2025 adalah :

1. Adanya kegiatan yang belum sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat;
2. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
3. Belum Optimalnya pengelolaan potensi pendapatan pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025;
4. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
5. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
6. Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;



7. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodir di sebabkan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
8. Regulasi yang selalu berubah-ubah terkait dengan pengelolaan APBD dari Pusat sampai ke Daerah, sehingga daerah harus menyesuaikan dengan regulasi tersebut.
9. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target OPD;
10. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai; dan
11. Pemahaman terhadap penggunaan sistem aplikasi yng digunakan untuk penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD yang belum optimal dan sangat rendah.

Sedangkan faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem dan prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Peningkatan koordinasi antara OPD pengelola pendapatan asli daerah;
4. Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam proses perencanaan, penganggaran, Penatusahaan dan pelaporannya menggunakan *Sistem Informasi Pemerintah Daerah* (SIPD), walaupun masih perlu untk diperbaharui secara bertahap.



BAB IV

DASAR- DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah. Dasar-Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Pendahuluan

Kerangka Konseptual memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

4.1.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Sedangkan Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2. Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas

dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD

pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4. Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan Tahun Anggaran 2024 adalah Sistem Informasi Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) baik untuk sistem Penganggaran maupun Penatausahaan. Sedangkan dalam hal penyajian laporan keuangan ini, kami hanya bisa menggunakan SIPD untuk Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) saja. Penyajian Neraca, LPSAL, LO, LPE dan Laporan Arus Kas masih disajikan secara manual.

4.2. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan.



4.2.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

- a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;



- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

LRA menyajikan paling sedikit unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan – LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/Defisit – LRA;
- 4) Penerimaan Pembiayaan;
- 5) Pengeluaran Pembiayaan;
- 6) Pembiayaan Netto; dan
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan



6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan paling sedikit pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) piutang;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset Lainnya;
- 8) Kewajiban jangka pendek;
- 9) Kewajiban jangka panjang; dan
- 10) Ekuitas.

Neraca disusun menggunakan basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

d. Laporan Operasional (LO);

Laporan operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

Pendapatan – LO dari kegiatan operasional;

- 1) Beban dari kegiatan operasional;
- 2) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- 3) Kegiatan Non Operasional;

- 4) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 5) Pos luar biasa; dan
 - 6) Surplus/Defisit – LO.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos, antara lain:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. CaLK digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan.'

4.3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang mencakup:



- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan antara lain memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap;
- b. Andal, dengan pengertian informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang meyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
- d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya serta oleh para pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan, antara lain sebagai berikut.

- a. Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
- b. Prinsip nilai historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, maka dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
- c. Prinsip realisasi
Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun fiskal akan dipergunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periodet tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principles*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar atas transaksi serta peristiwa lain yang



seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalnya.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar nilai-nilai pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4. Penyajian Kebijakan – Kebijakan Akuntansi

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO Dan Pendapatan LRA

- a. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi:

Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer—LO, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LO, dan Pendapatan Non Operasional – LO

Pengakuan:

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengukuran:

Berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan—LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat



dikecualikan.

- b. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

Pendapatan Kas yang telah diterima pada RKUD, Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dimana entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan, Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah, Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengukuran:

Berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja Dan Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi:

Beban Operasi, Beban Transferi, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa Pengakuan: Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengukuran:

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah

Klasifikasi:

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Pengakuan:

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran: Akuntansi Belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Klasifikasi:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, Transfer/Bagi hasil ke Desa, Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

Transfer masuk dan Pendapatan Transfer untuk LRA dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sedangkan untuk LO pengakuan masing- masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat diterima kas pada Rekening Kas Umum dan/atau diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/ Peraturan Gubernur terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

Transfer keluar dan Beban Transfer untuk LRA dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar sedangkan untuk LO dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D pada periode berjalan serta pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa. diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengukuran:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer untuk LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk LO diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer untuk LRA diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk LO diukur dan dicatat



sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Klasifikasi:

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran:

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. Dana Bergulir merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Klasifikasi:

Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Netto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan Perubahan SAL.

Pengakuan:

Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta

menutup akun SiLPA/SiKPA. Penyajian

dan Pengungkapan:



Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak disajikan pada lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.

Klasifikasi:

Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah, terdiri dari: Kas di BLUD (kas tunai, kas di bank, pajak belum disetor BLUD, uang muka pasien atau uang titipan), dan Kas di Bendahara BOS yang ada disekolah negeri lingkup Dinas Pendidikan.

Pengakuan:

Pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum daerah. Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

Pengukuran:

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- b. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, serta Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Klasifikasi:

Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Piutang dari perikatan, antara lain Piutang Penjualan Kredit, Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Kemitraan, dan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Pengakuan:

Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengukuran dan Penilaian

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- b. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan :

Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran:

Beban Dibayar Dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Pengungkapan:

Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

Investasi jangka pendek antara lain Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi Jangka Panjang antara lain investasi permanen (Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan Investasi permanen lainnya), serta investasi non permanen (Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, Investasi dalam surat berharga, Investasi dalam proyek pembangunan, Dana bergulir, Deposito jangka panjang dan Investasi non permanen lainnya).

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- 1) Barang Pakai Habis, antara lain Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-Obatan, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan, Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, Natura dan Pakan, Persediaan Penelitian; dan Persediaan Dalam Proses.
- 2) Barang Tak Habis Pakai, antara lain Komponen dan Pipa.
- 3) Barang Bekas Dipakai antara lain Komponen bekas, Pipa bekas, dan Komponen bekas dipakai lainnya

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.



Penilaian:

Metode penilaian persediaan menggunakan Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi Core bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh: alat tulis kantor. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar, dan biaya wajar.

Pencatatan:

Pencatatan Persediaan dilakukan dengan Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO. Kemudian Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dengan pendekatan aset dan pendekatan beban.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Klasifikasi:

Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya, dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan:

Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal dan dipenuhi kriteria Berwujud, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tidak mudah rusak, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran:

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah



jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

- b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat, atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Peralatan dan mesin kapitalisasi atas pemeliharaan (rehabilitasi/renovasi) untuk besaran diatas 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai perolehan akan menambah nilai perolehan.
 - 2) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:
 - a) Gedung dan Bangunan
Belanja Barang dan Jasa mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset, dan Belanja Modal masuk dalam aset tetap mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset.
 - b) Jalan dan sarana lingkungan
Belanja Barang dan Jasa mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset, dan Belanja Modal masuk dalam aset tetap mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset.
 - c) Jembatan
Belanja Barang dan Jasa mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset, dan Belanja Modal masuk dalam aset tetap mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset.
 - d) Pengairan : Bangunan Irigasi dan Drainase
Belanja Barang dan Jasa mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset, dan Belanja Modal masuk dalam aset tetap mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset.
 - 3) Pemeliharaan aset lainnya tidak menambah masa manfaat dan nilai perolehan.
- c. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang masih dalam proses



penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.

- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

- 1) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat jenis aset tetap tersebut.
- 2) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan:

- a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun; dan
 - b) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
 - 4) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intrakomptabel walaupun nilai buku aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau nol.
 - 5) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan dengan pertimbangan tidak mempengaruhi nilai neraca.
 - 6) Penyusutan aset tetap dimulai pada saat tahun perolehan.



Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada Lampiran.

Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal. contoh: masa manfaat awal sebuah gedung adalah 50 tahun. Dilakukan rehabilitasi dengan biaya pemeliharaan 75% dari nilai perolehan yang menyebabkan penambahan masa manfaat 50 tahun. Gedung tersebut telah dimanfaatkan selama 30 tahun. Sisa masa manfaat 20 tahun. Pengakuan masa manfaat baru adalah 50 tahun bukan 70 tahun.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.

Klasifikasi:

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan, Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Penghentian Konstruksi dalam Pengerjaan, Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan kedalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun, apabila



pembangunan KDP dengan sengaja dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran:

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Penyajian:

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan

Pengungkapan:

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi, Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca; Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 2) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- 3) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- 4) Jumlah Retensi. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 5) Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan member gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- 1) Tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah);
- 2) Kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna);
- 3) Aset tidak berwujud (lisensi, hak cipta, hak paten, aset tidak berwujud lainnya); dan
- 4) Aset lain-lain.

- b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan
- c. dengan Pihak ketiga, dan Aset lain-lain.
- d. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi Aset Tak Berwujud dan aset lain-lain

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Klasifikasi:

Dalam neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

- 1) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Contoh kewajiban jangka pendek antara lain: utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja/beban dan utang jangka pendek lainnya
- 2) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Contoh utang jangka panjang antara lain utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka Panjang lainnya.

Pengakuan:

- 1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya;
- 3) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening

Koran PPKD) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan:

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran:

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi

- a. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- b. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
 - 1) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - 2) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- e. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.



- g. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
- h. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
- i. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepadamasyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi dan Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran dan Penilaian:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan



- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pos-pos laporan keuangan yang akan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Struktur Anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, dan Tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 1 Struktur Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih /Kurang	%	Realisasi 2024 (Rp)
A	Pendapatan	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	65.136.155.268,90	93,06	990.361.660.942,18
B	Belanja	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	39.454.941.445,24	95,00	790.941.234.041,36
C	Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	48.362.104.374,00	77,92	223.731.494.442,00
D = A – B – C	Surplus/Defisit	-69.098.259.588,67	-46.417.369.038,33	-22.680.890.550,34	67,18	-24.311.067.541,78
E	Pembiayaan Netto	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	0,00	100,00	93.409.327.130,45
F=D+E	SiLPA/SiKPA	0,00	22.680.890.550,34	-22.680.890.550,34		69.098.259.588,67

Selanjutnya realisasi postur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diatas, terdapat didalamnya jenis pendapatan dan belanja yang pengakuan pengesahannya melalui SP2B, yakni Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana JKN Kapitasi, dan Dana BOK Salur,

1.1.1. PENDAPATAN DAERAH - LRA

Rp874.101.268.281,10

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp874.101.268.281,10 atau dapat terealisasi sebesar 93,06% dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp939.237.423.550,00, Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp990.361.660.942,18



maka realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp116.260.392.661,08 atau turun sebesar 11,73%, dari tahun sebelumnya. penurunan tersebut terdapat pada pendapatan transfer yang mencapai 9,54%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 65,80%, akan tetapi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 42,74%.

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp874.101.268.281,10, terdiri dari Realisasi Pendapatan APBD sebesar Rp812.107.315.816,10 dan Realisasi Pendapatan melalui Pengesahan dan Pengakuan SP2B sebesar Rp61.993.952.465,00, yakni Dana BOS, Dana BOK Salur dan Dana JKN Kapitasi.

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.819.153.697,00	22.702.720.258,10	103,99	15.894.885.394,63
Pendapatan Transfer	898.658.739.453,00	833.105.728.728,00	92,70	920.977.587.040,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	97,51	53.489.188.507,55
Jumlah	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	93,06	990.361.660.942,18

1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA Rp22.702.720.528,10

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.702.720.528,10 atau terealisasi sebesar 103,98%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp21.819.153.697,00 jika dibandingkan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp15.894.885.394,63, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.807.834.863,47 atau naik sebesar 42,83%, dan memberikan kontribusi terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 2,60%. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 3 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Daerah	8.775.163.788,00	7.446.428.527,39	84,85	6.349.520.889,08



Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.341.331.698,00	89,42	1.358.914.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	6.517.696.726,00	6.517.696.726,00	100	4.786.600.370,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	5.026.293.183,00	7.397.263.576,71	146,9	3.399.849.635,55
Jumlah	21.819.153.697,00	22.702.720.528,10	103,98	15.894.885.394,63

Tabel diatas menunjukan bahwa relaisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 53,95% dan memberikan kontribusi terhadap total relaisasi PAD Tahun 2025 sebesar 32,54%.

Jenis Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Rp7.446.428.257,39

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.446.428.257,39 atau dapat terealisasi sebesar 84,85% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.775.163.788,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.349.520.889,08, maka realisasi Pajak daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.096.907.368,31 atau naik sebesar 17,28%. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah tersebut disebabkan karena penetapan target di 2025 disesuaikan dengan objek pajak daerah yang masih aktif dan adanya objek pajak baru. Disisi lain terdapat pelampauan realisasi pada beberapa objek pajak daerah, secara signifikan terutama Pajak Reklame dengan total capaian mencapai 423,05%, sebagaimana Rincian terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. 4 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA.2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pajak Hotel	33.116.000,00	36.940.000,00	111,54	43.284.000,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	57.915.000,00	57.357.600,00	99,03	51.869.850,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.808.632,00	53.839.209,00	93,13	26.269.275,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	82.320.000,00	44.472.557,00	54,02	80.999.250,00



Uraian	Anggaran TA.2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000,00	750.000,00	12,50	0,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	580.000.000,00	347.121.880,00	59,84	710.310.918,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000,00	29.718.000,00	49,53	35.269.900,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Pertandingan Olahraga	6.155.000,00	300.000,00	4,87	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	105.000.000,00	138.316.495,00	131,72	173.906.330,00
Pajak Reklame Kain	15.000.000,00	43.915.250,00	292,76	0,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	1.781.000,00	35,62	0,00
Pajak Reklame Selebaran	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Berjalan	3.000.000,00	562.500,00	18,75	0,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.490.544.965,00	2.757.825.828,00	110,73	2.063.329.712,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.750.000.000,00	1.180.031.666,00	42,91	2.646.771.063,00
PBBP2	475.000.000,00	503.785.848,39	106,06	406.503.841,08
BPHTB-Pemberian Hak Baru	186.484.930,00	187.779.930,00	100,69	111.006.750,00
PBJT-Pondok Wisata	3.036.000,00	1.000.000,00	32,93	0,00
Opsen PKB	1.106.762.414,00	1.290.560.434,00	116,60	0,00
Opsen BBNKB	699.820.847,00	770.370.060,00	110,08	0,00
Jumlah	8.775.163.788,00	7.446.428.257,39	84,85	6.306.236.889,08

Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola Pajak Daerah tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp7.446.428.257,39 atau terealisasi sebesar 84,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.775.163.788,00.

1.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

Rp1.341.331.698,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.341.331.698,00 atau terealisasi sebesar 89,42% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 jika dibandingkan dengan



realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.358.914.500,00 maka realisasi Retribusi daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.582.802,00 atau turun sebesar 1,29%. Akan tetapi ada kenaikan Pendapatan Pajak Retribusi dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung secara signifikan terdapat yang mengalami kenaikan sebesar 469,65% pada sebagaimana dapat terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 5 Rincian Objek Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024(Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	150.000.000,00	56.564.700,00	37,70	75.304.500,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	950.000.000,00	931.157.000,00	98,01	1.078.316.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	116.045.000,00	77,36	87.245.000,00
Retribusi Los	80.000.000,00	31.765.000,00	39,70	27.500.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	95.429.000,00	95,42	71.174.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	70.000.000,00	110.370.998,00	157,67	19.375.000,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.341.331.698,00	89,42	1.358.914.500,00

Selanjutnya realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.341.331.698,00 terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya :

1. Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp56.564.700,00 atau terealisasi sebesar 37,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah - Bula terealisasi sebesar Rp931.157.000,00 atau terealisasi sebesar 98,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp950.000.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp110.370.998,00 atau terealisasi sebesar 157,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000,00
4. Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp116.045.000,00 atau terealisasi sebesar 77,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM terealisasi sebesar Rp31.765.000,00 atau



teralisasi sebesar 39,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00

6. Dinas Pariwisata teralisasi sebesar Rp95.429.000,00 atau teralisasi sebesar 95,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00

1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — LRA

Rp6.517.696.726,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2025 adalah sebesar Rp6.517.696.726,00 atau dapat teralisasi sebesar 100% dari terget yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.786.600.370,00 maka realisasi 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.731.096.356,00 atau 36,17%, yang merupakan pendapatan atas Pembagian Deviden terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Malut.

1.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Rp7.397.263.576,71

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp7.397.263.576,71 atau teralisasi sebesar 147,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.026.293.183,00 jika dibandingkan tahun 2024 teralisasi sebesar Rp3.399.849.635,55 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.997.413.941,16 atau naik sebesar 117,58%. Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang sah terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 6 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Goodwill	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	884.272.414,00	892.438.772,98	100,92	954.403.533,39
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	4.913.130,00	44.596.771,05	907,83	46.546.571,84
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	11.310.440,00	690.343,11	6,10	6.157.018,71
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	76.243.713,00	78.749.750,63	103,28	45.815.969,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.511.779.969,00	4.643.521.594,97	132,23	1.833.921.831,85
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	74.054.612,00	79.054.611,97	106,75	24.285.380,97



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Denda Opsen PKB	11.000.000,00	16.961.437,00	154,19	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	119.769.419,00	1.167.023.416,00	974,39	269.105.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	13.369.333,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	319.949.486,00	443.557.546,00	138,63	217.852.428,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.000.000,00	5.300.000,00	176,66	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.761.901,79
Jumlah	5.026.293.183,00	7.397.263.576,71	147,17	3.399.849.635,55

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Rp833.105.728.728,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 terealisasi sebesar Rp833.105.728.728,00 atau terealisasi mencapai 92,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp898.658.739.453,00 jika dibandingkan tahun 2024 realisasi sebesar Rp920.977.587.040,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp87.871.858.312, 00 atau turun sebesar 9,54%,

Realisasi Pendapatan transfer tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp818.036.284.698,00 atau terealisasi mencapai 92,40%, Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp15.069.444.030,00 atau terealisasi mencapai 121,93%, sebagaimana dapat di



lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5. 7 Rincian Pendapatan Transfer Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	885.246.943.000,00	818.036.284.698,00	92,41	901.402.696.468,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.411.796.453,00	15.069.444.030,00	121,93	19.574.890.572,00
Jumlah	898.658.739.453,00	833.105.728.728,00	92,70	920.977.587.040,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp818.036.284.698,00

Realisasi Pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp818.036.284.698,00 atau terealisasi mencapai 92,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp885.246.943.000,00 jika dibandingkan tahun 2024 realisasi mencapai Rp901.402.696.468,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.625.521.368,00 atau turun sebesar 2.84%, dari tahun 2024.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut di atas terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp705.671.188.100,00 atau terealisasi mencapai 96,91%, Realisasi Dana Desa sebesar Rp112.365.096.598,00 atau terealisasi mencapai 71,53% sedangkan realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar 0,00% sesuai dengan yang dianggarkan, Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5. 8 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan transfer Dana perimbangan	728.153.469.000,00	705.671.188.100,00	96,91	726.296.709.468,00
Pendapatan Transfer Dana Desa	157.093.474.000,00	112.365.096.598,00	71,53	164.054.309.000,00
Pendapatan Transfer Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.051.678.000,00
Jumlah	885.246.943.000,00	818.036.284.698,00	92,41	901.402.696.468,00

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp705.671.188.100,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp705.671.188.100,00 atau terealisasi sebesar 96,91%, dari



target yang dianggarkan sebesar Rp728.153.469.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp726.296.709.468 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.625.521.368,00 atau turun sebesar 2,84 %. Sebagaimana rincian Dana Perimbangan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 9 Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangamn Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran Rp 2025	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.258.447.000,00	24.396.385.556,00	96,58	29.999.363.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	552.293.041.000,00	535.518.624.286,00	96,96	538.829.091.592,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.698.074.000,00	22.116.022.170,00	97,43	44.809.728.325,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	127.903.907.000,00	123.640.156.088,00	96,66	112.658.526.551,00
Jumlah	728.153.469.000,00	705.671.188.100,00	96,51	726.296.709.468,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp24.396.385.556,00

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp24.396.385.556,00 atau realisasi mencapai 96,59% dari target yang di tetapkan sebesar Rp25.258.447.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp29.999.363.000,00 maka realisasi tahun 2054 mengalami penurunan sebesar Rp5.602.977.444,00 atau turun sebesar 18,68% dari tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Rincian Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.689.731.000,00	15.812.781.556,00	107,65	16.131.143.000,00
DBH PPh Pasal 21	2.119.861.000,00	0,00	0,00	1.906.921.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.428.231.000,00	2.593.411.800,00	106,80	3.151.474.850,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	412.952.000,00	382.519.200,00	92,63	395.792.150,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	550.069.000,00	0,00	3.419.268.000,00



Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	550.068.000,00	3.959.215.000,00	719,77	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.959.215.000,00	1.098.389.000,00	27,74	4.994.764.000,00
DBH Sawit	1.098.389.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.258.447.000,00	24.396.385.556,00	96,59	29.999.363.000,00

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp535.518.624.286,00

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp538.829.091.592,00 atau realisasi mencapai 96,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp552.293.041.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp538.829.091.592,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.310.467.306,00 atau turun sebesar 0,61%. Sebagaimana rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 11 Rincian Realisasi Dana Transfer -Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
DAU yang tidak diperuntukan penggunaannya	415.980.765.000,00	447.212.077.650,00	107,51	393.178.957.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.152.224.000,00	15.394.508.636,00	47,88	25.705.881.592,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	62.931.893.000,00	44.052.326.000,00	70,00	56.221.988.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.228.159.000,00	28.859.712.000,00	70,00	36.678.930.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	27.043.335.000,00
Jumlah	552.293.041.000,00	535.518.624.286,00	96,96	538.829.091.592,00

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp22.116.022.170,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 terealisasi sebesar Rp22.116.022.170,00 atau realisasi mencapai 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.698.074.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp44.809.728.325,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.693.706.155,00 atau turun sebesar 50,64%. Sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. 12 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.299.888.000,00	1.230.070.920,00	94,62	460.525.750,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	5.307.450.340,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	8.012.231.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	2.706.463.635,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.558.086.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	3.392.527.653,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	21.227.937.100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	7.095.120.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	62.288.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	13.553.100.000,00	13.208.540.450,00	97,45	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	287.000.000,00	284.830.800,00	99,24	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	3.937.764.347,00	0,00	0,00
Jumlah	22.698.074.000,00	22.116.022.170,00	97,44	44.809.728.325,00

**5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Rp123.640.156.088,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2025 terealisasi sebesar Rp123.640.156.088,00 atau realisasi mencapai 96,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp127.903.907.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp112.658.526.551,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.981.629.537,00 atau naik sebesar 9,75%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 13 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.361.638.000,00	26.356.936.975,00	99,98	24.869.023.700,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.322.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	10.846.009.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru	2.725.000.000,00	839.232.500,00	1,00	1.477.750.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
PNSD				
DAK Non Fisik-TKG PNSD	33.970.727.000,00	37.247.286.671,00	109,65	33.019.027.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	2,00	2.919.919.360,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	3,00	21.329.634.891,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	473.941.000,00	473.941.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	4,00	4.899.673.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.162.500.000,00	1.162.500.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.969.100.000,00	3.850.186.020,00	5,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	35.530.000,00	21.945.000,00	6,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	13.585.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.284.617.000,00	10.057.222.000,00	7,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.856.693.000,00	22.238.702.683,00	89,47	11.949.909.600,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	18.692.261.000,00	16.074.589.239,00	8,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.706.900.000,00	4.639.029.000,00	98,56	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	9,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	127.903.907.000,00	123.640.156.088,00	96,67	112.658.526.551,00

Selanjutnya komponen Realisasi Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp123.640.156.088,00 tersebut diatas terdapat realisasi sebesar Rp63.653.953.465,00 merupakan bagian dari DAK Non Fisik yang di transfer tidak melalui RKUD, namun pengakuan pendapatan dan belanja melalui SP2B, pada BUD/PPKAD diantaranya :

- 1). Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp31.426.592.995,00 yang meliputi :
 - a. Pendapatan Dana BOS TK/PAUD Negeri (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp1.400.139.700,00
 - b. Pendapatan Dana BOS SD Negeri (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp 16.287.493.300,00
 - c. Pendapatan Dana BOS SMP Negeri (Reguler+Kinerja) Sebesar



Rp7.894.001.500,00

d. Pendapatan Dana BOS TK/PAUD Swasta (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp2.471.486.320,000

e. Pendapatan Dana BOS SD Swasta (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp2.359.911.300,00

f. Pendapatan Dana BOS SMP Swasta (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp978.030.875,00

g. Pendapatan Dana BOS Kesetaraan (Reguler+Kinerja) Sebesar Rp35.530.000,00

2). Pendapatan Dana JKN Kesehatan Sebesar Rp8.328.656.787,00

3). Pendapatan Dana BOK Salur Puskesmas Sebesar Rp22.238.702.683,00

5.1.1.2.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Rp112.365.096.598,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 sebesar Rp112.365.096.598,00 atau realisasi mencapai 71,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp157.093.474.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp175.105.987.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.740.890.402,00 atau turun sebesar 35,83%, Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari :

5.1.1.2.1.1 Dana Desa Rp112.365.096.598,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Pendapatan Dana Desa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp112.365.096.598,00 atau realisasi mencapai 71,52% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp157.093.474.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp175.105.987.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.740.890.402,00 atau turun sebesar 35,83%.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Fiskal Rp 0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Intensif Fiskal Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar 0,00% atau tidak dianggarkan, dan tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp11.051.678.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah Rp15.069.444.030,00

Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15.069.444.030,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.411.769.453,00 atau terealisasi sebesar 112,35%, jika



dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.574.890.572,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.505.446.542,00 atau turun sebesar 23,01%. Pendapatan Bagi Hasil tersebut yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Sebagaimana rincian dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 14 Rincian Transfer Antar Pemerintah Daerah, yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	723.890.066,00	0,00	15.074.188.895,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	353.072.918,00	0,00	369.924.016,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.534.021.693,00	2.258.208.143,00	34,56	2.899.577.824,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	13.235.579,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.864.539.181,00	11.734.272.903,00	170,94	1.231.199.837,00
Jumlah	13.411.796.453,00	15.069.444.030,00	112,35	19.574.890.572,00

5.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA Rp18.292.819.295,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.292.819.295,00 atau terealisasi sebesar 97,51%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp18.759.530.400,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp53.489.188.507,55 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp35.196.369.212,55 atau turun 65,80%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut terdiri dari :

5.1.1.4.1 Pendapatan Hibah – LRA Rp0,00

Realisasi Pendapatan Hibah - LRA Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau terealisasi 0,00%, dan tidak dianggarkan. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp31.170.344.000,00, atau sebesar 100,00%.

5.1.1.4.2 Pendapatan Lainnya LRA Rp18.292.819.295,00

Realisasi Pendapatan Lainnya LRA, Tahun 2025 sebesar Rp18.292.819.295,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp18.759.530.400,00 atau dapat terealisasi sebesar 97,51%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun



2024 realisasi sebesar Rp22.318.844.507,55. realisasi pendapatan lainnya tersebut berupa Dana Kapitasi, dan Non kapitasi Kesehatan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 15 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	31.170.344.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	97,51	22.318.844.507,55
JUMLAH	18.759.530.400,00	18.292.819.295,00	97,51	53.489.188.507,55

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana tabel diatas sebesar Rp18.292.819.295,00 dapat meliputi, Realisasi Dana JKN Non Kapitasi pada Puskesmas sebesar Rp8.328.656.787 dan Dana Non Kapitasi pada RSUD Bula sebesar Rp9.964.162.508,00,

Selanjutnya Dana Non Kapitasi pada RSUD Bula sebesar Rp9.964.162.508,00 dapat rincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 16 Rincian realisasi Klem Dana Non Kapitasi Pada RSUD Bula Tahun 2025

No	Tanggal STS	Uraian Penerimaan	Total Penerimaan Klem
1	16/01/2025	Penyetoran Jasa Klaim Jasaraharja RSUD BULA Bulan November & Desember Tahun 2024	24.568.617
2	02/01/1900	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Ambulance) RSUD BULA Bulan September & Oktober Tahun 2024	17.494.200
3	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan November Tahun 2024	603.824.600
4	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Desember Tahun 2024	670.030.200
5	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Kurang Bayar) RSUD BULA Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024	138.019.700
6	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (IFRS) RSUD BULA Bulan Oktober & November Tahun 2024	14.965.321
7	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Ambulance) RSUD BULA Bulan November & Desember Tahun 2024	61.494.200
8	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Januari Tahun 2025	884.054.800
9	15/05/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Ambulance) RSUD BULA Bulan Januari Tahun 2025	18.997.100
10	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (IFRS) RSUD BULA Bulan Desember Tahun 2024	4.704.724
11	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Februari Tahun 2025	941.679.000
12	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Maret Tahun 2025	711.831.100
13	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Kurang Bayar) RSUD BULA Bulan Januari s/d Maret Tahun 2025	88.287.900
14	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan April Tahun 2025	373.181.500
15	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (IFRS) RSUD BULA	13.812.182



No	Tanggal STS	Uraian Penerimaan	Total Penerimaan Klem
		Bulan Januari s/d April Tahun 2025	
16	10/07/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Ambulance) RSUD BULA Bulan Februari s/d Mei Tahun 2025	110.022.400
17	21/08/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Mei Tahun 2025	741.296.000
18	21/08/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Juni Tahun 2025	717.005.900
19	21/08/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Kurang Bayar) RSUD BULA Bulan April & Mei Tahun 2025	68.002.900
20	14/11/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Kurang Bayar) RSUD BULA Bulan Juni Tahun 2025	16.998.300
21	14/11/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Juli Tahun 2025	985.602.600
22	14/11/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (IFRS) RSUD BULA Bulan Mei s/d Juli Tahun 2025	9.807.764
23	14/11/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Ambulance) RSUD BULA Bulan Juni & Juli Tahun 2025	39.441.100
24	17/12/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS Bulan September - Oktober 2025, Jasa BPJS (Kurang Bayar) Agustus 2025 dan Jasa Ambulance Agustus - September 2025	1.821.969.300
25	18/12/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS (Kurang Bayar) RSUD BULA Bulan Juli Tahun 2025	6.319.400
26	18/12/2025	Penyetoran Jasa Klaim BPJS RSUD BULA Bulan Agustus Tahun 2025	872.650.800
Jumlah			9.956.061.608

5.1.2 BELANJA

Rp749.897.524.496,43

Realisasi Belanja sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2025 adalah sebesar Rp749.897.524.496,43 atau terealisasi sebesar 95,00% dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp789.352.465.941,67. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp790.941.234.041,96 maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp41.043.709.545,53 atau turun sebesar 5,18%.

Selanjutnya Realisasi Belanja sebesar Rp749.897.524.496,43 tersebut diatas meliputi :

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp659.039.854.753,19 atau terealisasi mencapai 91,66%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp693.186.541.495,42
2. Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp90.557.669.743,24 atau terealisasi mencapai 95,16%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp95.165.924.446,25
3. Belanja Tak Terduga Terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau terealisasi mencapai 30,00%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selanjutnya Belanja Transfer dapat terealisasi sebesar Rp170.621.112.823,00 atau



terrealisasi mencapai 77,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.983.217.197,00 sedangkan tahun 2024 realisasi sebesar Rp223.731.494.442,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp53.110.381.619,00 atau turun sebesar 23,73%.

Jenis Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 17 Rincian Jenis Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024(Rp)
Belanja Operasi	693.186.541.495,42	659.039.854.753,19	91,66	694.087.144.718,29
Belanja Modal	95.165.924.446,25	90.557.669.743,24	95,15	96.854.089.323,67
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	300.000.000,00	30,00	0,00
Jumlah	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	95,00	790.941.234.041,96
Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00

Realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp749.897.524.496,43 tersebut diatas, didalamnya terdapat realisasi belanja senilai Rp62.231.084.245,42 merupakan realisasi belanja yang tidak melalui SP2D atau pembebanan tidak melalui RKUD, namun Pengakuan dan Pengesahan belanja melalui SP2B yang tersebar pada Jenis Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Selanjutnya Jenis Belanja yang melalui Pengakuan dan Pengesahan SP2B sebesar Rp62.231.084.245,42 tersebut diantaranya :

1. Belanja Dana BOS sebesar Rp30.157.293.378,00, meliputi :
 - a. Belanja BOS TK/PAUD Negeri sebesar Rp1.348.276.800,00
 - b. Belanja BOS SD Negeri sebesar Rp15.901.669.103,00
 - c. Belanja BOS SMP Negeri sebesar Rp7.544.366.000,00
 - d. Belanja BOS TK/PAUD SWASTA sebesar Rp2.141.924.475,00
 - e. Belanja BOS SD SWASTA sebesar Rp2.256.080.000,00
 - f. Belanja BOS SMP Negeri sebesar Rp943.032.000,00
 - g. Belanja BOS KESETRAAN sebesar Rp21.945.000,00
2. Belanja Dana JKN melalui FKTP sebesar Rp8.328.656.787,42
3. Belanja Dana BOK SALUR sebesar Rp23.745.134.080,00

5.1.2.2 Belanja Operasi

Rp659.039.854.753,19

Belanja Operasi selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp659.039.854.753,19 atau terealisasi sebesar 95,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp693.186.541.495,42 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar



Rp694.087.144.718,29 , maka Belanja Operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.047.289.965,10 atau turun sebesar 5,0%. Rincian Belanja Operasi terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 18 Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	399.961.625.110,42	366.337.393.938,00	91,59	361.178.182.517,35
Belanja Barang dan Jasa	255.061.787.685,00	254.106.201.805,59	99,63	264.625.995.409,13
Belanja Subsidi	1.662.150.000,00	1.429.176.604,00	85,98	1.808.641.395,00
Belanja Hibah	23.401.182.000,00	24.140.175.635,00	103,16	55.318.017.543,00
Belanja Bantuan Sosial	13.099.796.700,00	13.026.906.770,60	99,44	11.305.847.786,81
Jumlah	693.186.541.495,42	659.039.854.753,19	95,07	694.236.684.651,29

5.1.2.2.1 Belanja Pegawai

Rp366.337.393.938,00

Belanja Pegawai selama Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp366.337.393.938,00 atau terealisasi sebesar 91,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp399.961.625.110,42 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp361.178.182.517,35 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.159.211.420,65 atau naik sebesar 1,43%.. rincian Belanja Pegawai terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 19 Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	166.261.822.429,00	164.942.888.133,00	99,26	171.550.404.135,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	81.033.952.998,42	59.800.976.499,00	73,52	35.824.095.276,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.991.663.296,00	15.769.610.245,00	98,65	16.406.597.718,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.980.599.202,00	3.677.881.891,00	92,39	2.245.019.398,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.030.245.598,00	4.605.597.990,00	91,74	4.836.049.108,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.313.586.200,00	8.205.429.000,00	98,80	8.685.601.900,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	920.572.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.708.597.750,00	2.613.181.000,00	96,53	2.579.260.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.728.905.440,00	3.571.678.068,00	95,78	1.666.450.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	9.983.340.552,00	9.700.152.060,00	97,21	10.108.456.020,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.178.888.416,00	3.023.860.890,00	95,12	1.846.999.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	185.495.066,00	139.452.790,00	75,17	138.135.764,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.809.072,00	2.583.572,00	21,89	3.012.053,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.698.061,00	1.320.069,00	48,92	746.854,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.168.739.820,00	6.743.540.182,00	94,06	7.021.715.803,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.642.853.645,00	2.393.970.257,00	90,58	1.421.024.781,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	420.628.049,00	340.234.099,00	80,88	350.279.710,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	195.676.319,00	128.086.445,00	65,45	79.288.806,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.097.833.608,00	1.020.667.532,00	92,97	1.052.908.002,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	535.897.625,00	384.248.851,00	71,70	235.425.227,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	305.839.115,00	305.839.115,00	100,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	18.647.019.932,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	157.835.419,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	13.931.440,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	19.234.762.900,00	16.611.801.639,00	86,36	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	43.046.359.848,00	46.320.903.371,00	107,60	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.684.864.000,00	1.281.732.500,00	34,78	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.795.000,00	4.680.000,00	97,60	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	39.014.150,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	2.041.750,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	6.448.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea	0,00	0,00	0,00	4.633.700,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	13.105.437.500,00
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	38.375.696.700,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.101.502.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.413.437.278,35
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	271.300.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	13.090.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	598.770.800,00	578.340.000,00	100,97	640.290.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.080.192,00	62.092.800,00	88,60	75.700.800,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	134.534.400,00	120.120.000,00	89,28	129.360.000,00
Belanja Uang Paket DPRD	57.277.080,00	48.132.000,00	84,03	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	830.517.660,00	814.233.000,00	98,03	928.420.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.943.408,00	69.060.600,00	85,31	76.094.550,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.970.504,00	11.144.700,00	93,10	11.144.700,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.213.000.000,00	3.150.000.000,00	98,03	3.675.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	803.250.000,00	787.500.000,00	98,03	231.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	75.380.000,00	49.298.256,00	65,39	53.967.816,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.202.000,00	1.155.168,00	96,10	1.344.168,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.650.000,00	3.465.504,00	94,94	4.032.504,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.290.000.000,00	4.125.000.000,00	96,15	4.358.750.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.285.400.000,00	4.275.000.000,00	103,80	4.755.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	-	-	192.675.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	121.800.000,00	54.600.000,00	44,82	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.696.138,00	3.864.000,00	21,83	2.940.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	230.430.000,00	98.280.000,00	42,65	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.500.000,00	4.634.880,00	34,33	3.041.640,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	32.135.000,00	529.432,00	1,64	885.095,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000,00	2.120,00	1,06	1.960,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi	11.200.000,00	5.376.000,00	48,00	5.342.400,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
KDH/WKDH				
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	19.000.000,00	112.320,00	0,59	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	22.000.000,00	336.960,00	1,53	336.960,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.800.960,00	184.800.000,00	87,25	168.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	5.707.782.959,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	41.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	399.961.625.110,42	366.337.393.938,00	91,60	361.178.182.517,35

Realisasi Belanja pegawai diatas sebesar Rp366.337.393.938,00, yakni realisasi belanja sebesar Rp312.176.285.528,00 adalah terealisasi melalui SP2D atau pembebanan pada RKUD, sedangkan realisasi sebesar Rp54.161.108.410,00, adalah diransfer langsung ke penerima masing masing pada setker Dinas Pendidikan , diantaranya :

1. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp16.074.589.239,00
2. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp37.247.286.671,00
3. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Sebesar Rp839.232.500,00

Selanjutnya Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada tabel di bawah ini :

5.1.2.2.2 Belanja Barang Jasa

Rp254.106.201.805,59

Belanja Barang dan Jasa selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp254.106.201.805,59 atau terealisasi sebesar 90,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp255.061.787.685,00 jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp264.476.140.376,13 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.369.938.570,54 atau turun sebesar 3,92%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 20 Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	339.790.200,00	337.115.380,00	99,21	397.442.023,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.417.824.880,00	1.410.651.008,00	99,49	952.866.205,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	93.072.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.480.144.000,00	6.448.247.500,00	99,50	5.173.247.200,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	234.400.000,00	233.960.000,00	99,81	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	613.000.000,00	610.915.500,00	99,65	534.610.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	415.294.800,00	413.124.800,00	99,47	62.589.968,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	218.500.000,00	190.983.800,00	87,40	444.128.100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	329.999.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.644.516.453,00	2.602.637.069,00	98,41	2.921.751.081,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	447.792.680,00	339.716.484,00	75,86	337.885.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.298.503.284,00	2.256.020.897,00	92,89	3.219.555.964,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.823.880,00	201.266.920,00	97,31	211.187.020,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	26.734.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	575.456.462,00	567.424.654,00	98,60	719.548.934,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.190.703.400,00	1.155.223.984,00	97,02	777.439.413,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	405.651.080,00	404.055.365,00	99,60	328.804.591,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	488.907.668,00	485.975.768,00	99,40	337.474.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	56.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	193.616.575,00	192.702.655,00	99,52	516.141.253,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	2.629.063.964,00	2.627.947.233,39	99,95	5.434.854.605,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.372.972.326,00	2.372.333.571,00	99,97	2.515.148.152,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	196.099.975,00	195.524.800,00	99,70	0,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-	0,00	0,00	0,00	199.189.500,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
jaga Lainnya				
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.575.258.300,00	5.460.732.650,00	97,94	4.366.766.574,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.527.257.000,00	2.526.882.000,00	99,98	2.072.993.589,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	310.000.000,00	309.990.700,00	99,99	314.648.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	310.880.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	400.000.000,00	396.059.100,00	99,01	445.443.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	68.900.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	73.628.800,00	72.960.000,00	99,09	48.750.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180.000.000,00	177.652.200,00	98,69	272.297.500,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	127.580.000,00	126.207.250,00	98,92	1.017.159.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.440.000,00	11.392.000,00	99,58	77.714.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	59.940.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	50.960.000,00	50.700.000,00	99,48	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.620.000,00	19.620.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	215.000.000,00	214.670.000,00	99,84	169.250.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	83.350.000,00
Belanja Barang Sampel Pangan	10.614.990,00	8.521.000,00	80,27	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	484.000.000,00	482.180.000,00	99,62	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	378.000.000,00	377.030.000,00	99,74	0,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	56.352.300,00	56.352.300,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	150.000.000,00	148.717.800,00	99,14	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.640.000,00	9.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.706.463.635,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.540.000,00	27.540.000,00	100,00	30.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	458.500.000,00	450.401.500,00	98,23	0,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.160.000.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.040.000,00	11.040.000,00	100,00	7.200.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	432.100.000,00	432.100.000,00	100,00	533.278.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.869.135.000,00	1.817.650.000,00	97,24	2.030.540.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.587.610.000,00	1.555.450.000,00	97,97	113.400.000,00
Honorarium Rohaniwan	2.596.000.000,00	2.596.000.000,00	100,00	3.453.600.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	68.350.000,00	68.200.000,00	99,78	240.400.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	165.400.000,00	109.400.000,00	66,14	50.000.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	76.800.000,00	73.800.000,00	96,09	387.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.429.227.000,00	25.180.875.072,00	99,02	34.769.966.902,01
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	51.845.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.605.600,00	5.600.000,00	99,90	2.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.662.000.000,00	3.654.500.000,00	99,79	3.360.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	334.500.000,00	334.500.000,00	100,00	70.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	54.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00	132.600.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	422.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	121.800.000,00	121.800.000,00	100,00	178.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	213.800.000,00	213.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	190.500.000,00	184.500.000,00	96,85	8.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.025.000.000,00	1.009.000.000,00	98,43	394.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.438.900.000,00	2.426.225.500,00	99,48	1.144.760.440,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.176.020.000,00	3.090.510.000,00	97,30	2.433.363.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	779.000.000,00	742.860.000,00	95,36	802.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	54.000.000,00	48.000.000,00	88,88	53.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	333.000.000,00	309.800.000,00	93,03	224.739.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	22.000.000,00	20.500.000,00	93,18	11.300.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	174.740.000,00	174.740.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	78.250.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	735.392.000,00
Belanja Tagihan Listrik	2.764.338.144,00	2.669.230.646,00	96,55	2.300.059.047,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	2.284.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	923.610.000,00	790.130.148,00	85,54	649.945.558,00
Belanja Paket/Pengiriman	168.760.003,00	168.650.003,00	99,93	6.460.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	407.600.000,00	382.523.774,00	93,84	208.079.810,00
Belanja Rekening	0,00	0,00	0,00	252.536.208,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Penerangan Jalan Umum				
Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	606.970.007,00
Belanja Medical Check Up	30.000.000,00	29.360.000,00	97,86	5.386.000,00
Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	4.500.000.000,00	7.697.367.964,58	171,05	0,00
Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	43.220.010,00	43.046.131,00	99,59	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	482.031.000,00	472.311.000,00	97,98	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	59.640.000,00	59.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.634.547.929,00	6.634.547.929,00	100,00	10.954.489.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	32.197.200,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.760.092,00	73.760.092,00	100,00	1.207.240.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	92.199.907,00	92.199.907,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	377.400.000,00	377.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	256.632.000,00	256.632.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	965.720.000,00	965.300.000,00	99,95	396.960.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	858.924.000,00	858.924.000,00	100,00	291.076.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	16.661.600,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	44.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	89.892.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	592.980.000,00	582.130.000,00	98,17	113.032.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	31.500.000,00	29.500.000,00	93,65	62.275.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	60.700.000,00	60.700.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Sumber	0,00	0,00	0,00	500.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Tenaga				
Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	706.000.000,00	706.000.000,00	100,00	780.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	70.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	301.500.000,00	299.200.000,00	99,23	157.620.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	75.000.000,00
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	216.000.000,00	215.900.000,00	99,95	228.000.000,00
Belanja Sewa Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	181.457.250,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	320.798.000,00	318.859.710,00	99,39	189.070.430,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	90.000.000,00	89.577.000,00	99,53	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	892.806.362,00	850.837.200,00	95,29	68.925.010,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	396.827.600,00	396.388.540,00	99,88	94.367.800,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.361.825.000,00	989.042.870,00	72,62	1.974.066.812,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.086.537.500,00	960.754.235,50	46,04	1.280.273.100,88
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.006.827.000,00	947.995.640,00	94,15	699.717.082,50
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	252.190.000,00	228.265.590,00	90,51	152.823.690,00
Belanja Jasa Konsultansi	988.916.200,00	862.665.900,00	87,23	1.741.488.740,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi				
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.174.189.900,00	1.031.636.820,00	87,85	426.528.461,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	492.712.000,00	492.712.000,00	100,00	200.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	114.347.480,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	3.600.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	780.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	61.400.000,00	61.391.667,00	99,98	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	655.400.000,00	655.400.000,00	100,00	639.900.000,00
Belanja Sosialisasi	382.500.000,00	382.200.000,00	99,92	376.400.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	361.199.000,00	361.199.000,00	100,00	105.771.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	284.955.000,00	282.764.250,00	99,23	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	200.000.000,00	197.200.000,00	98,60	140.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.119.976,00	202.465.667,00	80,62	574.226.297,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.044.700.000,00	1.043.315.400,00	99,86	488.095.376,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Bermotor Beroda Dua				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	103.000.000,00	103.000.000,00	100,00	88.731.995,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	28.760.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	782.000.000,00	773.863.000,00	98,95	575.460.160,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	26.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	99.217.372,00	99.217.372,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	8.639.960,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.025.386.000,00	2.897.225.770,00	95,76	1.267.813.425,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	756.744.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	101.400.000,00	96.377.500,00	95,04	134.118.250,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.418.484.300,00	5.900.916.550,00	91,93	4.817.160.620,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.370.218.000,00	2.201.813.100,00	92,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	364.095.100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	307.704.100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	88.468.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	4.784.681.750,00	4.594.571.250,00	96,02	286.129.350,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	9.873.398.618,00	9.873.398.618,00	100,00	24.622.839.931,86
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan	639.003.154,00	633.842.504,12	99,19	412.992.515,88



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Kabupaten				
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	6.729.600,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	0,00	0,00	173.875.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	127.500.000,00	127.110.000,00	99,69	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	77.396.500,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.665.801.956,00	54.480.080.354,00	99,66	59.251.949.801,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	742.980.000,00	742.980.000,00	100,00	498.721.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	109.275.000,00	109.275.000,00	100,00	29.250.000,00
Belanja Beasiswa	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	895.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	20.009.634.054,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	18.661.424.403,00	18.985.782.672,00	101,73	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	401.870.892,00	658.940.000,00	163,96	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	69.400.000,00	1.145.446.300,00	1.650,49	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.530.000,00	21.945.000,00	106,89	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	35.141.259.000,00	33.832.355.271,00	96,27	27.422.693.055,00
Jumlah	255.061.787.685,00	254.106.201.805,59	99,63	264.476.140.376,13

Selanjutnya perlu diketahui bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp254.106.201.805,59 tersebut diatas, didalamnya terdapat realisasi belanja Barang Jasa



APBD atau melalui SP2D atas Pembebanan RKUD sebesar Rp201.841.308.869,01, sedangkan realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp52.254.616.017,00 tidak melalui pembebanan SP2D/RKUD namun melalui pengakuan dan pengesahan SP2B, belanja tersebut meliputi :

1. Belanja Barang Jasa Dana BOS sebesar Rp20.812.113.972,00, meliputi :
 - a. Belanja Barang Jasa TK/PAUD Negeri, BOS Reguler sebesar Rp1.145.446.300,00
 - b. Belanja Barang Jasa SD Negeri, BOS Reguler sebesar Rp12.672.020.382,00
 - c. Belanja Barang Jasa SD Negeri, BOS Kinerja sebesar Rp463.440.000,00
 - d. Belanja Barang Jasa SMP Negeri, BOS Reguler sebesar Rp6.313.762.290,00
 - e. Belanja Barang Jasa SMP Negeri, BOS Kinerja sebesar Rp195.500.000,00, dan
 - f. Belanja Barang Jasa BOS KESETARAAN sebesar Rp21.945.000,00
2. Belanja Barang Jasa BOK SALUR Puskesmas sebesar Rp23.745.134.080,00
3. Belanja Barang Jasa JKN Kapitasi Kesehatan sebesar Rp7.697.367.965,00

5.1.2.2.3 Belanja Subsidi

Rp1.429.176.604,00

Belanja Subsidi selama Tahun 2025 sebesar Rp1.429.176.604,00 atau terealisasi sebesar 85,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.662.1150.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 realisasi sebesar Rp1.808.641.395,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp379.464.791,00 atau turun sebesar 20,95%. Belanja Subsidi dimaksud diberikan kepada Badan Usaha Milik Swasta

Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merealisasikan belanja Subsidi tersebut, diantaranya :

1. Dinas Perhubungan realisasi sebesar sebesar Rp1.274.255.000,00
2. Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp119.921.604,00, dan
3. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp35.000.000,00

5.1.2.2.4 Belanja Hibah

Rp24.140.175.635,00

Belanja Hibah selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp24.140.175.635,00 atau terealisasi sebesar 103,1% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp23.401.182.000,00. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp55.318.332.643,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.178.157.008,00 atau turun sebesar 56,36%.

Sebagaimana rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai Berikut :



Tabel 5. 21 Jenis Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.300.000.000,00	6.268.400.000,00	99,49	36.168.743.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.087.582.000,00	5.962.582.000,00	97,94	3.970.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	297.569.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.557.600.000,00	6.027.600.000,00	91,91	7.965.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	400.000.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.886.000.000,00	5.341.036.475,00	137,44	1.036.177.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	420.000.000,00	390.557.160,00	92,98	379.143.043,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	5.041.200.600,00
Jumlah	23.401.182.000,00	24.140.175.635,00	103,15	55.318.332.643,00

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp24.140.175.635,00 sebagaimana tabel diatas, terdiri dari realisasi Hibah melalui APBD atau atas pembebanan SP2D pada RKUD sebesar Rp18.799.139.160,00 dan realisasi sebesar sebesar Rp5.341.036.475,00 atas Belanja Dana BOS Swasta yang di sajikan dalm pos belanja Hibah melalui pengakuan dan pengesahan SP2B diantaranya :

1. Belanja Hibah TK/PAUD SWASTA BOS Reguler sebesar Rp2.111.924.475,00
2. Belanja Hibah TK/PAUD SWASTA BOS Kinerja sebesar Rp30.000.000,00
3. Belanja Hibah SD SWATA BOS Reguler sebesar Rp2.233.580.000,00
4. Belanja Hibah SD SWATA BOS Kinerja sebesar Rp22.500.000,00
5. Belanja Hibah SMP SWATA BOS Reguler sebesar Rp943.032.000,00

Selanjutnya realisasi Belanja Hibah tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp24.140.175.635,00, antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.853.582.000,00
- 2) Badan KesbangPol sebesar Rp7.320.557.160,00
- 3) Bagian Kesra Setda sebesar Rp8.175.000.000,00
- 4) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp150.000.000,00, dan
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.300.000.000

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Rp 13.026.906.770,60

Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.026.906.770,60 atau dapat terealisasi sebesar 99,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.099.796.700,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.305.847.786,81, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.721.058.983,79 atau naik sebesar 15,22%.

Jenis Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel



sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	195.000.000,00	165.000.000,00	84,62	50.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.780.000.000,00	1.756.969.800,00	98,71	536.515.600,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	142.350.000,00	142.350.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.690.500.000,00	1.688.348.875,60	99,87	1.600.798.490,81
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.416.862.700,00	4.416.860.000,00	100,00	2.990.198.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.875.084.000,00	4.857.378.095,00	99,64	6.128.335.696,00
Jumlah	13.099.796.700,00	13.026.906.770,60	99,44	11.305.847.786,81

Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 diantaranya :

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat – Setda, terealisasi sebesar Rp250.000.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp76.020.000,00
6. Dinas Komunikasi dan Informatika terealisasi sebesar Rp59.850.000,00
7. Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp3.031.360.000,00
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.971.686.300,00
9. Dinas Perikanan sebesar Rp4.266.203.200,00
10. Dinas Pertanian terealisasi sebesar Rp5.606.000,00
11. Dinas Sosial terealisasi sebesar Rp3.240.681.275,60, dan
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp125.499.995,00

5.1.2.3 Belanja Modal

Rp90.557.669.743,24

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2025, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp90.557.669.743,24 atau terealisasi sebesar 95,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp95.165.924.446,25, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp96.854.089.323,67,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar



Rp6.296.419.580,43 atau turun sebesar 6,50%.

Rincian Belanja Modal terdapat pada tabel berikut ini .

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	400.000.000,00	350.000.000,00	87,50	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.011.631.793,25	19.536.887.395,67	97,62	12.830.305.448,39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.303.949.248,00	17.760.981.555,00	87,47	14.813.318.179,85
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.021.531.808,00	51.379.352.361,57	95,10	68.723.365.698,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	428.811.597,00	1.530.448.431	356,90	487.099.997,00
Jumlah	95.165.924.446,25	90.557.669.743,24	95,16	96.854.089.323,67

Selanjutnya total realisasi belanja modal sebagaimana sebesar Rp90.557.669.743,24 diatas, terdiri dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp85.932.237.990,00 adalah teralisasi melalui SP2D atau atas pembebanan RKUD, dan realisasi sebesar Rp4.635.431.753,42 adalah melalui pengakuan dan pengesahan SP2B, (atau belanja yang dilakukan oleh unit pada satker masing -masing atas transfer pusat ke Rekening Masing - masing unit satker) diantaranya :

1. Belanja Modal Dana BOS, TK/PAUD,SD, dan SMP sebesar Rp4.004.142.931,00
2. Belanja Modal JKN Kapitasi Kesehatan sebesar Rp631.188.822,36

5.1.2.3.2 Belanja Modal Tanah

Rp350.000.000,00

Belanja Modal Tanah selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp350.000.000,00, atau terealisasi sebesar 87,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp350.000.000,00 atau naik sebesar 100%. Rincian Jenis realisasi Belanja Modal Tanah selama tahun 2025 terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 24 Rincian BelanjaTanah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	400.000.000,00	350.000.000,00	87,15	0,00

Selanjtnya Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp350.000.000,00 diatas terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang(PUPR)

**5.1.2.3.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin****Rp19.536.887.395,67**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 19.536.887.395,67 atau terealisasi sebesar 97,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp 20.011.631.793,25, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.830.305.448,39, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.706.581.947,28 atau meningkat sebesar 52.27%.

Rincian Jenis realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 25 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	3.276.709.011,00
Belanja Modal Electric Generating Set	595.000.000,00	454.931.350,00	76,45	0,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	121.040.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.179.400.000,00	2.179.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	289.120.000,00	179.194.000,00	61,97	156.520.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.750.000.000,00	3.538.125.000,00	94,35	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	171.780.000,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	119.850,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.455.000.000,00	1.445.990.900,00	99,38	665.492.800,00
Belanja Modal Mebel	2.502.185.250,00	2.483.902.570,00	99,26	298.359.194,00
Belanja Modal Alat Pembersih	44.954.000,00	38.454.000,00	85,54	30.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	578.847.825,00	576.363.783,00	99,57	172.445.800,00
Belanja Modal Alat Dapur	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.544.769.493,50	1.343.263.150,00	86,95	586.662.424,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	63.750.000,00	63.747.855,00	99,99	20.000.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	76.637.500,00	76.447.684,00	99,75	37.460.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	23.715.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	132.726.272,00	132.400.000,00	99,75	27.050.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	36.000.000,00	35.920.000,00	99,77	23.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	61.400.000,00	58.140.000,00	94,69	6.921.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	69.883.750,00	69.882.378,00	99,99	0,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	156.786.537,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	18.645.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	296.119.500,00	291.325.300,00	98,38	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	950.000.000,00	1.080.937.149,42	113,78	741.535.730,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.237.600.000,00	1.230.070.920,00	99,39	0,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	199.100.000,00
Belanja Modal Personal Computer	1.029.002.971,25	1.028.327.584,00	99,93	1.166.616.478,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	327.158.700,00	325.388.050,00	99,45	0,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	222.203.382,50	212.411.392,25	95,59	45.327.835,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	153.735.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	28.085.000,00	28.079.830,00	99,98	0,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	181.678.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	32.190.000,00	32.190.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.937.640,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.268.318.149,00	2.296.606.000,00	101,24	2.218.318.149,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	55.930.000,00	28.500.000,00	50,95	137.150.000,00



Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	17.050.000,00	148.588.500,00	871,48	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.011.631.793,25	19.536.887.395,67	97,63	12.830.305.448,39

Selanjutnya Realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp19.536.887.395,67, terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di APBD atau terealisasi melalui SP2D atas Pembebanan RKUD sebesar Rp16.432.004.073,35, dan
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin melalui pengakuan dan pengesahan SP2B, sebesar Rp 3.104.983.322,42 diantaranya :
 1. Realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana JKN Kapitasi Dinas Kesehatan pada Puskesmas sebesar Rp631.188.822,32;
 2. Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.473.694.500, dengan rincian :
 - a. Belanja belanja Modal Peralatan dan Mesin TK/PAUD Negeri, BOS Reguler sebesar Rp148.588.500,00
 - b. Belanja belanja Modal Peralatan dan Mesin SD Negeri, BOS Reguler sebesar Rp1.716.372.250,00
 - c. Belanja belanja Modal Peralatan dan Mesin SD Negeri, BOS Kinerja sebesar Rp14.000.000,00
 - d. Belanja belanja Modal Peralatan dan Mesin SMP Negeri, BOS Reguler sebesar Rp580.233.750,00
 - e. Belanja belanja Modal Peralatan dan Mesin SMP Negeri, BOS Kinerja sebesar Rp14.500.000,00

5.1.2.3.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp17.760.981.555,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun 2025 sebesar Rp17.760.981.555,00 atau terealisasi sebesar 87,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.303.949.248,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.813.318.179,85 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.947.663.375,15 atau meningkat sebesar 19,89%.

Rincian Jenis realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung selama tahun 2025 terdapat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 5. 26 Rincian Belanja Bangunan dan Gedung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	209.435.800,00	204.340.800,00	97,56	2.107.880.345,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	77.375.850,00	77.375.850,00	100,00	3.517.934.845,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.308.977.138,00	7.021.998.400,00	84,51	1.039.974.600,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	12.227.150,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.787.794.250,00	3.923.703.220,00	81,95	2.034.026.900,50
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	1.234.563.400,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	30.182.960,00	30.182.785,00	99,99	943.991.065,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	44.370.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	313.092.500,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	826.784.390,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Taman	182.000.000,00	172.670.100,00	94,87	99.830.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.446.500,00	14.446.500,00	100,00	0,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	950.000.000,00	878.940.000,00	92,52	800.020.800,00
Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	0,00	17.207.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	274.483.500,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	7.500.000,00
Belanja Modal Pagar	5.493.736.750,00	5.192.304.600,00	94,51	1.492.966.184,35
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	90.000.000,00	85.019.300,00	94,46	46.465.000,00
Jumlah	20.303.949.248,00	17.760.981.555,00	87,48	14.813.318.179,85

2.1.2.3.5 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp51.379.352.361,57

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp51.379.352.361,57 atau terealisasi sebesar 95,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.021.531.808,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 68.723.365.098,43 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.344.013.336,86 atau turun sebesar 25,23%.



Rincian Jenis realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025 terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 27 Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan Kabupaten	3.794.784.541,00	3.700.851.181,00	97,52	26.903.386.789,72
Belanja Modal Jalan Desa	4.735.585.560,00	4.616.369.960,00	97,48	6.954.749.800,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	3.051.106.080,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	77.350.000,00	73.422.650,00	94,92	102.085.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	31.170.344.000,00	29.349.400.104,01	94,15	1.431.099.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	866.775.000,00	840.513.250,00	96,97	6.554.726.550,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.682.027.817,00	1.662.382.416,56	98,83	6.056.082.514,71
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.638.998,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.458.069.500,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	100.250.000,00	99.990.000,00	99,74	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	560.866.500,00	550.535.250,00	98,15	470.601.650,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	141.028.000,00	140.764.000,00	99,81	181.956.100,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	590.000.000,00	584.950.000,00	99,14	112.358.900,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.850.000.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	10.122.520.390,00	9.581.097.250,00	94,65	1.317.044.190,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	180.000.000,00	179.076.300,00	99,48	179.460.626,00
Jumlah	54.021.531.808,00	51.379.352.361,57	95,10	68.723.365.698,43

2.1.2.3.6 Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp1.530.448.431,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 adalah Rp1.530.448.431,00 atau 356,90% dari total yang dianggarkan sebesar



Rp428.811.597,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp487.099.997,00. maka realisasi 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.043.348.434,00 atau naik sebesar 214,19%. Rincian Jenis realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 28 Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	391.612.489,00	1.476.206.431,00	376,95	487.099.997,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	37.199.108,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	54.242.000,00	0,00	0,00
Jumlah	428.811.597,00	1.530.448.431,00	356,90	487.099.997,00

Realisasi Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp1.530.448.431,00 tersebut diatas berasal dari Belanja atas pengakuan dan pengesahan SP2B, yakni belanja Aset lainnya Dana BOS, dengan rincian :

1. Belanja Modal Aset lainnya TK /PAUD Negeri, Dana BOS Reguler sebesar Rp54.242.000,00
2. Belanja Modal Aset lainnya SD Negeri, Dana BOS Reguler sebesar Rp1.030.776.471,00
3. Belanja Modal Aset lainnya SD Negeri, Dana BOS Kinerja sebesar Rp5.060.000,00
4. Belanja Modal Aset lainnya SMP Negeri, Dana BOS Kinerja sebesar Rp440.369.960,00

2.1.2.4 Belanja Tak Terduga

Rp 300.000.000,00

Belanja Tak Terduga selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau terealisasi sebesar 30,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Tak Terduaga sebesar Rp.300.000.000,00 tersebut berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas belanja tidak terduga Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, tana Longsor dan Gelombang pasang di kecamatan teor tahun 2025.

2.1.3 BELANJA TRANSFER

Rp170.621.112.823,00

Belanja Transfer atau Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp170.621.112.823,00 atau dapat terealisasi sebesar 77,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.983.217.197,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp223.731.494.442,00, maka



realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.110.381.619,00 atau turun sebesar 23,73%.

Selanjutnya Belanja Transfer atau Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp170.621.112.823,00 tersebut, terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yakni Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp112.365.096.598,00 atau sebesar 71,52% dari anggaran sebesar Rp157.093.474.000,00. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp164.054.309.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp51.689.212.402,00 atau 31,50%.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) terealisasi sebesar Rp58.256.016.225,00 atau sebesar 94,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61.889.743.197,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp59.677.185.442,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.421.169.217,00 atau turun sebesar 2,38%.

Rincian Belanja Transfer dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 29 Rincian Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	157.093.474.000,00	112.365.096.598,00	71,52	164.054.309.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	61.889.743.197,00	58.256.016.225,00	94,12	59.677.185.442,00
Jumlah	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00

2.1.4 SURPLUS / (DEFISIT)

Rp(46.417.369.038,33)

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 Defisit sebesar Rp(46.417.369.038,33) atau terealisasi 67,18% dari Anggaran Surplus/Defisit yang ditetapkan sebesar Rp(69.098.259.588,67) Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp(24.311.067.514,78) maka terjadi peningkatan sebesar Rp22.215.327.596,55 atau naik sebesar 91,37%. Hal tersebut disebabkan karena Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp874.087.630.281,10 sedangkan Realisasi Belanja Rp749.897.524.496,43 dan Belanja Transfer sebesar Rp170.621.112.823,00, sehingga terjadi dsefist sebesar



Rp46.417.369.038,33, Sebagimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 30 Rincian Surplus/(Defisit) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	93,06	990.361.660.942,18
Belanja	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	92,01	790.941.234.041,36
Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00
Surplus/Defisit	- 69.098.259.588,67	- 46.417.369.038,33	67,18	- 24.311.067.541,18

2.1.5 PEMBIAYAAN

Rp66.532.478.818,34

Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp66.532.478.818,34 atau terealisasi mencapai 96,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.098.259.588,67 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp93.409.327.130,45 maka tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.876.848.312,11 atau turun sebesar 26,87%, Pembiayaan tersebut terdiri dari :

2.1.5.3 Penerimaan Pembiayaan

Rp66.532.478.818,34

Realisasi Penerimaan Pembiayaan selama tahun 2025 sebesar Rp66.532.478.818,34 atau terealisasi sebesar 96,29%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.098.259.588,67 Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp95.854.827.130,45, maka terjadi penurunan sebesar Rp29.322.348.312,11 atau 29,32%. Realisasi tersebut merupakan penggunaan SAL tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp95.854.827.130,45 dikurangi dengan pengeluaran Pembiayaan TA. 2024 sebesar Rp2.445.500.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku - Malut.

2.1.5.4 Pengeluaran Pembiayaan

Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dan tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2024 realisasi sebesar Rp2.445.500.000,00.

2.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) **Rp20.115.109.780,01**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp20.115.109.780,01 jika



dibandingkan tahun 2024 realisasi sebesar Rp69.098.259.588,67.

Selanjutnya SilPA tahun berkenan sebesar Rp20.115.109.780,01 diperoleh dari Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp874.101.268.281,10 dikurangi Belanja sebesar Rp749.897.524.496,43 kemudian dikurangi Belanja Transfer sebesar Rp170.621.112.823,00 menghasilkan Defisit anggaran sebesar Rp46.417.369.038,33. Defisit tersebut kemudian ditutupi/ditambah dengan realisasi pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp66.532.478.818,34. Sebagaimana rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 31 SiLPA Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	939.237.423.550,00	874.101.268.281,10	93,06	990.361.660.942,18
Belanja	789.352.465.941,67	749.897.524.496,43	95	790.941.234.041,36
Belanja Transfer	218.983.217.197,00	170.621.112.823,00	77,92	223.731.494.442,00
Surplus/Defisit	-69.098.259.588,67	-46.417.369.038,33	67,18	-24.311.067.541,18
Pembiayaan Netto	69.098.259.588,67	66.532.478.818,34	96,29	93.409.327.130,45
SiLPA/SiKPA	0,00	20.115.109.780,01	0,00	69.098.259.589,27

Rincian Silpa per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.115.109.780,01 tersebut terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.910.349.056,28
2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp13.918.900,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.824.593,06 (yakni, Kas Tunai sebesar Rp73.002.671,00 + Kas Bank sebesar Rp2.821.922,06)
4. Kas Lainnya selain BUD (Kas Bank pada Dinas Kesehatan) sebesar Rp95.388.100,00
5. Kas Lainnya di Bendahara Dana BOS (Kas Bank) BOS Negeri, Swasta Dan Kesetaraan sebesar Rp73.979.582,67
6. Kas Lainnya, Kas BOK Salur sebesar Rp945.649.548,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni merupakan Akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Selanjutnya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dan 2024 masing-masing pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 32 Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
A	Saldo Anggaran Lebih Awal	69.098.259.588,67	96.802.147.002,45
B	Koreksi Silpa	0,00	0,00
C	Penggunaan SAL Tahun berjalan	66.532.478.818,34	95.854.827.130,45
D = A - B - C	Sub Total 1	2.565.780.770,33	947.319.872,00
E	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	20.041.130.197,34	69.098.259.588,67
F	Lain-Lain Tahun Berjalan	73.979.582,67	0,00
G = D + E + F	Sub Total 2	22.680.890.550,34	69.098.259.588,67
H	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(2.565.780.770,33)	(947.319.872,00)
I = G + H	Saldo Anggaran Lebih Akhir	20.115.109.780,01	69.098.259.588,67

Keterangan :

- 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67 sedangkan tahun 2024 Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp96.802.147.002,45
- 5.2.3 Koreksi Silpa Tahun sebelumnya saebesar Rp0,00
- 5.2.4 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan adalah Saldo Akhir SAL Tahun Sebelumnya Yang telah terkoreksi Sebesar Rp66.532.478.818,34 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp95.854.827.130,45
- 5.2.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2025 sebesar Rp20.041.130.197,34 Merupakan Sisa Leboh (SILPA/SIKPA) yang telah terkoreksi sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67
- 5.2.6 Penggunaan Lain-Lain Tahun 2025 sebesar Rp73.979.582,67 Merupakan Koreksi Sslado Kas Bank Pada Rekening Dana BOS Sekolah Tahun 2025



- 5.2.7 Koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 sebesar Rp(2.565.780.770,33) adalah Kesalahan Pembukuan dana BOS Sekolah sampai dengan Tahun 2025 sedangkan koreksi kesalahan Pembukuan Tahun 2024 sebesar Rp947.319.872,00 yaitu koreksi kurang atas Belanja BOS tahun-tahun sebelumnya yang diakui di Tahun 2024
- 5.2.8 Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.115.109.780,01 dan tahun 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67
- Sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.115.109.780,01 menurun sebesar Rp48.983.149.808,66 atau turun sebesar 70,88% dari Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67, hal ini disebabkan karena adanya penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp69.098.259.588,67, dan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp20.041.130.197,34

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, untuk itu neraca posisi keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 33 Uraian Neraca Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo per 31Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
A	Aset	1.537.911.751.335,00	1.631.717.839.288,64	-93.806.087.953,64	-49,41
B	Kewajiban	2.247.662.570,00	10.152.552.230,29	-7.904.889.660,29	0,00
C	Ekuitas	1.535.664.088.765,00	1.621.565.287.058,35	-85.901.198.293,35	-4,94
D = A - B - C	Jumlah	0,00	0,00	-	0,00

5.3.1 ASET

Rp1.537.911.751.335,00

Saldo Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.537.911.751.335,00 menurun sebesar Rp93.806.087.953,64 atau turun sebesar 49,41% dari Saldo Aset Per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp1.631.717.839.288,64, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5. 34 Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lancar	50.584.957.485,55	100.680.792.128,19	-50.095.834.642,64	-49,76
Investasi Jangka Panjang	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.279.073.814.089,77	1.324.018.946.278,58	-44.945.132.188,81	-3,39
Dana Cadangan	-	-	0,00	0,00
Aset Lainnya	171.914.233.454,68	170.250.980.436,87	1.663.253.017,81	0,98
Properti Investasi	1.789.197.025,00	2.217.571.165,00	-428.374.140,00	-19,32
Jumlah	1.537.911.751.335,00	1.631.717.839.288,64	-93.806.087.953,64	-5,75

5.3.1.1 ASET LANCAR

Rp50.584.957.485,55

Saldo Aset Lancar pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.584.957.485,55 menurun sebesar Rp50.095.834.642,64 atau turun sebesar 49,76%, dari saldo asset lancar per 31 desember 2024 sebesar Rp100.680.792.128,19, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 35 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2025 dan 2024

	Saldo per 31	Saldo per 31	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Desember 2025 (Rp)	Desember 2024 (Rp)		
Kas dan Setara Kas	22.978.341.930,34	69.107.444.455,67	-46.129.102.525,33	-66,75
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	11.737.353.507,64	11.160.185.075,89	577.168.431,75	5,17
Penyisihan Piutang	- 3.394.089.627,85	-2.987.983.522,34	-3.394.089.627,85	113,59
Beban Dibayar Dimuka	104.166.666,67	208.333.333,33	-104.166.666,66	-50,00
Persediaan	19.508.423.369,08	23.192.812.785,63	-3.684.389.416,55	-15,89
Jumlah	50.934.195.845,88	100.680.792.128,19	-49.746.596.282,31	-49,41

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rp20.405.248.520,01

Saldo Kas Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.405.248.520,01 menurun sebesar Rp48.702.195.935,66 atau turun sebesar 70,47% dari saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp69.107.444.455,67. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 36 Rincian Kas dan Setara Kas Lancar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	18.910.349.056,28	64.606.269.284,74	-45.695.920.228,46	-70,73
Kas di Bendahara Penerimaan	13.918.900,00	11.875.000,00	2.043.900,00	17,21



Kas di Bendahara Pengeluaran	75.824.593,06	163.466.476,22	-87.641.883,16	-53,61
Kas Lainnya BOS	73.979.582,67	1.862.766.649,00	-1.788.787.066,33	-96,03
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	95.388.100,00	1.801.233,71	93.586.866,29	5195,71
Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran	290.138.740,00	9.184.867,00	280.953.873,00	3058,88
Kas Lainnya di Bendahara (Selaian PFK) BOK Salur	945.649.548,00	2.452.080.945,00	-1.506.431.397,00	-61,43
Jumlah	20.405.248.520,01	69.107.444.455,67	-48.702.195.935,66	-70,47

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah**Rp18.910.349.056,28**

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.910.349.056,28 menurun sebesar Rp45.695.920.228,46 atau turun sebesar 70,73% dari saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.606.269.284,74. Nilai tersebut merupakan saldo yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 pada Bank Maluku Malut Nomor Rekening 1121000136.

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**Rp13.918.900,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.918.900,00 meningkat sebesar Rp2.043.900,00 atau sebesar 17,21% dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.875.000,00, Saldo tersebut merupakan penerimaan Retribusi Jasa Umum yang belum disetor ke RKUD sampai 31 Desember 2025 yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah - Bula sebesar Rp5.138.000,00, Dinas Kesehatan Rp680.000 yakni Retribusi Jasa pelayanan Puskesmas, dan Penerimaan Non Kapitasi RSUD sebesar Rp8.100.900,00

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**Rp75.824.593,06**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.824.593,06, menurun sebesar Rp87.641.883,16 atau turun sebesar 53,61% dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.466.476,22. Selanjutnya saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.824.593,06 tersebut terdiri dari :

- Sisa kas tunai bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp73.002.671,00,
- Kas pada rekening bank bendahara pengeluaran OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.821.922,06.

Sebagaimana rincian dapat dilihat di tabel berikut ini :



Tabel 5. 37 Rincian Sisa UP, TU dan Kas Bank Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan 2024

OPD	Total Sisa Kas Beng. Pengl. S/D 2024	Kas Bend.Pengl. 2024 Setor 2025	Sisa Kas Bend. Pengl. 2024 Blm Setor	Sisa Kas Bend. Pengl. 2025	Saldo Kas Ben. Pengl. S/D 31 Des 2025	Kas Bank. Ben Peng .2025	Kas Tunai + Kas Bank. Ben Peng .2025
1	2	3	4=1-2	5	6=4+5	7	8=5+7
Dinas Pendidikan;	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	-	146,00
UPTD Diknas Kecamatan Bula	16.000,00	16.000,00	0,00	333,00	333,00	3.000,00	3.333,00
UPTD Diknas Kecamatan Seram Timur	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPTD Diknas Kecamatan Pulau Gorom	16.000,00	16.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Werinama	16.000,00	16.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Tutuk Tolu	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
UPTD Diknas Kecamatan Kesui Watubela	16.000,00	16.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Siwalalat	16.000,00	16.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Kilmuri	16.000,00	16.000,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
UPTD Diknas Kecamatan Bula Barat	16.000,00	16.000,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
UPTD Diknas Kecamatan Gorom Timur	38.900,00	38.900,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Pulau Panjang	38.900,00	38.900,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Teor	-	-	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
UPTD Diknas Kecamatan Teluk Waru	16.000,00	16.000,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
UPTD Diknas Kecamatan Kian Darat	16.000,00	16.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
UPTD Diknas Kecamatan Siritaun Wida Timur	16.000,00	16.000,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
Puskesmas Tamher Timur	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Amarsekaru		-	0,00	0,00	0,00	657,60	657,60
Puskesmas Afang	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Airkasar	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	476,78	476,78
Puskesmas Poling	0,00		0,00	0,00	0,00	455,10	455,10
Puskesmas Teor	0,00		0,00	0,00	0,00	3.086,24	3.086,24
Puskesmas Waru	0,00		0,00	0,00	0,00	875,13	875,13
Rumah Sakit Pratama Goran Riun	0,00		0,00	0,00	0,00	852,62	852,62
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	15.506,07	7.015.506,07
Dinas Lingkungan Hidup	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	199.999,86	199.999,86
Dinas Administrasi	-0,00		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00



OPD	Total Sisa Kas Beng. Pengl. S/D 2024	Kas Bend.Pengl. 2024 Setor 2025	Sisa Kas Bend. Pengl. 2024 Blm Setor	Sisa Kas Bend. Pengl. 2025	Saldo Kas Ben. Pengl. S/D 31 Des 2025	Kas Bank. Ben Peng .2025	Kas Tunai + Kas Bank. Ben Peng .2025
Kependudukan dan Catatan sipil;							
Dinas Sosial	5.557.000,00	5.557.000,00	0,00	0,00	0,00	723.333,43	723.333,43
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.417.000,00	117.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan;	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu pintu;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,81	19.799,81
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas;	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;(dan BTT)	0,00	0,00	0,00	6.027.650,00	6.027.650,00	210.000,00	6.237.650,00
Bagian Protokol dan Komonikasi Pimpinan SETDA	422.200,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Kesra SETDA	-	-	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Bagian OrganisasiSETDA	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD;	2.932.000,00	2.932.000,00	0,00	36.167.107,00	36.167.107,00	570.000,00	36.737.107,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	9.373.736,00	9.373.736,00	0,00	9.373.736,00
Badan Kepegawaian Daerah;	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Kecamatan Tutuk Tolu;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Kecamatan Teor;	0,00	0,00	0,00	13.699.000,00	13.699.000,00	0,00	13.699.000,00
Dinas Ketahanan Pangan;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	35.020,00	35.020,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	66,00	2.766,00
Dinas Komonikasi & Informatika	25.845.000,00	25.845.000,00	0,00	0,00	0,00	310.190,42	310.190,42
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.003,00	200.003,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
JUMLAH	161.368.852,00	161.368.852,00	0,00	73.002.671,00	73.002.671,00	2.821.922,06	75.824.593,06

5.3.1.1.4. Kas Lainnya Kas Dana BOS

Rp73.979.582,67

Saldo Kas Lainnya Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp73.979.582,67 mengalami penurunan sebesar Rp1.788.787.066,33 atau turun sebesar 96,03% dari saldo Kas Lainnya Kas Dan BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.862.766.649.000., Saldo Kas Lainnya Kas Dana BOS merupakan Kas Bank Dana BOS Tahun 2025 terdiri dari:

- Saldo kas Bank Dana BOS Sekolah Dasar (SD) (Reguler+Kinerja) sebesar Rp53.674.260,69
- Saldo kas Bank Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(SMP) (Reguler+Kinerja)



sebesar Rp 20.305.321,98

Tabel 5. 38 Rincian Kas Lain Dana BOS Pada SD, SMP Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Rekening per 31 Desember 2025	Saldo Rekening per 31 Desember 2025
SD NEGERI 1 BULA	743.197,72	0,00
SD NEGERI 2 BULA	196.121,77	0,00
SD NEGERI 3 BULA	54.270,47	0,00
SD NEGERI 4 BULA	374.153,08	0,00
SD NEGERI 5 BULA	202.108,70	0,00
SD NEGERI 6 BULA	1.496.459,36	0,00
SD NEGERI 7 BULA	343.768,35	0,00
SD NEGERI 8 BULA	1.031.331,39	0,00
SD NEGERI 9 BULA	334.548,09	0,00
SD NEGERI 1 BULA BARAT	264.112,97	0,00
SD NEGERI 2 BULA BARAT	202.606,12	0,00
SD NEGERI 3 BULA BARAT	384.498,13	0,00
SD NEGERI 4 BULA BARAT	112.095,06	0,00
SD NEGERI 5 BULA BARAT	167.787,35	0,00
SD NEGERI 6 BULA BARAT	210.819,24	0,00
SD NEGERI 7 BULA BARAT	130.584,28	0,00
SD NEGERI 8 BULA BARAT	559.705,01	0,00
SD NEGERI 9 BULA BARAT	155.447,40	0,00
SD NEGERI 10 BULA BARAT	148.928,72	0,00
SD NEGERI 11 BULA BARAT	1.014.831,21	0,00
SD NEGERI 1 GOROM TIMUR	168.204,25	0,00
SD NEGERI 2 GOROM TIMUR	236.351,97	0,00
SD NEGERI 3 GOROM TIMUR	714.266,92	0,00
SD NEGERI 4 GOROM TIMUR	122.647,74	0,00
SD NEGERI 5 GOROM TIMUR	1.173.229,15	0,00
SD NEGERI 6 GOROM TIMUR	284.711,08	0,00
SD NEGERI 7 GOROM TIMUR	285.721,68	0,00
SD NEGERI 8 GOROM TIMUR	156.428,24	0,00
SD NEGERI 9 GOROM TIMUR	1.280.993,91	0,00
SD NEGERI 1 KIANDARAT	2.023.783,09	0,00
SD NEGERI 2 KIANDARAT	225.332,46	0,00
SD NEGERI 3 KIANDARAT	413.773,92	0,00
SD NEGERI 4 KIANDARAT	3.708.436,72	0,00
SD NEGERI 5 KIANDARAT	68.235,83	0,00
SD NEGERI 1 KILMURY	108.976,10	0,00
SD NEGERI 2 KILMURY	154.500,69	0,00
SD NEGERI 3 KILMURY	204.009,60	0,00
SD NEGERI 4 KILMURY	295.718,03	0,00
SD NEGERI 5 KILMURY	447.767,24	0,00
SD NEGERI 6 KILMURY	239.842,69	0,00
SD NEGERI 7 KILMURY	134.053,46	0,00
SD NEGERI 8 KILMURY	385.250,87	0,00
SD NEGERI 9 KILMURY	366.260,87	0,00
SD NEGERI 10 KILMURY	49.090,33	0,00
SD NEGERI 1 PULAU GOROM	435.287,80	0,00
SD NEGERI 2 PULAU GOROM	315.449,73	0,00
SD NEGERI 3 PULAU GOROM	205.345,54	0,00
SD NEGERI 4 PULAU GOROM	270.468,37	0,00
SD NEGERI 5 PULAU GOROM	163.968,56	0,00
SD NEGERI 6 PULAU GOROM	259.258,28	0,00
SD NEGERI 7 PULAU GOROM	320.999,58	0,00
SD NEGERI 8 PULAU GOROM	371.959,81	0,00
SD NEGERI 9 PULAU GOROM	133.475,77	0,00
SD NEGERI 10 PULAU GOROM	58.957,63	0,00
SD NEGERI 11 PULAU GOROM	149.572,25	0,00
SD NEGERI 12 PULAU GOROM	643.480,98	0,00
SD NEGERI 13 PULAU GOROM	649.491,20	0,00
SD NEGERI 14 PULAU GOROM	216.307,60	0,00



Uraian	Saldo Rekening per 31 Desember 2025	Saldo Rekening per 31 Desember 2025
SD NEGERI 15 PULAU GOROM	5.311,12	0,00
SD NEGERI 16 PULAU GOROM	267.628,80	0,00
SD NEGERI 17 PULAU GOROM	212.407,94	0,00
SD NEGERI 18 PULAU GOROM	158.176,53	0,00
SD NEGERI 19 PULAU GOROM	175.932,03	0,00
SD NEGERI 20 PULAU GOROM	189.468,39	0,00
SD NEGERI 1 PULAU PANJANG	983.048,49	0,00
SD NEGERI 2 PULAU PANJANG	739.102,44	0,00
SD NEGERI 3 PULAU PANJANG	397.661,53	0,00
SD NEGERI 1 SERAM TIMUR	112.184,64	0,00
SD NEGERI 2 SERAM TIMUR	646.421,60	0,00
SD NEGERI 3 SERAM TIMUR	137.239,67	0,00
SD NEGERI 4 SERAM TIMUR	72.890,83	0,00
SD NEGERI 5 SERAM TIMUR	1.108.034,23	0,00
SD NEGERI 6 SERAM TIMUR	1.117.648,83	0,00
SD NEGERI 7 SERAM TIMUR	2.120.043,56	0,00
SD NEGERI 8 SERAM TIMUR	59.698,86	0,00
SD NEGERI 9 SERAM TIMUR	115.868,08	0,00
SD NEGERI 10 SERAM TIMUR	72.764,23	0,00
SD NEGERI 11 SERAM TIMUR	220.546,30	0,00
SD NEGERI 12 SERAM TIMUR	268.233,43	0,00
SD NEGERI 13 SERAM TIMUR	400.185,10	0,00
SD NEGERI 1 SIRITAUN WIDA TIMUR	633.747,70	0,00
SD NEGERI 2 SIRITAUN WIDA TIMUR	262.657,44	0,00
SD NEGERI 3 SIRITAUN WIDA TIMUR	40.608,77	0,00
SD NEGERI 4 SIRITAUN WIDA TIMUR	351.463,29	0,00
SD NEGERI 5 SIRITAUN WIDA TIMUR	658.684,07	0,00
SD NEGERI 6 SIRITAUN WIDA TIMUR	167.125,47	0,00
SD NEGERI 1 SIWALALAT	86.763,51	0,00
SD NEGERI 2 SIWALALAT	131.622,66	0,00
SD NEGERI 3 SIWALALAT	23.624,57	0,00
SD NEGERI 4 SIWALALAT	441.370,97	0,00
SD NEGERI 5 SIWALALAT	876.927,37	0,00
SD NEGERI 6 SIWALALAT	520.500,17	0,00
SD NEGERI 7 SIWALALAT	80.951,83	0,00
SD NEGERI 8 SIWALALAT	193.936,88	0,00
SD NEGERI 1 TELUK WARU	1.033.428,65	0,00
SD NEGERI 2 TELUK WARU	140.294,82	0,00
SD NEGERI 3 TELUK WARU	542.675,74	0,00
SD NEGERI 4 TELUK WARU	724.877,35	0,00
SD NEGERI 5 TELUK WARU	240.635,26	0,00
SD NEGERI 6 TELUK WARU	2.389.891,81	0,00
SD NEGERI 7 TELUK WARU	477.257,50	0,00
SD NEGERI 8 TELUK WARU	145.348,59	0,00
SD NEGERI 1 TUTUK TOLU	443.671,35	0,00
SD NEGERI 2 TUTUK TOLU	179.254,48	0,00
SD NEGERI 3 TUTUK TOLU	272.216,59	0,00
SD NEGERI 4 TUTUK TOLU	346.955,60	0,00
SD NEGERI 5 TUTUK TOLU	322.311,33	0,00
SD NEGERI 1 WAKATE	251.872,66	0,00
SD NEGERI 2 WAKATE	384.218,58	0,00
SD NEGERI 3 WAKATE	551.650,91	0,00
SD NEGERI 4 WAKATE	148.239,68	0,00
SD NEGERI 5 WAKATE	420.488,84	0,00
SD NEGERI 6 WAKATE	187.829,96	0,00
SD NEGERI 7 WAKATE	726.495,25	0,00
SD NEGERI 8 WAKATE	141.333,21	0,00
SD NEGERI 9 WAKATE	207.738,17	0,00
SD NEGERI 10 WAKATE	53.662,83	0,00
SD NEGERI 11 WAKATE	147.294,02	0,00
SD NEGERI 1 TEOR	209.390,72	0,00



Uraian	Saldo Rekening per 31 Desember 2025	Saldo Rekening per 31 Desember 2025
SD NEGERI 1 WERINAMA	264.190,99	0,00
SD NEGERI 2 WERINAMA	174.230,92	0,00
SD NEGERI 3 WERINAMA	479.339,63	0,00
SD NEGERI 4 WERINAMA	193.002,71	0,00
SD NEGERI 5 WERINAMA	795.664,42	0,00
SD NEGERI 6 WERINAMA	284.969,20	0,00
SD NEGERI 7 WERINAMA	291.207,80	0,00
SD NEGERI 8 WERINAMA	242.606,21	0,00
SD NEGERI 9 WERINAMA	141.192,66	0,00
SD NEGERI 10 WERINAMA	499.356,56	0,00
SUB TOTAL	53.674.260,69	0,00
SMP NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR	530.780,67	0,00
SMP NEGERI 24 SERAM BAGIAN TIMUR	523.754,67	0,00
SMP NEGERI 40 SERAM BAGIAN TIMUR	174.469,74	0,00
SMP NEGERI 9 SERAM BAGIAN TIMUR	407.097,97	0,00
SMP NEGERI 37 SERAM BAGIAN TIMUR	165.258,82	0,00
SMP NEGERI 10 SERAM BAGIAN TIMUR	1.000.904,09	0,00
SMP NEGERI 7 SERAM BAGIAN TIMUR	143.149,02	0,00
SMP NEGERI 31 SERAM BAGIAN TIMUR	164.695,26	0,00
SMP NEGERI 44 SERAM BAGIAN TIMUR	149.562,07	0,00
SMP NEGERI 25 SERAM BAGIAN TIMUR	188.899,16	0,00
SMP NEGERI 26 SERAM BAGIAN TIMUR	2.058.664,25	0,00
SMP NEGERI 34 SERAM BAGIAN TIMUR	471.817,99	0,00
SMP NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	132.489,37	0,00
SMP NEGERI 8 SERAM BAGIAN TIMUR	77.688,17	0,00
SMP NEGERI 17 SERAM BAGIAN TIMUR	501.650,79	0,00
SMP NEGERI 23 SERAM BAGIAN TIMUR	117.732,44	0,00
SMP NEGERI 38 SERAM BAGIAN TIMUR	67.242,29	0,00
SMP NEGERI 45 SERAM BAGIAN TIMUR	662.125,32	0,00
SMP NEGERI 47 SERAM BAGIAN TIMUR	211.629,27	0,00
SMP NEGERI 21 SERAM BAGIAN TIMUR	1.354.324,66	0,00
SMP NEGERI 35 SERAM BAGIAN TIMUR	232.172,61	0,00
SMP NEGERI 39 SERAM BAGIAN TIMUR	149.982,42	0,00
SMP NEGERI 48 SERAM BAGIAN TIMUR	310.300,42	0,00
SMP NEGERI 28 SERAM BAGIAN TIMUR	524.017,13	0,00
SMP NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	391.831,56	0,00
SMP NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	87.307,45	0,00
SMP NEGERI 32 SERAM BAGIAN TIMUR	560.937,59	0,00
SMP NEGERI 42 SERAM BAGIAN TIMUR	177.238,98	0,00
SMP NEGERI 11 SERAM BAGIAN TIMUR	657.567,36	0,00
SMP NEGERI 33 SERAM BAGIAN TIMUR	77.472,13	0,00
SMP NEGERI 41 SERAM BAGIAN TIMUR	146.999,34	0,00
SMP NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR	430.666,67	0,00
SMP NEGERI 22 SERAM BAGIAN TIMUR	86.114,10	0,00
SMP NEGERI 43 SERAM BAGIAN TIMUR	986.070,02	0,00
SMP NEGERI 49 SERAM BAGIAN TIMUR	175.278,52	0,00
SMP NEGERI 27 SERAM BAGIAN TIMUR	231.930,56	0,00
SMP NEGERI 29 SERAM BAGIAN TIMUR	157.692,83	0,00
SMP NEGERI 19 SERAM BAGIAN TIMUR	93.462,53	0,00
SMP NEGERI 46 SERAM BAGIAN TIMUR	966.151,76	0,00
SMP NEGERI 15 SERAM BAGIAN TIMUR	1.079.118,37	0,00
SMP NEGERI 30 SERAM BAGIAN TIMUR	173.429,62	0,00
SMP NEGERI 6 SERAM BAGIAN TIMUR	450.400,91	0,00
SMP NEGERI 12 SERAM BAGIAN TIMUR	475.107,70	0,00
SMP NEGERI 13 SERAM BAGIAN TIMUR	404.185,29	0,00
SMP NEGERI 18 SERAM BAGIAN TIMUR	1.101.894,69	0,00
SMP NEGERI 20 SERAM BAGIAN TIMUR	130.843,98	0,00
SMP NEGERI 36 SERAM BAGIAN TIMUR	203.312,69	0,00
SMP NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	696.424,26	0,00
SMP NEGERI 16 SERAM BAGIAN TIMUR	43.474,47	0,00
Sub Total	20.305.321,98	0,00



Uraian	Saldo Rekening per 31 Desember 2025	Saldo Rekening per 31 Desember 2025
JUMLAH	73.979.582,67	0,00

5.3.1.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP**Rp0,00**

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang sama dengan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau belum ada penyajian Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Neraca

5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)**Rp95.388.100,00**

Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.388.100,00 meningkat sebesar Rp93.586.866,29 atau 5195,70%% dari saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.801.233,71

Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebesar Rp95.388.100,00 tersebut, merupakan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan yang masih tercatat pada rekening bank Dinas Kesehatan atas sisa belanja Gaji Pegawai/ASN yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Saldo tersebut diklasifikasikan sebagai kas lainnya karena merupakan sisa kas belanja yang harus disetor kembali ke Kas Daerah, dan sudah di setor ke kas Daerah sebesar Rp95.388.100,00, tanggal 30 April 2026.

5.3.1.1.1.7. Kas Lainnya PFK**Rp290.138.740,00**

Saldo Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran dan PFK Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp290.138.740,00 meningkat sebesar Rp288.266.513,00 atau 3.138,49%% dari saldo Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.184.867,00

Saldo Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran dan PFK Pihak Ketiga sebesar Rp290.138.740,00 merupakan Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025, yang terdiri dari :

- Saldo Kas Lainnya PFK Pihak Ke Tiga sebesar Rp243.711.962,00
- Saldo Kas Lainnya Pajak Gaji/PPh 21 sebesar Rp 6.271.357,00
- Saldo Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran Rp40.138.210,00



Tabel 5. 38 Rincian Kas Lainnya Utang PFK Di Bendahara Pengeluaran pada OPD Tahun 2025

NAMA OPD	SISA PFK BENDAHARA S/D 2024	PFK BENDAHARA 2024 STOR 2025	SISA PFK BENDAHARA 2024	Utang PFK Ben. Pengeluaran Per 31 Desember 2025	PFK Pihak Ke 3(Tiga) Per 31 Des. 2025	PFK Gaji (PPh 21)	PFK Pihak Ke 3 +PPh 21 +PFK Ben Peng. 2025
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	8.090.243,00	4.127.888,00	12.218.131,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	616.750,00	616.750,00	-	-	189.967.252,00	389.806,00	190.357.058,00
Bagian Ekonomi SETDA	14.200,00	14.200,00	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan	3.468.042,00	3.468.042,00	-	-	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	485.875,00	485.875,00	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan dan Kawan Permukiman	-	-	-	-	27.362.202,00	-	27.362.202,00
Dinas Sosial	-	-	-	-	10.118.750,00	-	10.118.750,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	7.458.750,00	-	7.458.750,00
Dinas Pertanian	-	-	-	-	714.765,00	261.484,00	976.249,00
Dinas Kesehatan	-	-	-	7.385.750,00	-	605.502,00	7.991.252,00
Badan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	186.213,00	186.213,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	29.177.058,00	-	172.968,00	29.350.026,00
Dinas Perikanan	-	-	-	3.485.312,00	-	117.879,00	3.603.191,00
Dinas Koperasi	-	-	-	-	-	150.045,00	150.045,00
Dinas Pencatatan Sipil	-	-	-	90.090,00	-	211.617,00	301.707,00
Kecamatan Teor	-	-	-	-	-	16.124,00	16.124,00
Kecamatan Siwalalat	-	-	-	-	-	33.180,00	33.180,00
Kecamatan Werinama	-	-	-	-	-	15.862,00	15.862,00
Jumlah	9.184.867,00	9.184.867,00	-	40.138.210,00	243.711.962,00	6.288.568,00	290.138.740,00

5.3.1.1.1.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain PFK) BOK Salur Rp945.649.548,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain PFK) BOK Salur per 31 Desember 2025 sebesar Rp945.649.548,00 menurun sebesar Rp1.506.431.397,00 atau turun sebesar 61,43% dari saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain PFK) BOK Salur per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.452.080.945,00 dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 39 Kas Lainnya (Kas Bank) BOK SALUR Pada Puskesmas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	Sisa Kas Per 31 Desember 2025	Sisa Kas Per 31 Desember 2024
1	PUSKESMAS BULA	74.683.243,00	24.324.197,00
2	PUSKESMAS PERAWATAN BANGGOI	127.704.360,00	222.450.415,00
3	PUSKESMAS WARU	32.106.500,00	230.080.566,00
4	PUSKESMAS AIRKASAR	51.611.253,00	107.008.178,00
5	PUSKESMAS PERAWATAN KILGA	59.167.735,00	27.918.308,00



No	Nama Puskesmas	Sisa Kas Per 31 Desember 2025	Sisa Kas Per 31 Desember 2024
6	PUSKESMAS PERAWATAN GESER	47.248.500,00	114.100.499,00
7	PUSKESMAS KILMURY	39.397.708,00	144.687.481,00
8	PUSKESMAS AFANG	27.674.208,00	44.586.527,00
9	PUSKESMAS PERAWATAN KATALOKA	13.600.308,00	119.404.553,00
10	PUSKESMAS PERAWATAN AMARSEKARU	37.154.251,00	200.545.048,00
11	PUSKESMAS DAI	21.805.878,00	25.522.676,00
12	PUSKESMAS MIRAN	7.273.287,00	96.927.705,00
13	PUSKESMAS PERAWATAN TAMHER TIMUR	29.833.914,00	181.182.833,00
14	PUSKESMAS TEOR	95.507.870,00	50.993.246,00
15	PUSKESMAS PERAWATAN WERINAMA	14.509.747,00	78.794.500,00
16	PUSKESMAS BATUASA	27.097.212,00	219.442.184,00
17	PUSKESMAS ATIAHU	29.192.605,00	81.743.534,00
18	PUSKESMAS POLIN	38.871.713,00	249.550.137,00
19	Puskesmas Nama	7.307.592,00	42.079.740,00
20	Puskesmas Pulau Panjang	77.295.527,00	5.433.200,00
21	Puskesmas Ukar Sengan	49.005.069,00	97.449.722,00
22	Puskesmas Jakarta Baru	37.601.068,00	87.855.696,00
	Jumlah	945.649.548,00	2.452.080.945,00

5.3.1.2. Piutang**Rp11.737.353.507,64**

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.737.353.507,64, meningkat sebesar Rp577.168.431,75 atau sebesar 5,17% dari saldo piutang per 31 desember 2024 sebesar Rp11.160.185.075,89, dengan rincian piutang sebagai berikut :

Tabel 5. 40 Rincian Piutang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pendapatan Pajak Daerah PAD	6.349.801.079,64	5.602.895.831,89	746.905.247,75	13,33
Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	988.926.186,00	1.014.931.506,00	-26.005.320,00	2,56
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.398.626.242,00	4.542.357.738,00	143.731.496,00	3,16
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.737.353.507,64	11.160.185.075,89	577.168.431,75	5,17

5.3.1.2.1. Piutang Pendapatan Pajak Daerah PAD**Rp6.349.801.079,64**

Saldo Piutang Pajak Daerah PAD per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.349.801.079,64 meningkat sebesar Rp746.905.247,75 atau 13,33% dari saldo Piutang Pajak Daerah PAD per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.602.895.831,89, Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kurang yang mempengaruhi saldo



akhir piutang tahun 2025 sebesar Rp575.742.207,25 yang berasal dari pelunasan piutang tahun 2024, sebagaimana rincian saldo piutang tersebut dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 41 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Tahun	Dasar Penyaluran	Nilai Piutang 2024 (Rp)	Nilai Setoran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Nilai Piutang Tahun 2025 (Rp)
2002	Merupakan Peralihan saldo piutang Pajak PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dari KPP Pratama Ambon berdasarkan Berita Acara Serah terima Surat Keputusan Menteri Keuangan data Piutang PBB-P2 dan Aset sitaan Nomor BA - 17/WPJ.18/KP.01/2014. Tanggal 27 Januari 2014	265.731.998,00	0,00	265.731.998,00
2003		405.156.512,00	0,00	405.156.512,00
2012		247.580.322,00	0,00	247.580.322,00
2013		35.853.000,00	0,00	35.853.000,00
2018	PBB-P2	486.442.757,33	3.350.207,46	483.092.549,87
2019	PBB-P2	375.148.369,14	7.194.589,36	367.953.779,78
2020	PBB-P2	654.394.097,02	14.916.828,28	639.477.268,74
2021	PBB-P2	749.902.311,00	45.245.435,00	704.656.876,00
2022	PBB-P2	748.305.035,00	62.566.323,00	685.738.712,00
2023	PBB-P2	605.176.349,40	90.614.151,66	514.562.197,74
2024	PBB-P2	751.107.588,00	115.346.831,49	635.760.756,51
2025	PBB-P2	0,00	0,00	650.989.321,00
2017	Piutang Pajak Penerangan Jalan	41.589.652,00	0,00	41.589.652,00
2024	Piutang Pajak Penerangan Jalan	236.507.841,00	236.507.841,00	0,00
2025	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	276.191.474,00
2025	Piutang pajak Galian C	0,00	0,00	395.466.660,00
Jumlah		5.602.895.831,89	575.742.207,25	6.349.801.079,64

5.3.1.2.2 Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Rp988.926.186,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp988.926.186,00 menurun sebesar Rp26.005.320,00 atau sebesar 2,56% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.014.931.506,00 Penurunan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut disebabkan adanya pelunasan pada tahun 2025 atas total piutang Gaji sebesar Rp26.005.320,00 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 42 Piutang Denda Keterlambatan pembayaran Pajak PBBP2 Tahun 2017 dan Piutang Pembayaran Gaji atas SKPP Tahun 2024-2025

Tahun	Uraian	Saldo Piutang 2024	Penyetoran TA. 2025	Sisa Piutang 2025
2017	Piutang Denda Keterlambatan Bayar Pajak	421.184.006,00	0,00	421.184.006,00
2023	Taspen Piutang Gaji	515.846.400,00	26.005.320,00	489.841.080,00
2024	Taspen Piutang Gaji	77.901.100,00	0,00	77.901.100,00
Jumlah		1.014.931.506,00	26.005.320,00	988.926.186,00



5.3.1.2.3 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp4.398.626.242,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.398.626.242,00 mengalami penurunan sebesar Rp143.731.496,00 atau turun sebesar 3,16% dari saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.542.357.738,0, sebagaimana rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 43 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak Rokok Triwulan IV 2024	1.165.333.561,00	1.207.186.611,00	-1.207.186.611,00	-3,47
Pitang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB,PAP Triwulan IV 2024	3.225.436.671,00	3.328.358.813,00	-3.328.358.813,00	-3,09
Piutang Transfer Pajak Air Permukaan	7.856.010,00	6.812.314,00	-6.812.314,00	15,32
Piutang TransferPajak Kendaraan bermotor	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.398.626.242,00	4.542.357.738,00	-143.731.496,00	-3,16

Terjadi penurunan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, di tahun 2025 disebabkan karena :

1. Adanya transfer masuk atas Piutang Pajak Rokok Triwulan IV 2024 pada Tahun 2025 sebesar Rp1.207.186.611,00
2. Ttransfer masuk atas Piutang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP Triwulan IV 2024 pada Tahun 2025 sebesar Rp3.328.358.813,00
3. Ttransfer Masuk Piutang Transfer Pajak Air Permukaan Tahun 2024 pada Tahun 2025 sebesar Rp6.812.314,00

5.3.1.2. Penyisihan Piutang Rp(3.394.089.627,85)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.394.089.627,85) meningkat sebesar Rp406.106.105,51 atau 13,59% dari saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp (2.987.983.522,34) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Pajak	-2.923.142.502,85	-2.507.424.766,34	-415.717.736,51	16,58
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-470.947.125,00	-480.558.756,00	9.611.631,00	-2,00
Jumlah	-3.394.089.627,85	-2.987.983.522,34	-406.106.105,51	13,59

Selanjutnya Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Nomor 17 tahun 2024 sehingga diketahui nilai piutang yang dapat direalisasi / Net Realizable Value (NRV) dengan



rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 45 Rincian Nilai Piutang setelah Penyisihan

Uraian	Nilai Piutang 2025 (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang 2025 (Rp)	Net Realizable Value 2025 (Rp)
a	b	c	d = b - c
Piutang Pendapatan Pajak Daerah PAD	6.349.801.079,64	2.923.142.502,85	3.426.658.576,79
Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	988.926.186,00	470.947.125,00	543.984.381,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.338.727.265,64	2.987.983.522,34	3.970.642.957,79

Selanjutnya Penjelasan dari masing-masing penyisihan piutang dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Rp(2.923.142.502,85)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah PAD per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.923.142.502,85 meningkat sebesar Rp 415.717.736,51 atau 16,57% dari saldo Penyisihan Piutang atau Pajak Daerah PAD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.507.424.766,34 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 46 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2025

Tahun	Dasar Penyaluran	Nilai Piutang 2024 (Rp)	Nilai Setoran Tahun 2025 (Rp)	Saldo Nilai Piutang 2025	Umur (Thn)	Kualitas	Penyisihan (%)	Penyisihan 2025 (Rp)
2002	terupakan Peralihan	265.731.998,00	0,00	265.731.998,00	23	macet	100%	265.731.998,00
2003	Saldo piutang Pajak	405.156.512,00	0,00	405.156.512,00	22	macet	100%	405.156.512,00
2012	BB-P2 kepada Pemerintah	247.580.322,00	0,00	247.580.322,00	13	macet	100%	247.580.322,00
2013	abupaten Seram bagian Timur dari PP Pratama Ambon berdasarkan Berita cara Serah terima surat Keputusan Menteri Keuangan ta Piutang PBB-P2 in Aset sitaan nomor BA - 7/WPJ.18/KP.01/201 Tanggal 27 Januari 2014	35.853.000,00	0,00	35.853.000,00	12	macet	100%	35.853.000,00
2018	BB-P2	486.442.757,33	3.350.207,46	483.092.549,87	7	macet	100%	483.092.549,87
2019	BB-P2	375.148.369,14	7.194.589,36	367.953.779,78	6	macet	100%	367.953.779,78
2020	BB-P2	654.394.097,02	14.916.828,28	639.477.268,74	5	ragukan	50%	319.738.634,37
2021	BB-P2	749.902.311,00	45.245.435,00	704.656.876,00	4	ragukan	50%	352.328.438,00
2022	BB-P2	748.305.035,00	62.566.323,00	685.738.712,00	3	ragukan	50%	342.869.356,00
2023	BB-P2	605.176.349,40	90.614.151,66	514.562.197,74	2	kurang lancar	10%	51.456.219,77
2024	BB-P2	751.107.588,00	115.346.831,49	635.760.756,51	1	lancar	1%	3.178.803,78
2025	BB-P2	0,00	0,00	650.989.321,00	0	Lancar	1%	3.254.946,61
2017	utang Pajak merangan Jalan	41.589.652,00	0,00	41.589.652,00	8	macet	100%	41.589.652,00
2024	utang Pajak merangan Jalan	236.507.841,00	236.507.841,00	0,00	1	Lancar	1%	0,00
2025	utang Pajak merangan Jalan	0,00	0,00	276.191.474,00	0	Lancar	1%	1.380.957,37
2025	utang pajak Galian	0,00	0,00	395.466.660,00	0	Lancar	1%	1.977.333,30



Tahun	Dasar Penyaluran	Nilai Piutang 2024 (Rp)	Nilai Setoran Tahun 2025 (Rp)	Nilai Piutang 2025	Umur (Thn)	Kualitas	Penyisihan (%)	Penyisihan 2025 (Rp)
	Jumlah	5.602.895.831,89	575.742.207,25	6.349.801.079,64				2.923.142.502,85

Atas penyisihan piutang pajak daerah PAD tersebut diatas diketahui nilai piutang yang dapat direalisasi sebesar Rp3.426.658.576,79 (Rp6.349.801.079,64 - Rp2.923.142.502,85).

Penyisihan Piutang sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Nomor 17 tahun 2024, bahwa Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan).

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya dengan kriteria :

- Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

5.3.1.2.2. Penyisihan Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah **Rp(470.947.125,00)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp470.947.125,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.611.631,00 atau turun sebesar 2,00% dari saldo Penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp480.558.756.

Nilai tersebut merupakan Penyisihan Piutang atas Denda keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 Tahun 2016 yang telah disisihkan 100%

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang atas Denda keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 Tahun 2016 sebesar Rp421.184.006,00 yang telah disisihkan 100% karena tidak tertagih, dan Piutang atas pembayaran Kelebihan Gaji berdasarkan SKPP Tahun 2023 dan 2024 yang masing- masing disisihkan tahun 2023 sebesar 10% dan tahun 2024 sebesar 1%. sebagaimana Tabel dibawah ini.



Tabel 5. 47 Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan pembayaran Pajak PBBP2 Tahun 2017 dan Piutang Pembayaran Gaji atas SKPP Tahun 2024-2025

Tahun	Uraian	Saldo Piutang 2024	Penyetoran TA. 2025	Sisa Piutang 2024	Umur (Thn)	Kualitas	Masa Penyisihan	Jumlah Penyisihan
2017	Piutang Denda Keterlambatan Bayar Pajak	421.184.006,00	-	421.184.006,00	7	Macet	100 %	421.184.006,00
2023	Taspen Piutang Gaji	515.846.400,00	26.005.320,00	489.841.080,00	2	Diragukan	10 %	48.984.108,00
2024	Taspen Piutang Gaji	77.901.100,00	-	77.901.100,00	1	Lancar	1%	779.011,00
Jumlah		1.014.931.506,00	26.005.320,00	988.926.186,00				470.947.125,00

Atas penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tersebut diatas diketahui bahwa sisa nilai piutang yang dapat direalisasi sebesar Rp517.979.061,00 (Rp 988.926.186,00 - Rp 470.947.125,00).

Penyisihan terhadap Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi nomor 17 tahun 2024 pemerintah daerah kabupaten seram bagian timur Bab VI tentang kebijakan akuntansi piutang, menyatakan bahwa Piutang PAD lainnya adalah piutang PAD selain piutang pajak dan piutang retribusi, Yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya, Dengan Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

- 1) Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
 - 2) Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3) Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 4) Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;



- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

5.3.1.3 Beban Dibayar Dimuka **Rp104.166.666,67**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 desember 2025 adalah sebesar Rp104.166.666,67 mengalami penurunan sebesar Rp104.166.666,67 atau trun sebesar 50,00% Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 desember 2024 sebesar Rp Rp104.166.666,67. Saldo beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2025 merupakan pembayaran di tahun 2025 dan akan menjadi beban di tahun 2026 atas pembayaran Sewa Kantor Dinas/Kantor pada 10 OPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 48 Rincian Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2025

NO	SKPD	SALDO TAHUN LALU (THN 2025)	NILAI SEWA	NILAI SEWA PERBULAN	JANGKA WAKTU SEWA	JUM LAH BUL AN	NILAI SEWA TAHUN 2025	SISA NILAI SEWA/DIBAY AR DIMUKA	KETERA NGAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	-	-	-	0	-	-	SEWA KANTOR
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	80.000.000,00	6.666.666,67	21/03/2025 s/d 31/12/2025	10	66.666.666,67	13.333.333,33	SEWA KANTOR
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	100.000.000,00	8.333.333,33	13/01/2025 s/d31/12/2025	12	100.000.000,00	-	SEWA KANTOR
4	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	40.000.000,00	3.333.333,33	02/1/2025 s/d 02/01/2026	12	40.000.000,00	-	SEWA KANTOR
5	RSU Pratama Goran Riun	-	48.000.000,00	4.000.000,00	01/01/2025 s/d 03/01/2026	12	48.000.000,00	-	SEWA RUMAH DINAS
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	43.333.333,33	-	-	-	0	-	-	SEWA KANTOR
7	Dinas Lingkungan Hidup	22.500.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	01/04/2025 s/d 01/04/2026	9	67.500.000,00	22.500.000,00	SEWA KANTOR
8	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	60.000.000,00	80.000.000,00	6.666.666,67	1/10/2025 s/d 01 /10/2026	3	20.000.000,00	60.000.000,00	SEWA KANTOR
9	SEKRETARI AT DAERAH		60.000.000,00	5.000.000,00	04/01/2025 s/d 04/01/2026	12	60.000.000,00	-	SEWA KANTOR
11	SEKRETARI AT DAERAH	-	100.000.000,00	8.333.333,33	25/02/2025 S/D 25/02/2026	11	91.666.666,67	8.333.333,33	SEWA RUMAH DINAS
12	Badan Pendapatan Daerah	67.500.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2026	12	90.000.000,00	-	SEWA KANTOR



NO	SKPD	SALDO TAHUN LALU (THN 2025)	NILAI SEWA	NILAI SEWA PERBULAN	JANGKA WAKTU SEWA	JUM LAH BUL AN	NILAI SEWA TAHUN 2025	SISA NILAI SEWA/DIBAY AR DIMUKA	KETERA NGAN
	JUMLAH	208.333.333,33	438.000.000,00	57.333.333,33			342.166.666,67	104.166.666,67	

5.3.1.3. Persediaan**Rp21.732.278.419,08**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.732.278.419,08 menurun sebesar Rp1.460.534.366,55 atau turun sebesar 6,30% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.192.812.785,63. Saldo persediaan tersebut telah sesuai dengan hasil stock opname fisik barang per 31 Desember 2025, yang terdiri dari ; 1.959.628.000,00 bahan gedung jaringan 75.274.900,00

1. Sisa Bahan Habis Pakai sebesar Rp9.929.642.564,08
2. Belanja barang yang akan dihibahkan/di jual kepada pihak atau Instansi vertikal/swasta dan Masyarakat karena sampai pada 31 Desember 2025 belum diserahkan sehingga diakui sebagai persediaan berupa bahan gedung dan bahan jaringan sebesar Rp 11.802.635.855,00 pada OPD antara lain
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp5.327.476.425,00
 - b. Dinas PUPR sebesar Rp6.475.159.430,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. 49 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

NO.	OPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	5.327.476.425,00	3.178.896.275,00	0,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	Stock Obat - Obatan dan BMHP	6.097.224.119,23	6.482.538.449,47	-385.314.330,24	-5,94
		Stock Obat - Obatan (Puskesmas)	2.829.818.924,81	5.881.156.923,78	-3.051.337.998,97	-51,88
3	RSUD	Stock Obat - Obatan	444.409.599,86	865.800.435,62	-421.390.835,76	-48,67
4	RS PRATAMA P. GOROM	BMHP Stock Obat - Obatan	513.636.648,18	337.001.500,76	176.635.147,42	52,41
5	DINAS PUPR	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	6.475.159.430,00	6.399.884.530,00	0,00	0,00
6	DINAS CAPIL	Blanko - Blanko	3.345.000,00	21.772.290,00	-18.427.290,00	-84,64
7	DINAS PPKB	Alat-Kontrasepsi	41.208.272,00	25.762.381,00	15.445.891,00	59,96
JUMLAH			21.732.278.419,08	23.192.812.785,63	-3.684.389.416,55	-15,89



5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Rp 34.549.549.280,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.549.549.280,00 dan Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.549.549.280,00 atau tidak adanya investasi yang dilakukan pemerintah Daerah pada tahun 2025, yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp 34.549.549.280,00, sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 5. 50 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00	0,00	0,00
Jumlah	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00	0,00	0,00

5.3.2.1. Investasi Non-Permanen

Rp0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang tidak ada perbedaan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 51 Rincian Investasi Non Permanen per 31 desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non-Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) sebesar Rp3.001.957.272,28 telah disisihkan sebesar 100% sehingga penyajian nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasi / Nilai Realizable Value (NRV) adalah Rp0,00.

5.3.2.1.1 Investasi Non -Permanen Lainnya (Dana Bergulir) Rp3.001.957.272,28

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) per



31 Desember 2025 sebesar Rp3.001.957.272,28 sama dengan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.001.957.272,28. Investasi Non permanen tersebut berupa penguatan modal yang diberikan kepada koperasi - koperasi dan UKM dan dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Investasi Non Permanen - Dana Bergulir disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan perhitungan pada tabel berikut :

Tabel 5. 52 Rincian Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025

Tahun Penyaluran	Saldo s/d Tahun 2024 Jumlah (Rp)	Pokok Dana Bergulir yang di tarik dan disetor Tahun 2025	Saldo s/d Tahun 2025
1	2	3	4=2-3
2007	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2008	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
2009	810.480.124,28	0,00	810.480.124,28
2010	371.593.650,00	0,00	371.593.650,00
2011	969.883.498,00	0,00	969.883.498,00
JUMLAH	3.001.957.272,28	0,00	3.001.957.272,28

Sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah kabupaten seram bagian timur nomor 17 tahun 2024, bahwa Investasi non- permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya

5.3.2.1.2 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Rp(3.001.957.272,28)

Saldo Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non - Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(3.001.957.272,28) sama dengan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.001.957.272,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 53 Rincian Penyisihan Dana Bergulir selama Tahun 2025

Tahun Penyaluran	Saldo s/d Tahun 2025	Umur piutang	Kualitas	Prosentase Penyisihan	Penyisihan Dana bergulir	Nilai Realizable Value (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2-6
2007	150.000.000,00	19 tahun	macet	100%	150.000.000,00	
2008	700.000.000,00	18 tahun	macet	100%	700.000.000,00	0,00
2009	810.480.124,28	17 tahun	macet	100%	810.480.124,28	0,00
2010	371.593.650,00	16 tahun	macet	100%	371.593.650,00	0,00
2011	969.883.498,00	14 tahun	macet	100%	969.883.498,00	0,00
JUMLAH	3.001.957.272,28				3.001.957.272,28	0,00

Penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) sebesar



Rp3.001.957.272,28 diketahui telah dilakukan penyisihan sebesar 100% sehingga penyajian nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasi / *Net Realizable Value* (NRV) adalah Rp0,00. Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir yang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Nomor 17 tahun 2024. Bahwa Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan : (1.) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; (2.) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; (3.) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan (4.) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

5.3.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Rp34.549.549.280,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.549.549.280,00 dan Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.549.549.280,00 atau tidak terdapat perbedaan saldo, hal ini dikarenakan tidak ada Investasi jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Daerah di tahun 2025, sebagaimana rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 54 Rincian Penyisihan Investasi Jangka Permanen Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00	0,00	0,00

5.3.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Rp34.549.549.280,00

Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp34.549.549.280,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34.549.549.280,00 atau tidak terdapat perbedaan saldo, yang terdiri dari Investasi pada Bank Maluku-Malut sampai pada Per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 yang menggunakan metode *cost* dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (PD) Mitra Karya sebesar Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.549.549.280,00 menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 55 Rincian Investasi jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Per31 Desember 2025 (Rp)	Per31 Desember 2024 (Rp)
PT. Bank Maluku Malut	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
PD. Mitra Karya	4.549.549.280,00	4.549.549.280,00
Jumlah	34.549.549.280,00	34.549.549.280,00

Penambahan atau Penurunan Saldo Investasi Permanen terdiri dari:

- Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku Malut berupa pengeluaran pembiayaan pada TA 2025 sebesar Rp0,00
- Penyertaan modal pada PD. Mitra Karya berupa koreksi saldo penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas sesuai laporan keuangan PD Mitra Karya per 31 Desember 2018 *unaudited* sebesar Rp4.549.549.280,00. Kepemilikan saham pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas PD Mitra Karya Sebesar 100 persen.

5.3.3. ASET TETAP Rp1.279.073.814.089,77

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.279.073.814.089,77 mengalami penurunan sebesar Rp44.945.132.188,81 atau turun sebesar 43,39% dari Saldo Aset Tetap per 31 desember 2024 sebesar Rp1.324.018.946.278,58 sebagaimana rincian dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 56 Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	25.256.467.472,25	24.966.963.402,25	289.504.070,00	1,16
Peralatan dan Mesin	454.097.408.896,62	435.436.867.861,45	18.660.541.035,17	4,29
Gedung dan Bangunan	942.987.110.509,27	894.269.383.462,23	48.717.727.047,04	5,45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.730.793.811.749,90	1.666.302.647.656,53	64.491.164.093,37	3,87
Aset Tetap Lainnya	17.802.862.231,08	16.352.935.923,08	1.449.926.308,00	8,87
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.027.794.737,02	29.465.447.542,27	(8.437.652.805,25)	-28,64
Akumulasi Penyusutan	(1.912.891.641.506,37)	(1.742.775.299.569,23)	(170.116.341.937,14)	9,76
Jumlah	1.279.073.814.089,77	1.324.018.946.278,58	(44.945.132.188,81)	-3,39

Jumlah Saldo Aset Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 sebagaimana pada tabel diatas terdiri dari Saldo Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2024 ditambah Belanja Modal TA 2025.

**5.3.3.1. Aset Tetap Tanah****Rp25.256.467.472,25**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.256.467.472,25 meningkat sebesar Rp 289.504.070,00 atau sebesar 1,16% dari Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.966.963.402,25 yang terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Rincian Belanja Aset tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2025

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	2.173.417.400,00	2.269.417.400,00
SEKRETARIAT DPRD	480.649.000,00	480.649.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	145.452.000,00	145.452.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	108.741.000,00	108.741.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.870.580,00	17.870.580,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	112.000.000,00	112.000.000,00
BAPPEDA	47.600.000,00	47.600.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	125.000.000,00	125.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	10.465.000,00	10.465.000,00
SATPOL PAMONG PRAJA	133.584.000,00	133.584.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	76.882.000,00	76.882.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.117.103.000,00	2.117.103.000,00
DINAS PENDIDIKAN	7.274.127.860,00	7.239.427.390,00
DINAS KESEHATAN	1.310.008.182,25	1.310.008.182,25
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	181.934.750,00	181.934.750,00
DINAS SOSIAL	200.000.000,00	200.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	5.335.970.800,00	5.335.970.800,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.619.050,00	1.815.450,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	758.174.740,00	408.174.740,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	656.281.360,00	656.281.360,00
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	9.164.540,00	9.164.540,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	250.432.540,00	250.432.540,00
DINAS PARIWISATA	255.514.000,00	255.514.000,00
DINAS PERTANIAN	446.954.300,00	446.954.300,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	71.660.000,00	71.660.000,00
DINAS PERIKANAN	1.134.877.850,00	1.134.877.850,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	273.199.000,00	273.199.000,00
KEC. BULA	71.047.170,00	71.047.170,00
KEC. BULA BARAT	39.590.170,00	39.590.170,00
KEC. TUTUK TOLU	95.452.000,00	95.452.000,00
KEC. SIWALALAT	29.399.800,00	29.399.800,00
KEC. WERINAMA	3.895.500,00	3.895.500,00
KEC. KILMURI	15.907.640,00	15.907.640,00
KEC. SERAM TIMUR	1.270.560.000,00	1.270.560.000,00
KEC. PULAU PANJANG	9.100.000,00	9.100.000,00
KEC. GOROM TIMUR	1.859.550,00	1.859.550,00



OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
KEC. TELUK WARU	1.054.690,00	1.054.690,00
KEC. KIAN DARAT	3.289.650,00	3.289.650,00
KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	5.628.350,00	5.628.350,00
Jumlah	25.256.467.472,25	24.966.963.402,25

5.3.3.2 Peralatan Dan Mesin

Rp 454.097.408.896,62

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp454.097.408.896,62 meningkat sebesar Rp18.660.541.035,17 atau sebesar 4,29% dari Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp435.436.867.861,45, dengan rincian per OPD terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 58 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	93.750.308.388,00	89.025.271.558,00
SEKRETARIAT DPRD	17.890.469.549,51	14.742.497.549,51
BADAN KESBANGPOL	912.972.701,00	912.972.701,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	2.444.334.821,00	2.444.334.821,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PA	1.081.092.500,00	1.081.092.500,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.914.627.630,00	2.893.627.630,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.891.429.440,00	4.852.110.690,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.611.595.000,00	1.594.895.000,00
BAPPEDA	1.799.615.600,00	1.506.167.600,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.700.454.590,00	1.700.454.590,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	2.934.288.284,00	2.923.663.284,00
SATPOL PAMONG PRAJA	1.706.413.200,00	1.691.413.200,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	1.153.145.096,00	1.103.095.096,00
INSPEKTORAT DAERAH	1.191.485.200,00	946.305.200,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	88.318.520.023,00	88.025.730.023,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	4.109.565.488,00	3.406.998.611,00
DINAS PENDIDIKAN	68.579.005.146,64	64.921.020.523,63
DINAS KESEHATAN	99.426.535.401,72	94.987.724.579,31
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.146.996.028,00	1.056.549.528,00
DINAS SOSIAL	512.143.972,00	458.920.972,00
DINAS PERHUBUNGAN	15.644.320.094,25	15.623.556.284,50
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.099.979.300,00	1.973.071.500,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.982.729.170,00	3.954.908.170,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	6.631.124.800,00	6.494.150.800,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1.240.682.230,00	1.184.171.520,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	4.906.917.882,00	4.906.917.882,00
DINAS PARIWISATA	4.878.216.119,00	4.867.178.585,00
DINAS PERTANIAN	2.078.587.808,00	2.071.087.808,00
DINAS PERIKANAN	5.687.693.982,00	5.634.894.962,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	4.755.331.226,50	4.591.328.203,00



OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
DAERAH		
BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.040.020.826,50	866.478.875,50
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.807.678.000,00	1.745.838.000,00
KEC. BULA	136.943.399,00	136.943.399,00
KEC. BULA BARAT	65.800.000,00	65.800.000,00
KEC. TUTUK TOLU	163.278.590,00	163.278.590,00
KEC. SIWALALAT	34.053.000,00	34.053.000,00
KEC. WERINAMA	94.405.328,00	89.082.328,00
KEC. KILMURI	41.792.596,00	41.792.596,00
KEC. SERAM TIMUR	134.822.700,00	134.822.700,00
KEC. KESUI WATUBELA	130.450.000,00	130.450.000,00
KEC. PULAU PANJANG	47.109.284,50	31.742.500,00
KEC. GOROM TIMUR	43.000.000,00	43.000.000,00
KEC. PULAU GOROM	111.145.000,00	111.145.000,00
KEC. TELUK WARU	9.103.600,00	9.103.600,00
KEC. KIAN DARAT	149.313.000,00	149.313.000,00
KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	84.500.000,00	84.500.000,00
KEC. TEOR	23.412.902,00	23.412.902,00
Jumlah	454.097.408.896,62	435.436.867.861,45

Rincian per jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Alat-alat angkutan darat	91.208.515.778,59	87.375.605.919,81
Alat Angkutan Apung Bermotor	17.170.341.450,00	17.170.341.450,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	4.468.712.625,00	4.468.712.625,00
Mesin-mesin / Alat Bengkel Bermesin	10.740.885.200,33	10.740.885.200,33
Alat Ukur	1.184.086.932,00	1.184.086.932,00
Peralatan Kantor	4.091.064.017,86	3.091.064.017,86
Alat Komputer	38.997.581.646,72	38.184.472.593,33
Alat Kesehatan	81.667.668.898,92	81.667.668.898,92
Alat Kedokteran	29.522.471.860,00	29.522.471.860,00
Meubelair	8.189.503.722,00	8.189.503.722,00
Alat Rumah Tangga	40.943.990.206,50	40.943.990.206,50
Alat Bantu	743.565.200,00	743.565.200,00
Alat Komunikasi	2.753.592.979,17	2.753.592.979,17
Alat Studio	13.340.314.550,00	13.340.314.550,00
Alat pemeliharaan tanaman	69.141.920,00	69.141.920,00
Alat praga /praktek sekolah	21.625.961.366,03	21.611.439.243,03
Peralatan Elektronik	2.132.596.003,00	2.132.596.003,00
Alat-alat Laboratorium	41.456.674.018,00	38.456.674.018,00
Alat Angkut darat tak Bermotor	41.964.152.132,50	31.964.152.132,50
Alat laboratorium fisika/nuklir	185.276.000,00	185.276.000,00



Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Alat Keselamat Kerja	33.500.000,00	33.500.000,00
Alat Pengolahan	400.000.000,00	400.000.000,00
Peralatan Lainnya	1.207.812.390,00	1.207.812.390,00
Jumlah	454.097.408.896,62	435.436.867.861,45

Pada Tahun 2025 terdapat Perolehan aset sarana digitalisasi pembelajaran pada satuan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum dicatat pada daftar barang milik daerah karena belum diketahui nilai perolehannya dan sebagian belum diperoleh BAST dengan rincian :

Tabel 5. 60 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Maluku untuk TK/PAUD

No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten	Provinsi	Status Penerimaan
1	70003274	TK NEGERI SERAN REY (SR)	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	70013345	TK NEGERI ITAN WAKA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	69887093	TK NEGERI JEMBATAN BASAH	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	70007057	TK USA KASA PERMAI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	69991750	TK PRATAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	69990419	TK NEGERI SIRITAUN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	69965375	TK LESTARI INDAH	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	70030443	TK AZ-ZAHRA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	70004683	TK NEGERI KARTINI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	69794358	PAUD SEKAR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	69990413	TK SALMAN AL - FARISI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	70048306	TK LUSI GIA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	69794329	PAUD AS-SAKINAH	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	70006790	TK NEGERI NAMURAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	70048305	TK SHUFI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	70013344	TK PAUD SOMBARATU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
17	69964756	TK NEGERI ETAR FAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
18	69962161	KB MEKAR SARI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
19	69877362	TK AISYIAH	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
20	69794336	PAUD VICTORIA JAYA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
21	69877363	TK NEGERI PEMBINA BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
22	69794350	TK NEGERI GUMUMAE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



Tabel 5. 61 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Maluku untuk Sekolah Dasar (SD)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
17	60102926	SD NEGERI 1 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
18	60102921	SDS NASKAT RUMUSI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
19	69949842	SD NEGERI 10 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
20	60101690	SD AL HILAL EFFA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
21	60102901	SD AL HILAL GULIAR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
22	60102918	SD NEGERI 7 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
23	60102912	SD NEGERI 6 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
24	69888851	SD NEGERI 9 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
25	60102931	SD NEGERI 2 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
26	60102920	SD NASKAT WUNIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
27	60102936	SD NEGERI 3 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
28	60102929	SD NEGERI 5 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
29	70004538	SD NEGERI 6 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
30	60102769	SD NEGERI 1 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
31	60102916	SD NEGERI 5 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
32	60102494	SD NEGERI 2 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
33	60102928	SD NEGERI 3 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
34	60101733	SD NEGERI 4 TUTUK TOLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
35	60102903	SD AL HILAAL KILWOUW	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
36	60102937	SD NEGERI 1 TEOR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
37	60102922	SD NASKAT RUMOY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
38	70041448	SD NEGERI 10 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
39	60101741	SD NEGERI 7 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
40	60101740	SD NEGERI 3 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
41	70005496	SD NEGERI 9 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
42	60102771	SD NEGERI 4 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
43	60102499	SD NEGERI 8 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
44	60101672	SD NEGERI 6 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
45	60101697	SD NEGERI 5 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
46	60101642	SD NEGERI 2 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
47	60101692	SD AL HILAL KARAI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
48	60101679	SD NEGERI 1 TELUK WARU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
49	60101651	SD NEGERI 5 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
50	69973986	SD NEGERI 8 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
51	60103739	SD NEGERI 7 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
52	60103740	SD NEGERI 6 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
53	60101652	SD NEGERI 4 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
54	60102501	SD YPPK LILIAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
55	60101725	SD NEGERI 3 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
56	60101673	SD NEGERI 2 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
57	60102500	SD YPPK ELNUSA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
58	60101685	SD NEGERI 1 SIWALALAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
59	60102491	SD NEGERI 5 SIRITAUN WIDA TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
60	60101714	SD NEGERI 3 SIRITAUN WIDA TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
61	60102930	SD NEGERI 2 SIRITAUN WIDA TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
62	60102909	SD NEGERI 4 SIRITAUN WIDA TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
63	60101636	SD NEGERI 6 SIRITAUN WIDA TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
64	60102935	SD NEGERI 1 SIRITAUN WIDA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
		TIMUR			
65	60101676	SD NEGERI 7 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
66	60102495	SD NEGERI 8 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
67	60101717	SD NEGERI 1 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
68	60102768	SD NEGERI 6 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
69	60102902	SD AL HILAL KELLU	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
70	60102900	SD AL HILAL AINENA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
71	60102772	SD NEGERI 12 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
72	60101727	SD NEGERI 2 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
73	60101639	SD NEGERI 10 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
74	60102915	SD NEGERI 11 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
75	60102493	SD NEGERI 5 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
76	60102904	SD AL HILAL MAAR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
77	60102764	SD NEGERI 9 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
78	60101645	SD NEGERI 4 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
79	69867972	SD NEGERI 13 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
80	60102765	SD NEGERI 3 SERAM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
81	60102924	SD NEGERI 1 PULAU PANJANG	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
82	60101721	SD NEGERI 2 PULAU PANJANG	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
83	60103404	SD NEGERI 3 PULAU PANJANG	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
84	60101724	SD NEGERI 8 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
85	60101644	SD NEGERI 10 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
86	60102906	SD NEGERI 16 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
87	69872004	SD NEGERI 20 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
88	60102497	SD NEGERI 19 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
89	60102933	SD NEGERI 6 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
90	60102910	SD NEGERI 12 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
91	60101694	SD NEGERI 14 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
92	60101630	SD NEGERI 13 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
93	60101716	SD NEGERI 15 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
94	60102932	SD NEGERI 17 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
95	60101718	SD NEGERI 5 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
96	60102927	SD NEGERI 3 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
97	60102908	SD NEGERI 18 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
98	60102925	SD NEGERI 9 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
99	60101739	SD NEGERI 2 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
100	60102907	SD NEGERI 11 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
101	60101671	SD NEGERI 4 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
102	60101680	SD NEGERI 7 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
103	60102923	SD NEGERI 1 PULAU GOROM	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
104	60103734	SD NEGERI 10 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
105	70007398	SD NEGERI 11 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
106	60102763	SD AL HILAAL SELOR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
107	60101640	SD NEGERI 7 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
108	60101728	SD NEGERI 5 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
109	60101719	SD NEGERI 3 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
110	60101677	SD NEGERI 8 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
111	60101723	SD NEGERI 1 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
112	60101646	SD NEGERI 6 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
113	60102917	SD NEGERI 9 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
114	60101726	SD NEGERI 2 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
115	60101634	SD NEGERI 4 KILMURY	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
116	60101722	SD NEGERI 3 KIANDARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
117	60102905	SD NEGERI 5 KIANDARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
118	60102911	SD NEGERI 4 KIANDARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
119	60102767	SD NEGERI 2 KIANDARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
120	60101737	SD NEGERI 1 KIANDARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
121	69900834	SD NEGERI 9 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
122	60102498	SD NEGERI 8 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
123	60103639	SD NEGERI 7 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
124	60101637	SD NEGERI 2 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
125	60101674	SD NEGERI 4 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
126	60102934	SD NEGERI 1 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
127	60102770	SD NEGERI 3 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
128	60101633	SD NEGERI 6 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
129	60101638	SD NEGERI 5 GOROM TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
130	60101691	SD AL HILAL BANGGOI	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
131	60103742	SD NEGERI 11 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
132	60101695	SD NEGERI 2 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
133	60101675	SD NEGERI 5 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
134	60101648	SD NEGERI 1 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
135	60102914	SD NEGERI 10 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
136	60101731	SD NEGERI 7 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
137	60101629	SD NEGERI 3 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
138	60102913	SD NEGERI 9 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
139	60101732	SD NEGERI 8 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
140	60101729	SD NEGERI 4 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
141	60101730	SD NEGERI 6 BULA BARAT	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Provinsi	Status Penerimaan
1	60101710	SD MUHAMMADIYAH TOBO	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	60101647	SD NEGERI 3 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	60103640	SD NEGERI 10 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	60101698	SD NEGERI 8 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	60101693	SD NEGERI 7 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	60101696	SD NEGERI 9 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	60101713	SD NEGERI 5 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	60101734	SD NEGERI 6 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101643	SD NEGERI 4 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101715	SD NEGERI 1 WERINAMA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101650	SD NEGERI 4 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60102919	SD NASKAT KARLOMIN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60102938	SD YPPK KELANGAN	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	69957142	SD NEGERI 11 WAKATE	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
142	70011532	SD QURAN AL-QUDWAH (SDQ)	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
143	70047191	SD IT AL UMAR	Seram Bagian Timur	Maluku	TIDAK
144	60102766	SD NEGERI 7 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
145	60101627	SD NEGERI 3 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
146	60103741	SD NEGERI 9 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
147	69883306	SD ISLAM TERPADU HARAPAN KITA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
148	60101632	SD NEGERI 5 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
149	60101649	SD NEGERI 1 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
150	60101628	SD NEGERI 2 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
151	60101653	SD NEGERI 4 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
152	60103656	SD NEGERI 8 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
153	60101641	SD NEGERI 6 BULA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA

Tabel 5. 62 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Maluku untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten	Provinsi	Status Penerimaan
1	70045342	SMP NEGERI 52 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	69973985	SMP NEGERI 47 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	70003027	SMP NEGERI 51 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	70007753	SMP IT AL-UMAR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	70001099	SMP NEGERI 49 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	69787157	SMP NEGERI 46 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	69888875	SMP NEGERI 48 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



8	69933751	SMP NEGERI 50 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	69816344	SMP NEGERI 43 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
10	60101683	SMP NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
11	60101682	SMP NEGERI 16 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
12	60101670	SMP NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
13	60101669	SMP NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
14	60101665	SMP NEGERI 9 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
15	60101664	SMP NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
16	60101663	SMP PGRI BELIS	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
17	60101658	SMP NEGERI 11 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
18	60101657	SMP NEGERI 8 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
19	60101656	SMP NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
20	60102956	SMP NEGERI 6 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
21	60102955	SMP NEGERI 20 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
22	60102954	SMP NEGERI 13 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
23	60102953	SMP PGRI KILGA	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
24	60102952	SMP PGRI AFANG	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
25	60102951	SMP NEGERI 7 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
26	60102950	SMP NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
27	60102949	SMP NEGERI 19 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
28	60102948	SMP NEGERI 15 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
29	60102947	SMP NEGERI 10 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
30	60102946	SMP NEGERI 17 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
31	60102945	SMP NEGERI 12 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
32	60102944	SMP NEGERI 18 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
33	60102943	SMP NEGERI 26 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
34	60102942	SMP NEGERI 25 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
35	60102941	SMP NEGERI 31 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
36	60102940	SMP NEGERI 36 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
37	60102939	SMP NEGERI 30 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
38	60102776	SMP NEGERI 29 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
39	60102775	SMP NEGERI 24 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
40	60102774	SMP NEGERI 27 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA



No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten	Provinsi	Status Penerimaan
1	70045342	SMP NEGERI 52 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
2	69973985	SMP NEGERI 47 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
3	70003027	SMP NEGERI 51 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
4	70007753	SMP IT AL-UMAR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
5	70001099	SMP NEGERI 49 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
6	69787157	SMP NEGERI 46 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
7	69888875	SMP NEGERI 48 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
8	69933751	SMP NEGERI 50 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
9	69816344	SMP NEGERI 43 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
41	60102773	SMP NEGERI 23 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
42	60103752	SMP NEGERI 38 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
43	60103751	SMP NEGERI 37 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
44	60103750	SMP NEGERI 35 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
45	60103749	SMP NEGERI 39 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
46	60103748	SMP NEGERI 45 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
47	60103747	SMP NEGERI 41 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
48	60103746	SMP NEGERI 40 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
49	60103677	SMP NEGERI 44 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
50	60103676	SMP NEGERI 34 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
51	60103675	SMP NEGERI 33 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
52	60103626	SMP NEGERI 32 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
53	60102513	SMP NEGERI 28 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
54	60102512	SMP NEGERI 22 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
55	60102511	SMP NEGERI 21 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA
56	60103896	SMP NEGERI 42 SERAM BAGIAN TIMUR	Seram Bagian Timur	Maluku	YA

5.3.3.2. Bangunan Dan Gedung

Rp942.987.110.509,27

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp942.987.110.509,27 meningkat sebesar Rp48.717.727.047,04 atau sebesar 5,45% dari Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp894.269.383.462,23 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 63 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	76.327.236.199,31	73.490.882.395,00
SEKRETARIAT DPRD	24.579.678.300,00	24.529.678.300,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	1.812.335.000,00	1.812.335.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	5.205.514.099,00	5.105.614.099,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4.280.844.186,87	4.280.844.186,87
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.694.987.227,84	2.694.987.227,84
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.765.170.050,00	1.765.170.050,00
BAPPEDA	1.729.909.050,00	1.658.865.200,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.825.511.000,00	1.825.511.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	11.830.632.800,00	11.830.632.800,00
SATPOL PAMONG PRAJA	2.248.635.500,00	2.058.672.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	2.573.007.555,00	2.573.007.555,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	40.200.585.605,20	36.527.708.637,16
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	512.554.050,00	357.791.550,00
DINAS PENDIDIKAN	403.738.966.000,63	391.127.907.835,52
DINAS KESEHATAN	159.729.044.718,94	156.475.520.056,12
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.355.660.200,00	1.094.485.200,00
DINAS PERHUBUNGAN	20.439.167.292,15	20.439.167.292,15
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	1.233.986.710,00	1.233.986.710,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	60.808.107.949,77	54.685.914.090,01
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	32.342.112.219,50	13.147.237.482,50
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	15.198.466.993,51	15.198.466.993,51
DINAS PARIWISATA	13.312.984.342,95	13.312.984.342,95
DINAS PERTANIAN	21.364.184.917,00	21.314.184.917,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	4.026.465.500,00	4.026.465.500,00
DINAS PERIKANAN	8.493.784.991,60	8.493.784.991,60
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.798.073.300,00	8.648.073.300,00
KEC. BULA	1.308.959.750,00	1.308.959.750,00
KEC. BULA BARAT	104.090.000,00	104.090.000,00
KEC. TUTUK TOLU	768.269.000,00	768.269.000,00
KEC. SIWALALAT	1.096.914.000,00	1.096.914.000,00
KEC. WERINAMA	600.210.000,00	600.210.000,00
KEC. KILMURI	2.722.101.000,00	2.722.101.000,00
KEC. SERAM TIMUR	5.946.877.000,00	5.946.877.000,00
KEC. KESUI WATUBELA	1.561.926.000,00	1.561.926.000,00
KEC. PULAU GOROM	450.158.000,00	450.158.000,00
Jumlah	942.987.110.509,27	894.269.383.462,23

Rincian per jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Tabel 5. 64 Rincian Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	780.932.864.187,10	742.269.217.085,06
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	125.937.472.181,74	122.937.472.181,74
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.019.857.834,43	1.019.857.834,43
Bangunan Pagar Gapura dan Pos Penjagaan	28.906.076.811,00	26.906.076.811,00
Bangunan Lainnya	4.190.839.495,00	1.136.759.550,00
Jumlah	942.987.110.509,27	894.269.383.462,23

Pada Tahun 2025 terdapat Perolehan aset Gedung dan Bangunan sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 pada satuan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum dicatat pada daftar barang milik daerah karena belum diperoleh BAST dengan rincian :

Tabel 5. 65 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Maluku Sekolah Dasar (SD)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Nilai Bantuan (Rp)	Status
1	69888851	SD NEGERI 9 WAKATE	Kab. Seram Bagian Timur	796.135.515,00	YA
2	69787158	SD NEGERI 8 WAKATE	Kab. Seram Bagian Timur	799.851.474,00	YA
3	60102936	SD NEGERI 3 WAKATE	Kab. Seram Bagian Timur	796.852.500,00	YA
4	60102920	SD NASKAT WUNIN	Kab. Seram Bagian Timur	126.655.459,00	YA
5	60102917	SD NEGERI 9 KILMURY	Kab. Seram Bagian Timur	970.419.265,00	YA
6	60102916	SD NEGERI 5 TUTUK TOLU	Kab. Seram Bagian Timur	799.375.712,00	YA
7	60102912	SD NEGERI 6 WAKATE	Kab. Seram Bagian Timur	799.723.034,00	YA
8	60102901	SD AL HILAL GULIAR	Kab. Seram Bagian Timur	796.177.952,00	YA
9	60102497	SD NEGERI 19 PULAU GOROM	Kab. Seram Bagian Timur	975.829.434,00	YA
10	60101685	SD NEGERI 1 SIWALALAT	Kab. Seram Bagian Timur	272.211.585,00	YA
11	60101654	SD NEGERI 2 WERINAMA	Kab. Seram Bagian Timur	799.742.212,00	YA

Tabel 5. 66 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 pada Wilayah Provinsi Maluku Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Nilai Bantuan	Status
1	60102955	SMP NEGERI 20 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.872.000.000,00	YA
2	60102946	SMP NEGERI 17 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.645.000.000,00	YA
3	70001099	SMP NEGERI 49 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	2.029.000.000,00	YA
4	69973985	SMP NEGERI 47 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.924.000.000,00	YA
5	69787157	SMP NEGERI 46 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.699.000.000,00	YA



6	60103677	SMP NEGERI 44 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.727.000.000,00	YA
7	60103675	SMP NEGERI 33 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	2.499.000.000,00	YA
8	60102949	SMP NEGERI 19 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.720.000.000,00	YA
9	60102945	SMP NEGERI 12 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.419.000.000,00	YA
10	60102944	SMP NEGERI 18 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.719.000.000,00	YA
11	60102942	SMP NEGERI 25 SERAM BAGIAN TIMUR	Kab. Seram Bagian Timur	1.719.000.000,00	YA

5.3.3.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp1.730.793.811.749,90

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.730.793.811.749,90 atau mengalami peningkatan sebesar Rp64.491.164.093,37 atau sebesar 3,87 dan 2024 adalah % dari Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.666.302.647.656,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Rincian Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	5.580.173.800,00	5.001.487.500,00
SEKRETARIAT DPRD	139.700.000,00	139.700.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	174.032.113,75	174.032.113,75
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.964.474.550,00	1.964.474.550,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47.429.847.314,06	17.440.346.922,82
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.246.500.000,00	1.246.500.000,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	1.599.418.068,87	1.549.468.068,87
DINAS PENDIDIKAN	239.659.000,00	239.659.000,00
DINAS KESEHATAN	19.112.241.228,00	18.577.241.228,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.858.849.231,46	2.858.849.231,46
DINAS PERHUBUNGAN	58.069.567.090,18	58.025.197.090,18
DINAS PEKERJAAN UMUM	1.524.554.488.918,16	1.493.042.518.316,03
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	46.457.917.379,88	44.676.230.579,88
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	146.165.700,00	146.165.700,00
DINAS PARIWISATA	6.092.607.983,54	6.092.607.983,54
DINAS PERTANIAN	14.396.606.872,00	14.396.606.872,00
DINAS PERIKANAN	558.116.500,00	558.116.500,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	149.737.000,00	149.737.000,00
KEC. SIWALALAT	2.359.000,00	2.359.000,00
KEC. WERINAMA	2.359.000,00	2.359.000,00
KEC. SERAM TIMUR	1.685.000,00	1.685.000,00
KEC. PULAU GOROM	2.159.000,00	2.159.000,00
KEC. TEOR	15.147.000,00	15.147.000,00
Jumlah	1.730.793.811.749,90	1.666.302.647.656,53



Rincian per jenis Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 5. 68 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan perjenis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Jalan	734.213.997.926,10	733.213.997.944,10
Pembangunan Air Irigasi	70.157.825.792,00	70.157.825.792,00
Instalasi air Kotor	28.054.065.640,00	26.703.520.640,00
Instalasi Pengolahan Bangunan	16.776.834.351,00	16.776.834.351,00
Instalasi Pembangkit Listrik	19.195.581.644,00	19.195.581.644,00
Instalasi Gardu Listrik	97.992.000,00	97.992.000,00
Jembatan	445.039.979.666,75	398.079.017.747,57
Jaringan Air	203.136.406.583,92	203.136.406.583,92
Instalasi Air Bersih	35.488.385.497,59	31.290.547.000,00
Pembangunan Air Kotor	32.067.493.755,00	29.296.529.365,00
Pasang Air Pasang Surut	49.026.492.846,68	45.002.163.653,68
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	72.996.261.623,93	69.600.424.838,93
Pembangunan Air Bersih/Baku	4.421.701.586,00	4.253.171.286,00
Penerangan Jalan	20.120.792.836,93	19.498.634.810,33
Jumlah	1.730.793.811.749,90	1.666.302.647.656,53

5.3.3.4. Aset Tetap lainnya

Rp17.802.862.231,08

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.802.862.231,08, meningkat sebesar Rp1.449.926.308,00 atau sebesar 8,87% dari Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.352.935.923,08 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Saldo Aset Tetap lainnya per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	1.152.090.500,00	1.152.090.500,00
SEKRETARIAT DPRD	138.363.200,00	138.363.200,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	256.608.000,00	256.608.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.405.792.499,00	1.405.792.499,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.200.000,00	1.200.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	144.199.440,00	144.199.440,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	1.424.488.950,00	1.424.488.950,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	36.000.000,00	36.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN	10.909.442.092,08	9.393.515.784,08
DINAS KESEHATAN	200.000,00	200.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	43.727.500,00	109.727.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	14.000.000,00	14.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	252.500.000,00	252.500.000,00



OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	119.023.050,00	119.023.050,00
DINAS PARIWISATA	1.054.327.000,00	1.054.327.000,00
DINAS PERTANIAN	784.000.000,00	784.000.000,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	65.300.000,00	65.300.000,00
KEC. TUTUK TOLU	1.600.000,00	1.600.000,00
Jumlah	17.802.862.231,08	16.352.935.923,08

Rincian per jenis Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Aset Tetap lainnya perjenis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Buku dan Kepustakaan	12.074.102.662,08	10.636.970.354,08
Barang Bercorak Kesenian	1.235.413.700,00	1.235.413.700,00
Alat Olahraga Lainnya	784.002.400,00	784.002.400,00
Hewan Ternak dan Tanaman	1.069.732.920,00	1.069.732.920,00
Sarana Umum	2.639.610.549,00	2.626.816.549,00
Jumlah	17.802.862.231,08	16.352.935.923,08

5.3.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp21.027.794.737,02

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2025 sebesar Rp21.027.794.737,02 menurun sebesar Rp8.437.652.805,25 atau sebesar 28,64% dari Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2024 sebesar Rp29.465.447.542,27, sebagaimana rincian masing masing OPD terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 71 Rincian Belanja Aset tetap KDP per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	370.583.000,00	370.583.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	150.551.875,00	150.551.875,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.564.620.659,75	0,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	842.255.722,27	842.255.722,27
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	255.631.350,00	0,00
DINAS PERHUBUNGAN	564.194.800,00	564.194.800,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	17.279.957.330,00	27.537.862.145,00
Jumlah	21.027.794.737,02	29.465.447.542,27

**5.3.3.6. Akumulasi Penyusutan****Rp(1.912.891.641.506,37)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(1.912.891.641.506,37) atau meningkat sebesar Rp170.116.341.937,14 atau sebesar 9,76% dari Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.742.775.299.569,23), sebagaimana rincian masing masing OPD terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 72 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
SEKRETARIAT DAERAH	136.396.700.738,72	143.023.589.310,75
SEKRETARIAT DPRD	32.619.346.053,65	33.270.093.259,93
BADAN KESBANGPOL	871.278.641,00	1.453.624.423,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	3.812.973.033,63	4.266.486.802,25
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	4.057.045.221,65	5.998.580.108,70
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3.900.544.531,06	3.563.582.865,72
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.706.961.280,78	8.105.765.799,55
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.839.735.168,50	2.631.088.676,00
BAPPEDA	2.801.366.968,00	3.410.678.952,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.831.715.281,06	11.783.463.372,20
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	8.183.564.448,00	6.827.578.830,50
SATPOL PAMONG PRAJA	2.808.912.690,00	3.232.741.520,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	1.100.739.355,50	1.858.307.036,00
INSPEKTORAT DAERAH	2.430.332.514,40	2.208.663.963,70
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	112.481.041.380,70	113.984.339.323,78
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	3.135.299.710,17	2.870.765.504,57
DINAS PENDIDIKAN	307.377.418.780,88	287.217.860.199,27
DINAS KESEHATAN	167.416.809.042,18	160.531.274.005,21
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.444.244.036,71	4.202.099.174,88
DINAS SOSIAL	463.658.395,00	601.093.954,00
DINAS PERHUBUNGAN	48.826.159.208,64	47.948.877.465,36
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.544.402.236,00	1.248.233.590,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	4.298.015.313,50	4.046.129.620,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	920.553.074.971,79	756.360.178.108,65
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	27.582.040.116,90	17.173.503.517,26
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	-	13.380.708.919,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	12.618.376.817,74	11.726.063.082,44
DINAS PARIWISATA	17.352.502.690,74	15.953.159.135,84
DINAS PERTANIAN	23.788.126.207,83	30.056.896.333,28
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2.424.082.597,00	7.457.261.692,00
DINAS PERIKANAN	10.744.047.311,53	13.757.123.006,82
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.520.947.482,70	7.817.655.225,20



OPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH	825.679.955,95	836.613.873,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	812.199.142,86	497.739.428,57
KEC. BULA	1.143.235.076,10	1.206.472.774,80
KEC. BULA BARAT	169.889.992,00	228.539.985,00
KEC. TUTUK TOLU	810.476.432,00	833.017.265,00
KEC. SIWALALAT	862.630.945,00	931.688.952,00
KEC. WERINAMA	695.205.063,00	693.303.462,00
KEC. KILMURI	1.914.812.341,00	1.869.745.409,00
KEC. SERAM TIMUR	5.430.684.909,00	5.323.874.276,00
KEC. KESUI WATUBELA	1.536.183.380,00	1.462.087.079,00
KEC. PULAU PANJANG	39.173.659,50	59.121.244,00
KEC. GOROM TIMUR	42.999.996,00	84.999.992,00
KEC. PULAU GOROM	426.795.342,00	424.179.490,00
KEC. TELUK WARU	5.102.160,00	61.601.434,00
KEC. KIAN DARAT	122.050.996,00	128.288.245,00
KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	84.499.992,00	90.999.991,00
KEC. TEOR	38.559.898,00	75.559.891,00
Jumlah	1.912.891.641.506,37	1.742.775.299.569,23

5.3.4. Dana Cadangan

Rp0,00

Saldo Dana Cadangan Timur per 31 desember 2025 sebesar Rp0,00, dan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mengalokasikan Dana Cadangan selama Tahun 2025.

5.3.5. Aset Lainnya

Rp171.914.233.454,68

Saldo aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 171.914.233.454,68 meningkat sebesar Rp1.663.253.017,81 atau sebesar 0,98% dari saldo aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp 170.250.980.436,87 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Rp1.254.176.225,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.254.176.225,00 sedangkan realiasi per 31 desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo tagihan jangka panjang tersebut merupakan Kas Tekor Dana BOS sampai per 31 Desember 2025 yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), sebagaimana rincian dalam tabel dibawah ini

Tabel 5. 73 Rincian Tagihan Jangka Panjang Sisa Kas Dana Bos atas SKTJM Tahun 2025

Nama Sekolah	SKTJM
SD NEGERI 2 GOROM TIMUR	60.000.000,00
SD NEGERI 8 GOROM TIMUR	38.750.000,00
SD NEGERI 2 KIANDARAT	20.000.000,00
SD NEGERI 7 KILMURY	55.030.000,00



Nama Sekolah	SKTJM
SD NEGERI 8 KILMURY	15.609.500,00
SD NEGERI 5 PULAU GOROM	68.392.000,00
SD NEGERI 12 PULAU GOROM	13.311.600,00
SD NEGERI 13 PULAU GOROM	73.944.000,00
SD NEGERI 14 PULAU GOROM	40.000.000,00
SD NEGERI 17 PULAU GOROM	40.000.000,00
SD NEGERI 1 PULAU PANJANG	12.730.000,00
SD NEGERI 7 SERAM TIMUR	60.000.000,00
SD NEGERI 2 SIRITAUN WIDA TIMUR	5.843.100,00
SD NEGERI 1 TELUK WARU	23.040.000,00
SD NEGERI 1 TUTUK TOLU	15.609.500,00
SD NEGERI 5 TUTUK TOLU	20.460.000,00
SD NEGERI 8 WAKATE	39.043.200,00
SMP NEGERI 26 SERAM BAGIAN TIMUR	28.200.000,00
SMP NEGERI 17 SERAM BAGIAN TIMUR	60.000.000,00
SMP NEGERI 23 SERAM BAGIAN TIMUR	24.276.700,00
SMP NEGERI 38 SERAM BAGIAN TIMUR	60.000.000,00
SMP NEGERI 45 SERAM BAGIAN TIMUR	31.296.625,00
SMP NEGERI 32 SERAM BAGIAN TIMUR	50.185.000,00
SMP NEGERI 33 SERAM BAGIAN TIMUR	40.000.000,00
SMP NEGERI 41 SERAM BAGIAN TIMUR	24.315.000,00
SMP NEGERI 22 SERAM BAGIAN TIMUR	13.600.000,00
SMP NEGERI 19 SERAM BAGIAN TIMUR	60.540.000,00
SMP NEGERI 13 SERAM BAGIAN TIMUR	60.000.000,00
SMP NEGERI 18 SERAM BAGIAN TIMUR	40.000.000,00
SMP NEGERI 20 SERAM BAGIAN TIMUR	100.000.000,00
SMP NEGERI 16 SERAM BAGIAN TIMUR	60.000.000,00
JUMLAH	1.254.176.225,00

5.3.5.2. Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Rp2.406.375.814,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 desember 2025 adalah sebesar

Rp2.406.375.814,00 , atau sama dengan Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 desember 2024 sebesar Rp2.406.375.814,00, tidak terdapat perbedaan dan belum ada mutasi kurang pada tahun 2025, sehingga Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 desember 2025 tetap sebesar Rp2.406.375.814,00, yang diperoleh dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Tidak Berwujud (akibat perubahan kebijakan akuntansi) serta penyusutannya sebesar (Rp2.343.925.794,00) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5. 74 Rincian Aset Tidak Berwujud Realisasi dan Penyusutan Tahun 2025

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Tidak Berwujud (akibat perubahan kebijakan akuntansi)			
SEKRETARIAT DAERAH	199.650.000,00	199.649.999,00	1,00
DINAS PUPR	240.000.000,00	239.999.999,00	1,00
DINAS PENDIDIKAN	1.028.617.450,00	1.028.617.441,00	9,00
DINAS INFOKOM	6.000.000,00	5.999.999,00	1,00
DINAS PERHUBUNGAN	6.000.000,00	5.999.999,00	1,00
DINAS PTSP	380.628.364,00	380.628.358,00	6,00
BPBD	50.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00
RSUD BULA	295.680.000,00	295.679.999,00	1,00
BADAN PENDAPATAN	199.800.000,00	149.850.000,00	49.950.000,00
JUMLAH	2.406.375.814,00	-2.343.925.794,00	62.450.020,00

5.3.5.3. Aset Lain Lain

Rp 170.597.607.209,68

Saldo Aset Lain-lain selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp170.597.607.209,68 meningkat sebesar Rp512.805.638,41 atau sebesar 0,30% dari Saldo Aset Lain-lain selama Tahun 2024 sebesar Rp170.084.801.571,27.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp170.597.607.209,68 tersebut meliputi :

1. Aset lain-lain berupa Kas dibendahara pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan Berupa Kas Tekor 2014 sampai dengan 2025 adalah sebesar Rp3.212.723.562,00, Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 yang tidak dapat di jelaskan sampai tahun 2025 sebesar Rp905.209.692,75. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5. 75 Reklasifikasi Penambahan Sisa Kas Tekor Bendahara Pengeluaran yang masuk pada Aset lain-lain

SKPD	Kas Tekor (Rp)	Selisih tidak dapat dijelaskan (Rp)	Jumlah (Rp) sd. 2023	Keterangan	Setor di 2024	Sisa s.d 2024	Sisa s.d 2025
a	B	C	d=b+c	E	F	G=D-F	I=G-H
Tahun 2014							
Dinas Pendidikan	640.065.000,00	0,00	640.065.000,00	Kas tekor (hilang dicuri) TA 2014	0,00	640.065.000,00	640.065.000,00
Sekretaris DPRD	304.659.000,00	0,00	304.659.000,00	Kas tekor TA 2014	304.659.000,00	0,00	0,00
Sekretaris Daerah	2.107.270.328,00	15.903.329,00	2.123.173.657,00	Kas tekor tahun2 sebelumnya		2.123.173.657,00	2.123.173.657,00



SKPD	Kas Tekor (Rp)	Selisih tidak dapat dijelaskan (Rp)	Jumlah (Rp) sd. 2023	Keterangan	Setor di 2024	Sisa s.d 2024	Sisa s.d 2025
Bagian Umum – Setda	298.920.000,00	1.334.485,00	300.254.485,00	Sebesar Rp298.920.000,00 merupakan kelebihan pencairan TA 2013 utk kegiatan rehabilitasi rumah dinas kec. Seram Timur.	0,00	300.254.485,00	300.254.485,00
Inspektorat	129.660.000,00	1.349.352,00	131.009.352,00	Kas tekor TA 2013	0,00	131.009.352,00	126.009.352,00
Dinas Pariwisata	8.195.460,00	10.025.608,00	18.221.068,00	Kas Tekor TA 2013	0,00	18.221.068,00	18.221.068,00
RSUD Bula	13.196.813,00	0	13.196.813,00	Kas tekor tahun2 sebelumnya	13.196.813,00	0,00	0,00
Jumlah	3.501.966.601,00	28.612.774,00	3.530.579.375,00		317.855.813,00	3.212.723.562,00	3.212.723.562,00

Tabel 5. 76 Reklasifikasi Penambahan Sisa Kas Tekor Bendahara Pengeluaran yang masuk pada Aset lain-lain yang tidak dapat ditelusuri

NO	OPD	Saldo s.d per 31 desember 2025
1	UPTD Diknas Kecamatan Bula	1.859.871,00
2	UPTD Diknas Kecamatan Seram Timur	12.278.118,75
3	UPTD Diknas Kecamatan Pulau Gorom	1.398.186,00
4	UPTD Diknas Kecamatan Tutuk Tolu	20.928.964,00
5	UPTD Diknas Kecamatan Siwalalat	2.830.052,00
6	UPTD Diknas Kecamatan Kilmuri	1.044.410,00
7	UPTD Diknas Kecamatan Bula Barat	7.157.972,00
8	UPTD Diknas Kecamatan Gorom Timur	1.210.503,00
9	UPTD Diknas Kecamatan Pulau Panjang	10.523.139,00
10	UPTD Diknas Kecamatan Teor	2.563.689,00
11	UPTD Diknas Kecamatan Lian Fitu	70.772,00
12	Dinas Pekerjaan Umum	35.008.213,00
13	Bappeda	8.491.696,00
14	Dinas Perhubungan dan Infokom	101.750.484,00
15	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota	5.730.829,00
16	Dinas Sosial dan NAKERTRANS	6.138.617,00
17	Badan Kesatuan Bangsa Politik Linmas	61.741.370,00
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.307.197,00
19	Kecamatan Seram Timur	84.280.838,00
20	Kecamatan Bula Barat	32.484.648,00
21	Kecamatan Gorom Timur	28.199.782,00
22	Badan Ketahanan Pangan	5.005.000,00
23	Dinas Pertanian dan Peternakan	418.548.996,00
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	8.000.000,00
25	Dinas Pertambangan	17.656.346,00
JUMLAH		905.209.692,75

2. **Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri** sampai dengan 31 desember 2025 sebesar Rp69.043.546.801,00, ditambah dengan ditemukan adanya Selisih antara Neraca dan KIB pada bebrapa OPD sebesar Rp7.584.272.636,16 yang kemudian direklas ke Aset Lainnya,

Saldo Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri sebesar sebesar Rp69.043.546.801,00 tersebut merupakan Sisa hasil inventarisasi Aset Tetap



yang dilakukan oleh PT. SI pada tahun 2012), Dan Hasil Inventarisasi Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2025. Sisa saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp73.791.143.469,00 dan kemudian pada tahun 2024 terdapat mutasi kurang sebesar Rp 4.747.596.668,00, atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tahun 2024 yang ditemukan pada 2 (Dua) OPD yakni Dinas Kesehatan Sebesar Rp3.711.596.668,00, dan Dinas Perikanan sebesar Rp1.036.000.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5. 77 Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri

Nama OPD	Saldo 2024	Reklasifikasi Tahun 2025	Saldo s.d 2025
2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH	1.587.735.637,00	0,00	1.587.735.637,00
BADAN KESBANGPOLINMAS	292.564.006,00	0,00	292.564.006,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	831.438.824,00	0,00	831.438.824,00
DINAS KESEHATAN	39.571.723.228,00	3.711.596.668,00	35.860.126.560,00
DINAS NAKERTRANS	130.329.700,00	0,00	130.329.700,00
DINAS PERHUBUNGAN	28.698.856.540,00	0,00	28.698.856.540,00
DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM	833.620.200,00	0,00	833.620.200,00
DINAS KOPERASI	457.373.034,00	0,00	457.373.034,00
DINAS PERIKANAN	1.387.502.300,00	1.036.000.000,00	351.502.300,00
TOTAL	73.791.143.469,00	4.747.596.668,00	69.043.546.801,00

Tabel 5. 78 Selisih antara Neraca dan KIB pada OPD

No	Nama OPD	Jenis KIB	Selisih Nilai(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	KIB C	1.138.817.042,00
2	DINAS KESEHATAN	KIB B	2.256.656.211,00
3	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	KIB E	2.889.496.214,92
		KIB C	974.393.068,24
4	SEKRETARIAT DAERAH	KIB C	324.910.100,00
Jumlah			7.584.272.636,16

3. **Aset Lain-lain Berupa** Reklasifikasi Aset dari Aset tetap dan Belanja Barang Jasa Sebesar Rp946.073.699,76, yakni Reklasifikasi Aset tetap dan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan ke Aset Lainnya sebesar Rp946.073.699,76 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5. 79 Reklasifikasi Aset tetap dan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan

URAIAN/SKPD	NILAI REKLAS
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS PUPR	135.505.921,32
DINAS PRKP	101.184.912,28
BPBD	25.391.148,18
JUMLAH	262.081.981,78
Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS KOPERASI	7.283.962,46
DINAS PENDIDIKAN	300.948.309,05
DINAS PERHUBUNGAN	7.364.420,95
DINAS PUPR	43.092.962,85
JUMLAH	358.689.655,31
Reklasifikasi Gedung Bangunan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS PENDIDIKAN	89.867.171,45
Reklasifikasi Beban Barjas dari Pemeliharaan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
BARANG DAN JASA	235.434.891,22
JUMLAH SALDO	946.073.699,76

4. **Aset Lain-lain** Berupa Reklasifikasi Aset Tetap yang Akan Dihilahkan, atau Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah) sebesar Rp88.075.054.557,80 yang terdiri dari Jumlah Aset sebesar Rp182.098.350.077,46 dan Penyusutanya sebesar Rp94.023.295.519,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 80 Reklasifikasi Aset Tetap yang Akan Dihilahkan, atau Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
EX. DINAS PERTAMBANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
DINAS PERTANIAN	19.030.445.201,00	8.180.398.172,85	10.850.047.028,15
DINAS PUPR	43.223.778.909,00	19.262.181.377,85	23.961.597.531,15
EX. DINAS KEHUTANAN	715.400.000,00	303.964.700,00	411.435.300,00
EX. DINAS PERTAMBANGAN	14.543.978.464,00	10.058.507.452,00	4.485.471.012,00
JUMLAH	77.513.602.574,00	37.805.051.702,70	39.708.550.871,30
Reklasifikasi Gedung Bangunan ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
DINAS PENDIDIKAN	55.283.329.870,45	34.521.100.830,25	20.762.229.040,20
DINAS PERTANIAN	7.475.000,00	2.990.000,00	4.485.000,00



SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
DINAS PRKP	2.553.319.844,00	479.203.089,30	2.074.116.754,70
DINAS PUPR	30.363.344.459,00	10.739.450.862,40	19.623.893.596,60
EX. DINAS KEHUTANAN	4.026.465.500,00	2.245.371.925,00	1.781.093.575,00
EX. DINAS PERTAMBANGAN	3.294.039.000,00	1.994.820.610,00	1.299.218.390,00
JUMLAH	95.527.973.673,45	49.982.937.316,95	45.545.036.356,50
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
EX. DINAS KEHUTANAN	4.907.925.500,00	4.907.925.500,00	-
EX. DINAS PERTAMBANGAN	1.307.381.000,00	1.307.381.000,00	-
JUMLAH	6.215.306.500,00	6.215.306.500,00	-
Koreksi untuk pengakuan Utang Belanja dan Reklasifikasi dari Beban Jaskon pada KDP untuk diatribusi biaya perolehan			
DINAS PUPR	1.551.552.580,00	-	1.551.552.580,00
DINAS PENDIDIKAN	1.269.914.750,00	-	1.269.914.750,00
JUMLAH	2.821.467.330,00	-	2.821.467.330,00
JUMLAH SALDO	182.098.350.077,46	94.023.295.519,65	88.075.054.557,80

5. **Aset Lain-lain Berupa Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat** sebesar Rp193.915.621,80, yakni Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2025) sebesar Rp193.915.621,80 yang terdiri dari Aset tetapnya sebesar Rp46.495.189.483,82 dan Penyusutanya sebesar Rp46.301.273.862,02 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 71
Tabel 5. 81 Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2025)

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2024)			
DINAS PRKP	199.269.126,00	6.642.304,20	192.626.821,80
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain - Aset Rusak/Usang (Tidak Diketahui Fisiknya - untuk ditelusuri)			
BADAN KESBANGPOL	610.798.374,00	610.798.374,00	-
BAPPEDA	695.350.000,00	695.350.000,00	-
BKPSDM	583.981.378,00	583.981.378,00	-
BPBD	748.340.587,00	748.340.587,00	-
DINAS KESEHATAN	5.193.426.906,00	5.193.426.906,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	742.176.300,00	742.176.300,00	-
DINAS NAKERTRANS	1.096.758.600,00	1.096.758.600,00	-
DINAS PEMDES	2.279.184.694,00	2.279.184.694,00	-
DINAS PENDIDIKAN	8.284.225.100,00	8.284.225.100,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	5.126.991.200,00	5.126.991.200,00	-
DINAS PERIKANAN	96.457.600,00	96.457.600,00	-
DINAS PPKB	138.400.000,00	138.400.000,00	-
DINAS PTSP	448.200.000,00	448.200.000,00	-
DINAS SATPOL PP	609.972.900,00	609.972.900,00	-
DINAS SOSIAL	188.784.000,00	188.784.000,00	-



SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
INSPEKTORAT	73.500.000,00	73.500.000,00	-
KECAMATAN BULA	133.192.500,00	133.192.500,00	-
KECAMATAN BULA BARAT	58.650.000,00	58.650.000,00	-
KECAMATAN GOROM TIMUR	42.000.000,00	42.000.000,00	-
KECAMATAN KIAN DARAT	38.500.000,00	38.500.000,00	-
KECAMATAN KILMURI	94.000.000,00	94.000.000,00	-
KECAMATAN PULAU GOROM	20.000.000,00	20.000.000,00	-
KECAMATAN PULAU PANJANG	43.250.000,00	43.250.000,00	-
KECAMATAN SERAM TIMUR	33.100.000,00	33.100.000,00	-
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	6.500.000,00	6.500.000,00	-
KECAMATAN SIWALALAT	122.451.328,00	121.806.928,00	644.400,00
KECAMATAN TELUK WARU	58.500.000,00	58.500.000,00	-
KECAMATAN TEOR	37.000.000,00	37.000.000,00	-
KECAMATAN TUTUK TOLU	67.700.000,00	67.700.000,00	-
KECAMATAN WAKATE	4.000.000,00	4.000.000,00	-
KECAMATAN WERINAMA	4.922.000,00	4.277.600,00	644.400,00
RSUD BULA	4.591.752.200,00	4.591.752.200,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	11.847.057.855,00	11.847.057.855,00	-
SEKRETARIAT DEWAN	2.176.796.835,82	2.176.796.835,82	-
JUMLAH	46.295.920.357,82	46.294.631.557,82	1.288.800,00
JUMLAH SALDO	46.495.189.483,82	46.301.273.862,02	193.915.621,80

5.3.6. PROPERTI INVESTASI

Rp1.789.197.025,00

Saldo Properti Investasi per 31 desember 2025 adalah sebesar Rp1.789.197.025,00 menurun sebesar Rp428.374.140,00 atau turun sebesar 19,32% dari Saldo Properti Investasi per 31 desember 2024 sebesar Rp2.217.571.165,00, yang terdiri dari :

5.3.6.1. Properti Investasi

Rp4.964.328.500,00

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki Aset tidak lancar berupa Properti Investasi per 31 desember 2025 senilai Rp4.964.328.500,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 82 Rincian Properti Investasi Tahun 2025

OPD	NAMA BARANG	TAHUN ROLEHAN	TOTAL
SEKRETARIAT DAERAH	Gedung Olah Raga	2014	909.550.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Timbunan	2015	102.904.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	Rabat	2015	195.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Lantai	2015	243.750.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Paving Blok	2017	220.000.000,00



OPD	NAMA BARANG	TAHUN ROLEHAN	TOTAL
DINAS KESEHATAN	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2009	1.811.360.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	99.567.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	198.978.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	199.221.000,00
DINAS PRKP	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	2019	983.998.000,00
JUMLAH			4.964.328.500,00

5.3.6.2. Akumulasi Penyisihan Investasi Properti**Rp(3.175.131.475,00)**

Penyusutan Properti Investasi per 31 desember 2025 adalah senilai (Rp3.175.131.475,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 83 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025

OPD	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL	PENYUSUTAN 2025	SALDO AKHIR 2025
SEKRETARIAT DAERAH	Gedung Olah Raga	2014	909.550.000,00	-545.730.000,00	363.820.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Timbunan	2015	102.904.500,00	-56.597.475,00	46.307.025,00
SEKRETARIAT DAERAH	Rabat	2015	195.000.000,00	-107.250.000,00	87.750.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Lantai	2015	243.750.000,00	-134.062.500,00	109.687.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	Paving Blok	2017	220.000.000,00	-99.000.000,00	121.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2009	1.811.360.000,00	-1.539.656.000,00	271.704.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	99.567.000,00	-69.696.900,00	29.870.100,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	198.978.000,00	-139.284.600,00	59.693.400,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	199.221.000,00	-139.454.700,00	59.766.300,00
DINAS PRKP	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	2019	983.998.000,00	-344.399.300,00	639.598.700,00
JUMLAH			4.964.328.500,00	-3.175.131.475,00	1.789.197.025,00

5.3.7. KEWAJIBAN**Rp2.247.662.570,00**

Saldo kewajiban pemerintah Daerah Per 31 desember 2025 adalah sebesar Rp 2.247.662.570,00 meneurun sebesar Rp7.904.889.660,29 atau turun sebesar 77,86% dari Saldo kewajiban Per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp10.152.552.230,29 yang terdiri dari :

5.3.7.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**Rp2.247.662.570,00****1.1.1. Utang PFK 2025 sebesar Rp290.138.740,00, terdiri dari :**

- a. Utang PFK Bendahara Pengeluaran sebesar Rp40.138.290,00
- b. Utang PFK Pihak Ke Tiga sebesar Rp243.711.962,00



c. Utang PFK Gaji (PPh 21) sebesar Rp6.288.568,00

1.1.2. Utang Bunga Rp0,00

1.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0,00

1.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

1.1.6. Utang Beban Pegawai samapai Tahun 2025 Sebesar
Rp522.653.500,00, diantaranya :

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp5.289.500,00
2. Tambahan Penghasilan (TAMSIL) sebesar Rp517.364.000,00

1.1.7. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp1.434.870.330,00

merupakan hutang atas pembayaran kepada pihak pelaksana kegiatan (Pihak ke 3) yang telah menyelesaikan pekerjaan Kontruksi 100% ydan dibuktiksn dengan BAST pekerjaan, namun 5% belum dibayakan Pemerintah Daerah .

5.3.7.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Rp0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau belum ada Kewajiban Jangka Panjang yang disajikan pada Neraca. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Tahun 2025 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang baik kepada Pemerintah Pusat maupun Lembaga Keuangan Bank (LKB

5.3.8. EKUITAS

Rp1.535.664.088.765,00

Saldo Ekuitas Sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.535.664.088.765,00 menurun sebesar Rp85.901.198.293,35 atau turun 5,30% dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.621.565.287.058,35

5.3.9. JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Rp1.537.911.751.335,00

Saldo Kewajiban Dan Ekuitas Dana pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2025 adalah berjumlah Rp1.537.911.751.335,00, menurun sebesar Rp93.806.087.953,64 atau turun sebesar 5,75% dari Saldo Kewajiban Dan Ekuitas Dana pre 31 desember 2024 sebesar Rp1.631.717.839.288,64.

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas pemerintah per 31 Desember 2025, berupa kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan selisih antara nilai aset dengan kewajiban.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1. PENDAPATAN LO

Rp762.313.340.114,85

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp762.313.340.114,85 mengalami penurunan sebesar Rp227.976.946.276,25 atau turun 23,02% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp990.290.286.391,10, realisasi pendapatan - LO tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Rincian Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	23.423.620.185,85	16.463.221.587,55	6.960.398.598,30	42,28
Pendapatan Transfer – LO	720.596.900.634,00	920.337.876.296,00	-199.740.975.662,00	-21,7
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	18.292.819.295,00	53.489.188.507,55	-35.196.369.212,55	-65,8
JUMLAH	762.313.340.114,85	990.290.286.391,10	-227.976.946.276,25	-23,02

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah LO

Rp23.423.620.185,85

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp23.423.620.185,85 mengalami peningkatan sebesar Rp6.960.398.598,30 atau meningkat sebesar 42,28% jika dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp16.463.221.587,55

Tabel 5. 85 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.193.333.505,14	6.993.616.582,00	1.199.716.923,14	17,15
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.341.331.698,00	1.358.914.500,00	- 17.582.802,00	17,15
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.517.696.726,00	4.786.600.370,00	1.731.096.356,00	36,17
Lain-Lain PAD yang Sah -	7.371.258.256,71	3.324.090.135,55	4.047.168.121,16	121,75



LO				
JUMLAH	23.423.620.185,85	16.463.221.587,55	6.960.398.598,30	42,28

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO **Rp8.193.333.505,14**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp8.193.333.505,14 mengalami peningkatan sebesar Rp1.199.716.923,14 atau naik sebesar 42,28% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.993.616.582,00. Realisasi Pendapatan Pajak - LO Tahun 2025, diperoleh dari realisasi pajak daerah LRA 2025 sebesar Rp7.446.428.257,39 ditambah dengan selisih antara Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp746.905.247,75

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah **Rp1.341.331.698,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp1.341.331.698,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.582.802,00 atau turun sebesar 1,15% dari Saldo Pendapatan Retribusi LO 2024 sebesar Rp1.358.914.500,00. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 diperoleh dari Realisasi Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.341.331.698,00.

5.5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **Rp6.517.696.726,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - LO Tahun 2025 Sebesar Rp6.517.696.726,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.731.096.356,00 atau naik sebesar 1,29% dari Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - LO Tahun 2024 Sebesar Rp4.786.600.370,00, yang diperoleh pendapatan Deviden Pemerintah daerah terhadap Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku Maluku.

5.5.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO **Rp7.371.258.256,71**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp7.371.258.256,71 mengalami peningkatan sebesar Rp4.047.168.121,16 atau sebesar 36,17% dari Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp3.324.090.135,55,. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO Tahun 2025 tersebut diperoleh dari Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp7.397.263.576,71 ditambahkan dengan selisih Piutang Pendapatan Lain Lain PAD sebesar Rp (26.005.320,00)

5.5.1.2.1. Pendapatan Transfer-LO **Rp720.596.900.634,00**

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun



2025 sebesar Rp720.596.900.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp199.740.975.662,00 atau turun 21,70% dari Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 sebesar Rp920.337.876.296,00, pendapatan Transfer – LO diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO di tambah dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 86 Rincian Pendapatan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	705.671.188.100,00	901.526.366.468,00	-195.855.178.368,00	-21,72
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	14.925.712.534,00	18.811.509.828,00	-3.885.797.294,00	-20,66
JUMLAH	720.596.900.634,00	920.337.876.296,00	-199.740.975.662,00	-21,70

5.5.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp705.671.188.100,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO (Berupa Dana Perimbangan) Tahun 2025 sebesar Rp705.671.188.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp195.855.178.368,00 atau turun sebesar 21,172% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 sebesar Rp901.526.366.468,00, sebagaimana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Per 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Perimbangan - LO	705.671.188.100,00	726.420.379.468,00	-20.749.191.368,00	-2,85
Dana Desa – LO	0,00	164.054.309.000,00	-164.054.309.000,00	-100
Dana Insentif Daerah – LO	0,00	11.051.678.000,00	-11.051.678.000,00	-100
JUMLAH	705.671.188.100,00	901.526.366.468,00	-195.855.178.368,00	-21,72

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dana Desa tidak lagi tercatat pada tahun 2025, karena menurut BULTEK 21 Laporan Operasional (LO) tidak lagi mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa.

5.5.1.2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat(Dana Perimbangan)-LO Rp705.671.188.100,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO (Dana Perimbangan) Tahun 2025 sebesar Rp705.671.188.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.749.191.368,00 atau turun sebesar 2,85% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO (Dana Perimbangan) Tahun 2024 sebesar Rp726.420.379.468,00. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO (Dana Perimbangan) Tahun 2025 tersebut diperoleh dari



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Dana Perimbangan) Tahun 2025 sebesar 705.671.188.100,00, rincian pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 88 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Per 2025 dan 2024

Uraian	SALDO LRA TA 2025 (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO LO 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.396.385.556,00	0,00	29.999.363.000,00	-5602977444,00	-18,68
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	535.518.624.286,00	0,00	538.829.091.592,00	-3310467306,00	-0,61
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.116.022.170,00	0,00	44.809.728.325,00	-22693706155,00	-50,64
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	123.640.156.088,00	0,00	112.658.526.551,00	10981629537,00	9,75
Jumlah	705.671.188.100,00	0,00	726.296.709.468,00	-20625521368,00	-2,84

5.5.1.2.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp 0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO (Dana Desa)Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak dapat disajikan di LO karena menurut BULTEK 21 Laporan Operasional (LO) tidak lagi mencatat Pendapatan Transfer Pemerinah Pusat – Dana Desa. Di tahun 2025, sengkakan tahun 2024 masih di sajikan di LO dan terealisasi sebesar Rp164.054.309.000,00

5.5.1.2.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp 0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO (Dana Insentif Fiskal)Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau terealisasi 0,00% sedangkan Saldo Transfer Pemerinah Pusat (Dana Insentif Fiskal) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp11.051.678.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO (Dana Insentif Fiskal)Tahun 2025 sebesar Rp0,00 diperoleh dari Saldo Pendapatan Insentif Fiskal LRA.

5.5.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Rp14.925.712.534,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2025 sebesar Rp14.925.712.534,00 Nilai tersebut adalah Pendapatan Bagi Hasil LO 2025, menurun sebesar Rp3.885.797.294,00 atau turun 20,66% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 sebesar Rp18.811.509.828,00,

5.5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Rp18.292.819.295,00

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO tahun 2025 Sebesar Rp18.292.819.295,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.196.369.212,55 ata turn sebesar 65,80% dari Saldo L ain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO



Tahun 2024 sebesar Rp53.489.188.507,55, yng terdiri darai

5.5.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Rp00,00

Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan saldo Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp31.170.344.000,00

5.5.1.3.2 Pendapatan Lainnya- LO

Rp18.292.819.295,00

Pendapatan Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.292.819.295,00. Menerun sebesar Rp 4.026.025.212,55 atau turun sebesar 18,04% , rrealisasi Tahun 2025 tersebut di peroleh dari Pendapatan Lainnya LRA sebesar Rp Rp18.292.819.295,00.

5.5.2. BEBAN-LO

Rp 872.515.192.910,86

Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp872.515.192.910,86 menurun sebesar Rp23.224.270.132,48 atau turun sebesar 2,59% dari saldo Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp895.739.463.043,34 dengan rincian sesuai Tabel Berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Beban-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025 LO (Rp)	Realisasi 2024 LO (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN OPERASI-LO	813.959.176.685,86	836.062.277.601,34	-22.103.100.915,48	-2,64
BEBAN TRANSFER-LO	58.256.016.225,00	59.677.185.442,00	-1.421.169.217,00	-2,38
BEBAN LUAR BIASA-LO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
Jumlah	872.515.192.910,86	895.739.463.043,34	(23.224.270.132,48)	-2,59

5.5.2.1. BEBAN OPERASI LO

Rp819.668.857.638,12

Beban Opearsi -LO Tahun 2025 sebesar Rp819.668.857.638,12 menurun sebesar Rp22.103.100.915,48 atau turun sebesar 2,64% dari saldo Beban Operasi - LO tahun 2024 sebesar Rp836.062.277.601,34 dengan rincian sesuai Tabel Berikut:

Tabel 5. 90 Rincian Beban Operasi-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025 LO (Rp)	Realisasi 2024 LO (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	361.363.153.575,00	350.206.240.565,35	11.156.913.009,65	3,19
Beban Barang dan Jasa	251.288.005.512,25	254.952.868.895,53	- 3.664.863.383,28	-1,44
Beban Persediaan	3.684.389.416,55	3.542.220.412,77	142.169.003,78	4,01
Beban Subsidi	1.429.176.604,00	1.808.641.395,00	- 379.464.791,00	-20,98
Beban Hibah	24.140.175.635,00	55.318.332.643,00	- 31.178.157.008,00	-56,36



Beban Bantuan Sosial	13.026.906.770,60	11.305.847.786,81	1.721.058.983,79	15,22
Beban Penyisihan Piutang	406.106.105,51	240.799.872,68	165.306.232,84	68,65
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.621.263.066,94	158.687.326.030,20	- 66.062.963,26	-0,04
Jumlah	813.959.176.685,86	836.062.277.601,34	(22.103.100.915,48)	-2,64

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 5.5.2.1.1. Beban Pegawai LO** Tahun 2025 sebesar Rp361.363.153.575,00 nilai ini diperoleh dari Belanja Pegawai Tahun 2025 LRA sebesar Rp366.337.393.938,00 ditambah selisih Utang Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp522.653.500,00 dengan Utang Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp5.496.893.863,00
- 5.5.2.1.2. Beban Barang Jasa LO** tahun 2025 sebesar Rp251.574.065.712,25 nilai ini diperoleh dari Belanja Barang Jasa LRA tahun 2025 sebesar Rp254.106.201.805,95 ditambah adanya mutasi masuk beban di bayar dimuka sebesar Rp104.166.666,66, dan ditambah reklasifikasi belanja modal ke belanja barang dan jasa sebesar Rp112.108.050,00 di kurangi mutasi keluar belanja jasa kosutansi dan pengawasan yang diKapitalisasi ke belanja modal aset lainnya sebesar Rp2.651.302.760,00. Dikurangi Aset Swasta ke Persediaan sebesar Rp188.952.150,00
- 5.5.2.1.3. Beban Persediaan LO** tahun 2025 sebesar Rp3.684.389.416,55 diperoleh dari nilai Persediaan tahun 2024 sebesar Rp.23.521.751.052,32 dikurangi dengan nilai persediaan tahun 2025 sebesar Rp19.508.423.369,08
- 5.5.2.1.4. Beban Subsidi LO** Tahun 2025 sebesar Rp1.429.176.604,00 nilai ini diperoleh dari Belanja Subsidi LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.429.176.604,00
- 5.5.2.1.5. Beban Hibah LO** Tahun 2025 sebesar Rp24.140.175.635,00 nilai ini diperoleh dari Belanja Hibah LRA Tahun 2025 sebesar Rp24.140.175.635,00
- 5.5.2.1.6. Beban Bantuan Sosial LO** Tahun 2025 sebesar Rp13.026.906.770,60 nilai ini diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025 sebesar Rp13.026.906.770,60
- 5.5.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang – LO** Tahun 2025 sebesar Rp406.106.105,51 nilai ini diperoleh dari Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp(3.394.089.627,85) dan Tahun 2024 sebesar Rp(2.987.983.522,34)
- 5.5.2.1.8. Beban Penyisihan Dana Bergulir** Tahun 2025 Rp 0,00
- 5.5.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi LO** Tahun 2025 sebesar Rp154.096.403.093,20. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 5. 91 Rincian Beban LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025 dan 2024

Jenis Beban Penyusutan/Amortisasi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.276.275.337,08	26.960.072.469,41
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.208.939.728,00	39.992.487.777,16
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.277.684.525,64	82.824.704.708,65
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	516.996.660,22	600.803.049,00
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	68.262.091,00	67.552.162,80
Beban Penyusutan Properti Investasi	273.104.725,00	282.238.220,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	7.959.467.643,17
Jumlah	158.621.263.066,94	158.687.326.030,19

5.5.2.2. BEBAN TRANSFER LO

Rp58.256.016.225,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa LO Tahun 2025 sebesar Rp58.256.016.225,00, nilai tersebut diperoleh dari Transfer Pendapatan Lainnya ke Desa LRA sebesar Rp170.621.112.823 dikurangi dengan Pencatatan Dana Desa yang ditransfer Langsung ke Desa melalui Pemindahbukuan Dana Desa tidak dicatat pada Laporan Operasional sesuai dengan Bultek, sebesar Rp112.365.096.598,00

5.5.2.3. BEBAN LUAR BIASA-LO

Rp300.000.000,00

Beban luar Biasa LO tahun 2025 sebesar Rp300.000.000,00 nilai tersebut diperoleh dari belanja Tidak Terduga di LRA sebesar Rp300.000.000,00

5.2.2. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL

Rp(110.201.852.796,01))

Defisit LO tahun 2025 sebesar Rp(110.201.852.796,01) diperoleh dari Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp762.313.340.114,85 dikurangi dengan Beban LO tahun 2025 sebesar Rp 872.515.192.910,86



5.6.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu dengan rincian sebagai berikut.

5.6.2. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi **Rp44.140.300.704,91**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp44.140.300.704,91 mengalami penurunan sebesar Rp28.402.721.076,98 atau turun sebesar 39,15% dari Tahun 2024 yang realisasi sebesar Rp72.543.021.781,89 Saldo tersebut merupakan selisih lebih atas jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp874.101.268.281,10 dan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp829.960.967.576,19 Arus Kas Masuk dari Akitivitas Operasi bersumber dari penerimaan daerah, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi Daerah.

5.6.2.1. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar **Rp874.101.268.281,10**

Nilai tersebut terdiri dari :

- 5.6.2.1.1. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp7.446.428.257,39
- 5.6.2.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.341.331.698,00
- 5.6.2.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp6.517.696.726,00
- 5.6.2.1.4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp7.397.263.576,71
- 5.6.2.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2025 sebesar Rp24.396.385.556,00
- 5.6.2.1.6. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 sebesar Rp535.518.624.286,00
- 5.6.2.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 sebesar Rp145.756.178.258,00
- 5.6.2.1.8. Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2025 sebesar Rp112.365.096.598,00
- 5.6.2.1.9. Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.10. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp15.069.444.030,00 diperoleh dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi



- 5.6.1.1.11. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2025 Sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.12. Penerimaan Hibah 2025 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.13. Penerimaan Dana Darurat Tahun 2025 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.14. Penerimaan Lainnya tahun 2025 sebesar Rp18.292.819.295,00.

5.6.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp829.960.967.576,19

Nilai tersebut terdiri dari :

- 5.6.2.2.1. Pembayaran Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp366.337.393.938,00
- 5.6.2.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp254.106.201.805,59
- 5.6.2.2.3. Pembayaran Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp1.429.176.604,00
- 5.6.2.2.4. Pembayaran Hibah Tahun 2025 Sebesar Rp24.140.175.635,00
- 5.6.2.2.5. Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp13.026.906.770,60
- 5.6.2.2.6. Pembayaran Tak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp300.000.000,00
- 5.6.2.2.7. Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp170.621.112.823,00
- 5.6.2.2.8. Pembayaran Kejadian Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp0,00

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp(90.557.669.743,24)

Nilai tersebut diperoleh dari Arus Kas dari Arus Kas Aktivitas Investasi.

**5.6.2.1 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Ke
Rp90.557.669.743,24**

Arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan Tahun 2024 dari aktivitas Investasi sebesar Rp96.854.089.323,67), merupakan arus kas keluar dari aktivitas non keuangan yang bersumber dari belanja modal daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang diuraikan sebagai berikut:

- 5.6.2.1.1. Belanja Tanah Tahun 2025 sebesar Rp350.000.000,00
- 5.6.2.1.2. Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp19.536.887.395,67
- 5.6.2.1.3. Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp17.760.981.555,00



5.6.2.1.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar
Rp51.379.352.361,57

5.6.2.1.5. Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar
Rp1.530.448.431,00

5.6.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas Non anggaran tahun 2025 sebesar Rp0,00

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp(2.284.8256.897,33)

5.6.5 Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran tahun 2025 sebesar (2.284.8256.897,33) diperoleh dari :

5.6.2.2. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran sebesar
Rp48.040.769.362,25 terdiri dari :

- a. Penerimaan PFK Rp48.031.584.495,25
- b. Penerimaan Setoran pajak sisa PFK Periode sebelumnya
Rp9.184.867,00
- c. Penerimaan Setoran sisa UP GU TU Periode Sebelumnya
Rp0,00
- d. Sisa saldo UP TA sebelumnya Rp0,00

5.6.2.3. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran sebesar
Rp50.325.596.259,58 terdiri dari :

- a. Pengeluaran PFK Rp47.773.437.077,54
- b. Pengeluaran UP, GU, TU, TA .Berjalan UUDP sebesar Rp2.544.846.542,04
- c. Pengeluaran UP, GU, TU TA. Berjalan sebesar Rp7.312.640,00
- d. Sisa Saldo UP TA berkenaan sebesar Rp0,00

5.6.6 Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Selama Periode Rp(48.702.195.935,66)

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari keempat arus kas bersih yang terdiri dari arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 44.140.300.704,91 ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp(90.557.669.743,24) tambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 tambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp288.266.513,00.



5.6.7 Saldo Awal Kas BUD Bendahara Penerimaan Pengeluaran, Dana Bos dan JKN Rp69.107.444.455,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Akhir kas BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Selain BUD pada tahun 2025.

5.6.8 Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran, Dana Bos , BOK, dan Dana JKN Rp69.107.444.455,67

Jumlah tersebut merupakan akumulasi nilai saldo Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran, Kasa Dana BOS, Saldo Kas Dana BOK Salur dan JKN Tahun 2024 menjadi saldo Awal 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp64.606.269.284,74.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp11.875.000,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp163.466.476,22.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran PFK sebesar Rp9.184.867,00.
5. Kas Lainnya BOS sebesar Rp1.862.766.649,00.
6. Kas Lainnya JKN sebesar Rp 0,00
7. Kas Lainnya Kas Bank Bendahara (Selain BUD) BOK Salur Rp2.452.080.945,00.

5.6.9 Koreksi Saldo Kas Tahun Lalu Rp0,00

Koreksi atas Penggunaan SILPA Rp0,00 tahun lalu adalah Rp0,00

5.6.10 Saldo Akhir Kas Rp20.405.248.520,01

Jumlah Saldo akhir kas tersebut merupakan akumulasi nilai saldo Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran, Kasa Dana BOS, Saldo Kas Dana BOK Salur dan JKN Tahun 2024 menjadi saldo Awal 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp18.910.349.056,28.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp13.918.900,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.824.593,06.
4. Kas Lainnya BOS (Kas Bank) sebesar Rp73.979.582,67
5. Kas Lainnya JKN sebesar Rp 0,00
6. Kas Lainnya Kas Bank Bendahara (Selain PFK) BOK Salur Rp945.649.548,00.
7. Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran Rp290.138.740,00
8. Kas Lainnya Kas Bank Bendahara (Selain BUD) Rp95.388.100,00.



5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 2025 yakni terdiri dari :

5.5.1. Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp1.621.565.287.058,35

5.5.2. Surplus Defisit dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp (110.201.852.796,01)

5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp24.300.654.502,66 sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. 92 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	1.351.079.629,60	0,00
Koreksi Ekuitas – Piutang	601.747.527,25	0,00
Koreksi Ekuitas – Investasi	0,00	0,0098
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	27.349.481.170,55	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	(59.621.393,00)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban	(4.974.240.363,00)	(62.298.768.443,92)
Koreksi Ekuitas – Lainnya	(27.413.461,74)	(36.103.674.729,00)
Jumlah	7.582.284.274,68	(98.462.064.565,92)

1. Koreksi Ekuitas - Aset Lancar sebesar Rp1.351.079.629,60 adalah korekasi yang timbul akibat adanya koreksi perhitungan Kas, dan lainya pada aset lancar seperti:
 - a. Setoran Kas Bendahara sebesar Rp163.466.476,22
 - b. Setoran Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.801.233,71
 - c. Setoran Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp9.184.867,00
 - d. Sisa Kas BOK Puskesmas tahun sebelumnya yang tidak dapat digunakan/tidak bisa di hitung sebagai saldo awal sebesar Rp2.452.080.945,00
 - e. Saldo Rekening yang pada Kas Dana BOS Sekolah Tahun 2025 Sebesar Rp 73.979.582,67
 - f. Dikurangi Saldo Dana BOS Sekolah yang telah Dibuktikan sebesar Rp1.349.433.475,00
2. Koreksi Ekuitas - Piutang sebesar Rp 601.747.527,25 adalah Setoran Piutang Tahun Sebelumnya
3. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap sebesar Rp(620.237.133,50) adalah Belanja Aset



yang Masuk Sebagai Ekstra Konfitable dan yang tidak termasuk Aset tetap. Ditambah Reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap sebesar Rp27.969.718.304,05

4. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Sebesar Rp(124.005.000,00) adalah pengurangan Ekuitas atas Aset Lainnya yang telah disetor ke kas daerah yaitu dana TDF sebesar Rp(123.670.000,00) dan Sisa kas Dana Bergulir sebesar Rp(335.000,00)
5. Koreksi Ekuitas Kewajiban sebesar Rp4.974.240.363,00 adalah koreksi Setoran Hutang Gaji Tapera, TKG, TPG dan Tamsil Tahun sebelumnya sebesar Rp4.974.240.363,00. Dan Korekasi Kesalahan perhitungan Beban Pegawai sebesar Rp(9.948.480.726,00

5.5.4. Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp 1.535.540.083.765,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

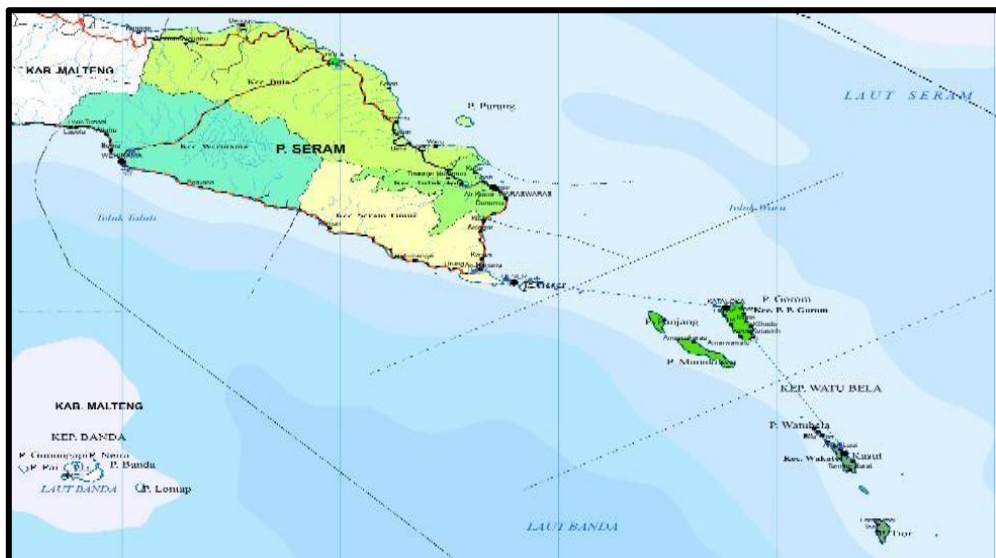
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155).

6.1 LETAK GEOGRAFIS

Secara Astronomi Kabupaten Seram Bagian Timur terletak antara koordinat $1290^{\circ} 50'00''$ - $1310 50' 00''$ Bujur Timur dan $020^{\circ} 50'00''$ - $040^{\circ} 50'00''$ Lintang Selatan, dan berdasarkan posisi Geografisnya Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 6. 1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur



Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan Kabupaten Bahari dengan Luas Wilayah laut mencapai $14.877.771 \text{ Km}^2$ dan Luas Wilayah Daratan $5.779.123 \text{ Km}^2$, terdiri dari dataran Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Kilmury, Werinama dan Siwalalat yang berada di Pulau Seram dan pulau-pulau terpisah



sebanyak 49 pulau. Wilayah Seram Bagian Timur mempunyai 132 aliran sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur. dari 50 Pulau, sungai/kali sebanyak 79 buah yang terdapat di 15 Kecamatan. Sedangkan daratan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. 1 Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Pulau Gorom	Kataloka	91,303
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58
3	Teor	Wermaf Kampung Baru	23,41
4	Gorom Timur	Miran	29,29
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53
6	Seram Timur	Geser	73,35
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09
8	Kilmury	Kilmury	837,62
9	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37
10	Kian Darat	Watu-watu	129,23
11	Ukar Sengan	Urung	42,33
12	Werinama	Werinama	993,84
13	Siwalalat	Atiahu	847,19
14	Bula	Bula	643,36
15	Bula Barat	Waiketam	880,29
16	Teluk Waru	Waru	669,67
Kabupaten Seram Bagian Timur			5.779,123

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2026

Tabel 6. 2 Jarak dari Ibu kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Seram Bagian Timur (km)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Pulau Gorom	Kataloka	177,93
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	244,58
3	Teor	Wermaf Kampung Baru	230,40
4	Gorom Timur	Miran	145,20
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	130,00
6	Seram Timur	Geser	118,68
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	94,43
8	Kilmury	Kilmury	58,80
9	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	80,00
10	Kian Darat	Watu-watu	71,00
11	Werinama	Werinama	102,00
12	Siwalalat	Aitahu	65,40
13	Bula	Bula	0,89
14	Bula Barat	Waiketam	40,00
15	Teluk Waru	Waru	36,00

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025



Tabel 6. 3 Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Banyaknya Pulau		
		Didiami dan Ada Usaha	Tidak Didiami	Jumlah
1	Pulau Gorom	3	8	11
2	Kesui Watubela	2	3	5
3	Teor	1	1	2
4	Gorom Timur	1	1	2
5	Pulau Panjang	1	-	1
6	Seram Timur	9	18	27
7	Tutuk Tolu	1	1	2
8	Kilmury	1	2	2
9	Siritaun Wida Timur	1	-	1
10	Kian Darat	1	1	2
11	Werinama	1	-	1
12	Siwalalat	1	-	1
13	Bula	1	-	1
14	Bula Barat	1	2	2
15	Teluk Waru	2	-	2

Sumber data : Bappeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur

6.2 PROFIL PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA EKSEKUTIF

6.2.1 Lembaga Eksekutif

Tabel 6. 4 Nama – Nama Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2003 – 2025

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Bupati/Pj Bupati	Drs. A.G WOKANUBUN	2003 – 2005
	H. ABDULLAH VANATH, SOS. MMP	2005 - 2016
	HENDRI FAR FAR, SH. MH	2015 - 2016
	ABDUL MUKTI KELIOBAS	2016 – 2025
	Drs. HADI, M,Si	2020 - 2021
	Drs. DJALALUDIN SALAMPESSY M,Si	2024 - 2025
	FACHRI H. ALKATIRI, LC, M.Si	2025 - 2030
Wakil Bupati	Drs. SITI UMURIAH SURWAKY	2005 - 2016
	FACHRI H. ALKATIRI, LC, M.Si	2016 – 2020
	IDRIS RUMALUTUR, SE	2021 – 2025
	M. MIFTAH T. R WATTIMENA, S,Ip, MA	2025 - 2030
Sekretaris Daerah	Drs. HI. A.R. RUMALUTUR	2003 - 2010
	Dr. SYSRIF MAKMUR, M.Si	2011 - 2021
	Drs. JAFAR KWAIRUMARATU	2021- 2024
	MIRNAWATI DERLEN, SP,M,Si	2024
	Drs. A.Q. AMAHORU, M.Si	2025



Dalam tahun anggaran 2025 Bupati Seram Bagian Timur dijabat oleh Bapak FACHRI H. ALKATIRI, LC, M.Si dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur adalah Bapak M. MIFTAH T. R WATTIMENA, S.Ip, MA dibantu oleh Pj. Sekretaris Daerah yang dijabat Bapak Drs. A.Q. AMAHORU, M.Si. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai Tahun 2025 terdiri dari 93 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat	:	2	Unit
- Bagian	:	9	Unit
- Badan/Satuan	:	6	Unit
- Dinas	:	21	Unit
- Inspektorat	:	1	Unit
- Kantor	:	15	Unit
- UPTD	:	15	Unit
- RSU	:	2	Unit
- Puskesmas	:	22	Unit

Pembentukan satuan kerja perangkat daerah tersebut mengacu kepada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kondisi yang demikian merupakan salah satu kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama masalah aksesibilitas, keterisolasian dan keterbelakangan.

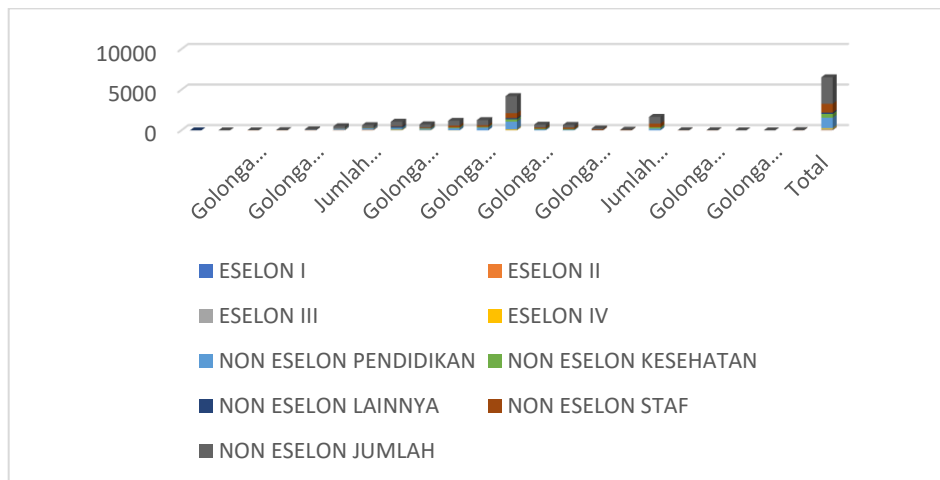
Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 3.276 orang yang diuraikan menurut jabatan, golongan dan pendidikan sebagai sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 6. 5 Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara Pergolongan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON				
	I	II	III	IV	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA (fungsional peralihan)	STAF	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Golongan IV/e									0
Golongan IV/d		1							1
Golongan IV/c		8			1			1	10
Golongan IV/b		12	15	1	23	4		5	60
Golongan IV/a		3	86	6	105	18	3	27	248
Jumlah Golongan IV	0	24	101	7	129	22	3	33	319
Golongan III/d			27	58	202	38	144	63	532
Golongan III/c			6	31	165	56	16	92	366
Golongan III/b				4	256	92		234	586
Golongan III/a					332	88		205	625
Jumlah Golongan III	0	0	33	93	955	274	160	594	2109
Golongan II/d					115	88		146	349
Golongan II/c					85	76		170	331
Golongan II/b					14			98	112
Golongan II/a								33	33
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	214	164	0	447	825
Golongan I/d								7	7
Golongan I/c								3	3
Golongan I/b									0
Golongan I/a									0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Total	0	24	134	100	1298	460	163	1084	3263

Grafik 6. 1. Perkembangan Jumlah Aparatur Sipil Negara Pergolongan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025



Sumber . Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Seram Bagian Timur



Jumlah sebanyak 3.263orang tersebut tidak termasuk pegawai harian lepas dan pegawai musiman yang diperkerjakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

6.2.2 Lembaga Legeslatif

Pada tahun 2024 anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari 11 parpol yang terdiri dari PKS, GOLKAR, GERINDRA, PDI-P, PAN, PPP, HANURA, PKN, PKB, DEMOKRAT.

Tabel 6. 6 Nama – Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 – 2025

Tahun Pemilu	Nama	Jabatan
2005 – 2009	ABDUL MUKTI KELIOBAS	Ketua
	JAMALUDIN AREY, S.Ag	Wakil Ketua
	M. YUSUF PAITAHA, SP	Wakil Ketua
2009 – 2015	M. RAMLY, SH	Ketua
	ABDUL MUKTI KELIOBAS	Wakil Ketua
	M. YUSUF PAITAHA, SP	Wakil Ketua
2014 – 2019	AGIL RUMAKAT, SP	Ketua
	Ir. BAHASOAN FARIDA	Wakil Ketua
	A. KELILAUW, S.Pd	Wakil Ketua
2019 - 2024	NOAF RUMAU, S.Ag	Ketua
	AGIL RUMAKAT, SP	Wakil Ketua
	AHMAD VOTH, S, Sos	Wakil Ketua
2024 - 2029	RISMAN SIBOALAMO, S.E	Ketua
	HUSEIN KELILAUW, SE	Wakil Ketua
	JAZALI KELILIWAR, S,PdI	Wakil Ketua

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Tabel 6. 7 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024

Partai Politik	Anggota		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
PKS	2	-	2
GOLKAR	2	1	3
GERINDRA	2	-	2
PDI-P	3	-	3
PAN	1	1	2
NASDEM	3	-	3
PPP	2	-	2
HANURA	2	-	2
PKN	1	-	1
PKB	3	-	3
DEMOKRAT	2	-	2
Jumlah	23	2	25

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025



Jumlah anggota DPRD di kabupaten Seram Bagian Timur yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 2 orang dengan kata lain berjumlah seluruhnya 25 orang.

6.3 VISI DAN MISI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu dua puluh tahun (Tahun 2005 – 2025) adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”

Visi di atas, pada hakekatnya menjelaskan tentang niat dan tekad segenap komponen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk merencanakan dan melaksanakan suatu proses pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan potensi lokal dalam semangat ***”Ita Wotu Nusa”*** (mari kita membangun negeri). Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang rukun dan aman merupakan prasyarat mutlak bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang maju dan mandiri.

Merujuk pada visi di atas, maka Misi RPJP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 adalah:

- Pertama : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan
- Kedua : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan
- Ketiga : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat



pada misi.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut adalah:

- a. Membina tali silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat Seram Bagian Timur dengan tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya lokal;
- b. Terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur dan terbuka dalam menunjang pelayanan publik;
- c. Peningkatan kualitas SDM Seram Bagian Timur yang tinggi ilmu, tinggi iman, dan taqwa dilandasi nilai-nilai kurukunan antar umat beragama;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur;
- e. Peningkatan kondisi keamanan dan penegakan hukum di Seram Bagian Timur.

6.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal diketahui, kemudian disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas..

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program unggulan kepala daerah, yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau kesinambungannya (performance maintenance)

6.4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana



Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021–2026 merupakan aktualisasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi objektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, dan mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan Tema **“Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan tema tersebut, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;				
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	B
		Birokrasi (ASN) yang profesional		2,51-3,25
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)		Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B
		Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif		>60 – 70
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN		Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	IPK dan IRB	AB
				>60 – 70
MISI 2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN				



TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
MASYARAKAT;				
		Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	
				5,78
Pengembangan Daya Saing Daerah		Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		berkelanjutan		34,2
		Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	75,6
		Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan		
		daerah dan peningkatan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan(SPPH)	100
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	4,17
		kelembagaan		0,234
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah,		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	
				50,23
		Meningkatkan ketahanan	Wirausahaan	10,57
		ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat		
MISI 3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;				
		Mewujudkan Kemandirian Seni		
		Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal		



TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		Masyarakat		
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat		Pengembangan Senin Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	Gini Ratio	Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan		87,6
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat		
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM		
		Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda		tinggi
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas		73,9
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan disiplin dan penegakan protocol kesehatan				
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
		Memperkuat pelaksanaan		87,6
		perlindungan sosial dan jaminan kesehatan		
MISI 4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;				
		Meningkatnya kapasitas dan daya	Indeks Kualitas	



TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		dukung lingkungan	Lingkungan Hidup	
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional		(IKLH)	77,3-815
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	
				50,23
		Menguatkan perencanaan industri daerah	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	
				4,17
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD		0,234
		Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Demokrasi (ID)	100
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran		Indeks Rasa Aman (IRA)	93
		Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif,		
		berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	55,5
			Wirausahaan	10,57
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Presentase Kerja sama	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,5
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	125
MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;				
		Mewujudkan		



TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		konektivitas antara wilayah		
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai		
		Presentase panjang jalan	Indeks Konektivitas Daerah (IKD)	
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah		kabupaten dan peningkatan status jalan		38,5
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar		
Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau dan/atau kepulauan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal,	Tingkat Aksesibilitas	55,5
		berdaya saing, dan memberikan nilai tambah		
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung		tinggi
MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT;				
			IPKM	76,25
		Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable	AHH	73,7
		Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	Gini Rasio	0,234
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui	Presentase Penduduk Miskin		IKLH	77,3-81,5



TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan				
			IPK dan IRB	>60 – 70
			PDRB	4,17
			IRA	93
			IKID	50,23
			ID	100

6.4.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut.

6.4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 mengacu dan selaras dengan Tema dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema RKP Tahun 2025 yaitu “***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***”.

Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP tahun anggaran 2025 menetapkan lima agenda pembangunan, yakni :

- Transformasi sosial,
- Transformasi ekonomi,
- Transformasi tata kelola, supremasi hukum,
- Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta
- Ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi.

Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator

pembangunan tahun 2025, Yang meliputi :

- a. pertumbuhan ekonomi 5,3-5,8 persen,
- b. tingkat kemiskinan 7-8 persen,
- c. tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen,
- d. rasio gini 0,379-0,382,
- e. indeks modal manusia 0,56,
- f. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen,
- g. indikator nilai tukar petani 113- 115, dan
- h. nilai tukar nelayan 104-100.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pembangunan pusat dan daerah. Maka dari itu, ditetapkan pula target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah.

6.4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini berdasarkan pada Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2025. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6.4.2.3. Prioritas Pembangunan Seram Bagian Timur Tahun 2025

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 adalah “*Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur*”. Tema Pembangunan Tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan

RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan*”.

a. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tahapan dan tata cara analisis isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2025, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada timbulnya permasalahan pembangunan. Melalui identifikasi yang cermat, teliti dan komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, diharapkan ditemukan berbagai isu strategis yang pemecahannya memerlukan langkah pendekatan yang terintegrasi satu dengan yang lain .

Sesuai dengan kondisi tersebut maka Perumusan isu strategis pembangunan tahun 2025 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing;
- 2) Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektivitas Antar Wilayah;
- 4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 5) Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025. adalah “*Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan*”.

Tema Pembangunan Tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”*

Agar pembangunan dapat berjalan terarah dan dapat menjawab kebutuhan daerah, ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPJMD tahun 2021-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2025.

Maka Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif;
2. Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif;
6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dapat dirumuskan dalam table sebagai berikut:

Tabel 6. 9 Keterkaitan antara Isu Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif



No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
2.	Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran
3.	Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah	Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
5.	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Tabel 6. 10 Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan - Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan Kesehatan - Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif Tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan
2.	Infrastruktur Berkualitas	Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	- Peningkatan Aksesibilitas dan infrastruktur kewilayahan Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3.	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	- Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perluasan lapangan kerja - Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif - Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Sumber. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

C. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan 2 (dua) komponen penting



yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Informasi penting yang perlu dijelaskan sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi adalah bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Olehnya itu rumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Sasaran dan Prioritas Tahun 2025 dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. 11 Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

N o	Prioritas Daerah	Sasara n	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegia tan Priorit as
					Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/ko ta
	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan					



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif					
						Pengembangan prasarana pertanian
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian
			Peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk unggulan daerah	Pengembangan sarana prasarana produksi dan mutu produk unggulan daerah		Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota
1						
					Pengelolaan perikanan tangkap	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
					Pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
						Pengelolaan pembudidayaan ikan
						Pembinaan mutu dan keamanan hasil



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
					Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata	Meningkatkan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata		
					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
					Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan			Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan		Pengelolaan pendidikan sekolah dasar
		Meningkatnya pelayanan dasar yang berkualitas				
2			Meningkatnya mutu pendidikan dasar		Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
				kompetensi guru dan		Pengelolaan pendidikan Anak



N o	Prioritas Daerah	Sasara n	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				siswa		Usia Dini (PAUD)
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Pembinaan perpustakaan	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
				Pemerataan guru pada wilayah terpencil dan terbelakang		
					Pengelolaan arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan kebudayaan
					Pengembangan kebudayaan	yang masyarakat pelakunya dalam daerah
						kabupaten/kota
						Pembinaan kesenian
				Melestarikan adat, budaya dan sejarah daerah	Pelestarian seni, budaya dan sejarah daerah	yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
						Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten/kota
					Pembinaan sejarah	
						Pembinaan dan pengembangan olahraga
						pendidikan
						pada jenjang



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
			Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat			Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota
				Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
		Meningkatkan pemahaman dan implementasi ajaran agama	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Peningkatan sarana prasarana serta pembinaan keagamaan		
					Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
						Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
		Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas			Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
			Perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas dari tindak	Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			kekerasan			
					Perlindungan perempuan	
						Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
						Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
					Perlindungan khusus anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
						Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
				Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas		
					Rehabilitasi sosial	
		Meningkatnya derajat	Meningkatkan kualitas layanan	Peningkatan kualitas kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		kesehatan	kesehatan pada layanan dasar dan	layanan dasar	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah
			layanan rujukan	dan rujukan melalui penyedia sarana prasarana kesehatan, serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
						Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
			Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan SDM kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKM di wilayah kabupaten/kota
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
						Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah
				Peningkatan gerakan masyarakat hidup		



N o	Prioritas Daerah	Sasara n	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				sehat		kabupaten/kota
			Meningkatk an promosi kesehatan bagi masyarakat		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerahkabupat en/kota
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
						Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal
						Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Pe tugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot a
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						a dalam
					Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
					Pemberdayaan sosial	
						Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan			
3						
						Pengelolaan informasi pasar kerja
					Penempatan tenaga kerjakabupaten /kota	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya



N o	Prioritas Daerah	Sasara n	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas		
						beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota		
						Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota		
			Meningkatka n prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkata n prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	Penyelenggaraa n jalan	Penyelenggaraa n jalan kabupaten/kota		
		Meningkat nya pemerataa n aksesibilit as wilayah						
						Penyediaan dan pengembanga n prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian	
								Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota
	Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kewilayahan			Peningkat an dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten,				



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				kecamatan dan perdesaan		
4			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan			Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
					Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota
						Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RTR) kabupaten/kota
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Penyiapan regulasi dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Penyediaan dokumen rencana umum tata ruang wilayah		
					Penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota
				Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	



N o	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				masyarakat		
			Pengembangan SDM yang inovatif kreatif serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
		Meningkatnya SDM berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif				
	Peningkatan SDM Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif					
5					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
					Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
						Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
				Mendorong pengembangan		



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				gan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi		
			Pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			
	Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
6					Pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						Penataan Pendaftaran Penduduk
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
						Pelayanan



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Pencatatan sipil
					Pencatatan Sipil	
						Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Peningkata n status pemerintahan desa		Pembinaan dan pengawasan penyelenggara an administrasi pemerintahan desa
					Administrasi pemerintahan desa	
			Meningkatka n manajemen pemerintah membangun open government dalam penyelenggar aan pemerintahan			
				Perkuatan, keterbukaa n informasi, transparansi , serta mendorong		Penyelenggaraa n pengawasan internal
		Meningka tnya kinerja pemerinta han			Penyelenggara an pengawasan	Penyelenggaraa n pengawasan dengan tujuan tertentu
				partisipasi		Perumusan



N o	Prioritas Daerah	Sasara n	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				publik termasuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pendampingan dan asistensi
					Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a
					Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
				Pengelolaa n keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaa n daerah
			Meningkatka n pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib			
		Meningkat nya kinerja			Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang urusan



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		pemerintahan				kewenangan pengelolaan keuangan daerah
						Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan
						Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
					Pengelolaan Pengelolaan barang pendapatan daerah milik daerah	Pengelolaan barang milik daerah
						Penyusunan perencanaan dan pendanaan
						Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan
				Membangun sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan		Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan



N o	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				evaluasi pembangunan daerah		
						Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
						Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
			Meningkatkan sistem manajemen akuntabilitas berbasis kinerja instansi pemerintah		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA
						Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
					Penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
						Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						pembangunan
			Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan SPIP melalui perencanaan dan penganggaran	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal
		Meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
					Pengembangan sumberdaya manusia	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Penyediaan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan keluarga		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Pengembangan sistem air limbah		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
						Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota
				Peningkatan sistem drainase perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
			Pengembangan sistem drainase			
				Optimalisasi pengelolaan dan penyediaan		
			Peningkatan penanganan persampahan			



N o	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				prasarana dan sarana persampahan	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah

6.4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2025.

Pada dasarnya, Program kegiatan yang disusun pada level Kabupaten mengacu pada program yang disusun pada level nasional dan provinsi. Ada 7 Prioritas Nasional (PN) yang menjadi acuan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:

1. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
2. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik;
5. Berbicara Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sinkronisasi dan keterkaitan Prioritas Pembangunan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. 12 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
PN.1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Provinsi Ke : 5 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Prioritas Daerah Ke : 7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
PN. 2 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Prioritas Provinsi Ke : 2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Prioritas Daerah Ke : 4 Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur



Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	dan merata	Kewilayahan
PN. 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Provinsi Ke : 3 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Prioritas Daerah Ke : 1 Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif
PN. 4 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Provinsi Ke : 1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Prioritas Daerah Ke : 6 Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
PN. 5 Berbicara Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Provinsi Ke : 4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Prioritas Daerah Ke : 3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran
PN. 6 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Prioritas Daerah Ke : 5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif
PN. 7 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Prioritas Daerah Ke: 2 Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya Program prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 6. 13 Program Prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	75,6	1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Dinas Perikanan Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pariwisata
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	125	1. Pemetaan Potensi dan Penyusunan Master	



PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif			Plan Pembangunan	Dinas Koperasi Dinas PTSP
			2. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	
			3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan melalui pemantapan sumber daya alam desa	
			4. Penguatan Ketahanan Pangan	
			5. Pengelolaan Sumberdaya Untuk Pangan	
			6. Ketahanan Pangan Desa	
			7. Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan	
			8. Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya pariwisata bahari	
			9. Pengembangan Kapasitas manajemen dan usaha koperasi dan UMKM	
			10. Kemudahan dan Kesempatan mengembangkan usaha bagi koperasi dan UMKM	
			11. penyelenggaraan pameran investasi	
			12. Penyusunan rencana umum penanaman modal	
			13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			14. Pemantauan Kebijakan	



PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
			sumberdaya alam	
2. P eningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,5	1. Program Pendidikan Luar Biasa	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan
	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	87,6	1. Program Pengelolaan Pendidikan	
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	55,5	1. Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Perlindungan dan jaminan sosial	
			3. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Lembaga adat di MHA	
			4. Program pengendalian penduduk	
			5. Program pemberdayaan Masyarakat desa	
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	38,5	1. Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Bula	Dinas Penata Ruang dan Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tingkat Aksesibilitas	55,5	1. Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043	
			2. Penanganan	



PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kawasan Sesar	
			3. Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kota Bula	
			4. Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			5. Penanganan Banjir Kota Bula	
			6. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan, Bandara, dan Terminal	
			7. Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	
			8. Penyediaan Sanitasi Layak	
			9. Penyediaan Internet Desa	
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif	Indeks Pembangunan Manusia	66,5	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	5,78	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			2. Program Riset Dan Inovasi Daerah	
6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	2,51 3,25	1. Program peningkatan sumber daya manusia aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	2,51 3,25	1. Program peningkatan system pengawasan internal di pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2. Program pengembangan	



PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
			n inovasi dan teknologi	
			3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	
			4. peningkatan kualitas pelayanan publik	
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Fungsi Tata Ruang dan Mitigasi Bencana	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	34,2	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penata Ruang dan Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2. Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			3. Rehabilitasi Kerusakan Lahan	
			4. Revisi Tata Ruang Kab. Seram Bagian Timur	
			5. Penyusunan RANPERDA Revisi RTRW	
			6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kebencanaan	
			7. Penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini ditemui baik dari regulasi maupun aspek teknis, namun demikian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertekad untuk selalu mencari solusi dan dalam meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan di daerah ini, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah yang bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya, untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Timur kedepan.

Bupati Seram Bagian Timur

FACHRI HUSNI ALKATIRI